



LAPORAN PENELITIAN  
DIPA PNBP UNIVERSITAS AIRLANGGA  
TAHUN ANGGARAN 2006

**STRATEGI WACANA DAN KONSTRUKSI IDEOLOGI DALAM  
BULETIN AL ISLAM TERBITAN HIZBUT TAHRIR  
INDONESIA: Analisis Wacana Kritis**

Peneliti:

**Lina Puryanti, S.S.,M.Hum.  
Lusvita Fitri Nuzuliyanti, S.S.,M.A.**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dibiayai oleh DIPA Penerimaan Negara Bukan Pajak  
Universitas Airlangga Tahun 2006  
SK Rektor Universitas Airlangga Nomor 4017/J03/PP/2006  
Tanggal 2 Juni 2006  
Nomor Urut 84

**FAKULTAS SAstra  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**Nopember, 2006**



LAPORAN PENELITIAN  
DIPA PNBP UNIVERSITAS AIRLANGGA  
TAHUN ANGGARAN 2006

**STRATEGI WACANA DAN KONSTRUKSI IDEOLOGI DALAM  
BULETIN AL ISLAM TERBITAN HIZBUT TAHRIR  
INDONESIA: Analisis Wacana Kritis**

Peneliti:

**Lina Puryanti, S.S.,M.Hum.  
Lusvita Fitri Nuzuliyanti, S.S.,M.A.**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dibiayai oleh DIPA Penerimaan Negara Bukan Pajak  
Universitas Airlangga Tahun 2006  
SK Rektor Universitas Airlangga Nomor 4017/J03/PP/2006  
Tanggal 2 Juni 2006  
Nomor Urut 84

**FAKULTAS SASTRA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**Nopember, 2006**



- IDEOLOGY - IR-PERPUSTAKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  
- ISLAM.



LAPORAN PENELITIAN  
DIPA PNPB UNIVERSITAS AIRLANGGA  
TAHUN ANGGARAN 2006

**STRATEGI WACANA DAN KONSTRUKSI IDEOLOGI DALAM  
BULETIN AL ISLAM TERBITAN HIZBUT TAHRIR  
INDONESIA: Analisis Wacana Kritis**

Peneliti:

Lina Puryanti, S.S.,M.Hum.  
Lusvita Fitri Nuzuliyanti, S.S.,M.A.

KKB

KR.2

LP142/08

Pur  
S

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dibiayai oleh DIPA Penerimaan Negara Bukan Pajak  
Universitas Airlangga Tahun 2006  
SK Rektor Universitas Airlangga Nomor 4017/J03/PP/2006  
Tanggal 2 Juni 2006  
Nomor Urut 84

**FAKULTAS SASTRA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**Nopember, 2006**





**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5962066  
E-mail : infolemlit@unair.ac.id - http : //lppm.unair.ac.id

**IDENTITAS DAN PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN**

1. Judul Penelitian : Strategi Wacana dan Konstruksi Ideologi dalam Buletin Al Islam Terbitan Hizbut Tahrir Indonesia : Analisis Wacana Kritis
- a. Macam Penelitian : ( ) Fundamental. ( ) Terapan. ( ) Pengembangan. ( ) Institusional
- b. Katagori Penelitian : ( ) I ( ) II ( ) III ( ) IV
2. Kepala Proyek Penelitian
- a. Nama Lengkap dan Gelar : Lina Puryanti, S.S.,M.Hum.
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. Pangkat/Golongan dan NIP: Penata Muda (Gol. III/a) 132205667
- d. Jabatan Sekarang : Asisten Ahli
- e. Fakultas/Puslit/Jurusan : Fakultas Sastra
- f. Univ./Inst. /Akademi : Universitas Airlangga
- g. Bidang Ilmu Yang Diteliti : Ilmu Sastra
3. Jumlah Tim Peneliti : 2 (dua) orang
4. Lokasi Penelitian : -
5. Kerjasama dengan Instansi Lain
- a. Nama Instansi : -
- b. A l a m a t : -
6. Jangka Waktu Penelitian : 5 (lima) bulan
7. Biaya Yang Diperlukan : 6.000.000.00
8. Seminar Hasil Penelitian
- a. Dilaksanakan Tanggal :
- b. Hasil Penelitian : ( ) Baik Sekali ( V ) Baik  
( ) Sedang ( ) Kurang

Surabaya, September 2006



Mengetahui/Mengesahkan :

a.n. Rektor

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Prof. Dr. H. Sarmanu, MS.  
NIP. 130 701 125

## RINGKASAN

## STRATEGI WACANA DAN KONSTRUKSI IDEOLOGI DALAM BULETIN AL ISLAM TERBITAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA: ANALISIS WACANA KRITIS

(Lina Puryanti, Lusvita Fitri Nuzuliyanti, 2007, 55 halaman)

Penelitian ini dilakukan untuk membedah model strategi wacana yang dipakai oleh Hizbut Tahrir Indonesia dalam bulletin Dakwah Al Islam dalam konteks analisis wacana kritis dan bagaimana ideologi dikonstruksikan melalui representasi subyek-obyek dalam teks.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan korpus penelitian adalah bulletin dakwah Al Islam yang diterbitkan oleh HTI dengan nomor penerbitan 293: *Penjajahan Asing lewat Undang-Undang*, 294: *Saatnya Khilafah memimpin dunia dengan Syariah*, 297: *Mengawal RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi*, 298: *Jangan biarkan pihak asing memecah belah negeri kita*, 299: *Mengikuti dan meneladani Rasulullah SAW*. Korpus ditentukan berdasarkan keterbatasan waktu penelitian dan issue yang dirasakan cukup memadai untuk diteliti yaitu telah meliputi aspek berita lokal/nasional dan internasional. Sistem kode dalam analisa data didasarkan pada pendekatan analisis wacana kritis model Perancis yang tokoh utamanya adalah Sara Mills. Dalam model pendekatan analisis wacana kritis Sara Mills menyatakan bahwa representasi subyek obyek dalam teks akan mempengaruhi cara pembaca memposisikan diri dalam membaca dan memaknai teks. Cara memposisikan pembaca ini ada dua: dengan proses mediasi dan proses kode budaya. Proses mediasi adalah proses bagaimana pembaca tersugesti untuk mengidentifikasi diri dan masuk ke dalam posisi subyek pencerita sedangkan kode budaya adalah kode-kode yang digunakan pembaca menerjemahkan dan menafsirkan isi teks dan menganggapnya benar.

Analisis yang telah dilakukan menunjukkan bagaimana ideologi dan kekuasaan menjadi bagian terpenting dari analisis sedangkan wacana, yang sifatnya dapat dikonstruksikan, dapat dipakai untuk memperbesar pengaruh kekuasaan. Dalam hubungannya dengan ideologi maka unit bahasa bisa dipakai sebagai alat untuk mendeteksi ideologi dalam teks karena bahasa dapat menjadi alat utama untuk melihat ideologi.

Analisis menunjukkan bagaimana Redaksi buletin menempatkan dirinya sebagai 'kami', *self* atau *us* yang mempunyai otoritas untuk menafsirkan pihak lain 'liyan', *other* atau *them* yang berseberangan ideologi atau kepentingannya. Kelompok 'liyan' ini dilabeli dengan berbagai label seperti musuh Islam, kelompok Barat, kelompok Kafir, dan kelompok sekular. Sementara Redaksi menempatkan dirinya dalam posisi subjek yang lebih tinggi.

Buletin Dakwah Al Islam melakukan pemilihan teks skriptural untuk menjustifikasi kewajiban melawan musuh, baik secara defensif atau ofensif. Legitimasi ayat-ayat Al Qur'an digunakan untuk melabeli secara negatif pihak atau negara yang dianggap musuh sehingga pertarungan yang muncul adalah pertarungan yang baik melawan yang jahat, antara yang diberkati dan dikutuk Tuhan. Ini adalah bagian dari apa yang dimaknai sebagai kebangkitan (fundamentalisme) agama Islam. Dengan kata lain, fundamentalisme adalah makna ideologis yang bisa disingkap dari buletin Al Islam. Fundamentalisme ini memandang politik berbasis ideologi Barat sebagai 'gagal'. Yang dikedepankan dalam fundamentalisme ini adalah sikap '*truth claim*' – merasa paling benar dengan menyalahkan, menyesatkan agama dan pemeluk lainnya. Pada gilirannya sikap ini akan melahirkan 'masyarakat teks' – masyarakat yang lahir, hidup dan berjuang demi teks.

Dalam pandangan Althusser, pembongkaran posisi ideologis Hizbut Tahrir berada pada dimensi *Ideological State Apparatus*; eksistensi negara (dalam hal ini institusinya adalah organisasi HT) sebagai alat perjuangan kelas yang masuk dengan cara mempengaruhi untuk melanggengkan penindasan yang tampak dalam relasi produksi masyarakat. Dalam buletin Dakwah Al Islam terdapat kemiripan cara beroperasi pada representasi Subyek-Obyek yang bersifat dominasi ideologi. Pemosisian subyek-obyek dalam buletin Dakwah Al Islam melahirkan cara penyapaan tertentu terhadap pembaca yaitu proses penyapaan tidak langsung melalui mediasi dan kode budaya. Proses mediasi adalah proses mensugesti pembaca agar mengidentifikasi diri dengan subyek pencerita/pendefinisi peristiwa sedangkan kode budaya adalah kode-kode budaya yang digunakan pembaca untuk menafsirkan teks sebagai benar atau bisa diterima.

Kata kunci = wacana ; konstruksi ideologi ; Buletin Al Islam

**SUMMARY****DISCOURSE STRATEGIES AND IDEOLOGICAL CONSTRUCTION IN BULETIN  
DAKWAH AL ISLAM BY HIZBUT TAHRIR INDONESIA:  
A CRITICAL DISCOURSE APPROACH****(Lina Puryanti, Lusvita Fitri Nuzuliyanti, 2007, 55 pages)**

---

This study aims to analyse the discourse strategies in the Al Islam bulletin of Hizbut Tahrir Indonesia. The study employs Critical Discourse Analysis approach and the construction of ideology in the representation of the subjects and objects within the text.

The corpus of the study (Al Islam bulletins no. 293, 294, 297, 298, 299) is analysed using descriptive qualitative method. The corpus is determined based on the range of diversity of the national and international issues taken up by the bulletin. The coding system of the data is based on French Discourse Analysis (Sara Mills). In Mills' CDA, the representation of subject and object within the text will influence the way the readers' position themselves in understanding and interpreting the text. There are two ways of achieving these aims – by mediating and cultural coding process. Mediating process is how to get readers to identify themselves along with the subject narrator while cultural coding process is how to employ specific codes that are used by readers to understand and interpret the text – in the way expected by the subject narrator.

The study reveals that ideology and power is the most important part of the text and that discourse can be constructed to influence and expand the power. Language units are also units of ideology and this in turn shows how language is the main means to spread ideology.

The bulletin editors position themselves as “us” – the “self” or “us” which have the authority to interpret the “others” or “them” – people with different/opposing ideology and interests and therefore in a higher/better position. The “others” are variously labelled as the enemy of Islam, the West, a bunch of heathens and secular groups.

The scriptural texts are chosen by the editors to justify the obligation of fighting the enemies, defensively or offensively. The legitimation comes from verses of Al Quran which are used to negatively labelled certain parties or countries (enemies). In this way,

the war/fight comes up as a fight between the good against the bad, between the blessed and the cursed. The phenonema is part of what is known as Islamic fundamentalism. In other word, the bulletin has in it fundamentalism as its ideology. In this sense, Western ideology is seen as a failure and what is of the utmost importance in the bulletin is the 'truth claim' – one party considers themselves as the 'right' one while putting the blame on the other opposing parties.

In Althusser's view, the ideological position of Hizbut Tahrir is in the dimension of *Ideological State Apparatus*, nation (a.k.a. Hizbut Tahrir as an organization) is the means of class struggle to legitimize oppression in the society. Al Islam buletin shows similarity to this tendency in its way of representing the subject and object of the text. This particular way of representation produces particular ways of addressing readers – indirect address through mediation and cultural codes process.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT kami panjatkan bahwa laporan akhir ini dapat diselesaikan. Penelitian yang berjudul “Strategi Wacana dan Konstruksi Ideologi dalam Buletin *Al Islam* terbitan Hizbut Tahrir: Analisis Wacana Kritis” ini merupakan sebuah kajian yang memanfaatkan teks media (buletin) sebagai unit analisis.

Dengan selesainya penulisan laporan penelitian ini, tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sarmanu selaku Ketua Lembaga Penelitian Universitas Airlangga yang telah menyetujui usulan penelitian ini dan membantu kelancaran proses pelaksanaan penelitian.
2. Drs. Heru Supriyadi selaku Dekan Fakultas Sastra yang telah menyetujui pengajuan proposal penelitian dan memberikan ijin pelaksanaan penelitian.
3. Rekan-rekan sejawat di jurusan Sastra Inggris yang telah banyak memberikan masukan berharga dalam proses penelitian dan penyusunan laporan ini.
4. Seluruh staf dan karyawan Lembaga Penelitian Universitas Airlangga yang telah banyak membantu kelancaran administrasi penelitian ini.
5. Pihak-pihak yang telah membantu lainnya, baik secara langsung atau tak langsung yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Kami menyadari bahwa laporan akhir penelitian ini masih jauh dari sempurna, sehingga masukan, kritik dan komentar sangat kami harapkan guna meningkatkan kualitas penelitian berikutnya.

Surabaya, Februari 2007

Tim Peneliti

## DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN .....	ii
RINGKASAN PENELITIAN DAN SUMMARY .....	iii
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.1.2. Perumusan Masalah .....	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....	6
BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....	11
3.1. Tujuan Penelitian .....	11
3.2. Manfaat Penelitian .....	11
BAB IV. METODE PENELITIAN .....	13
4.1. Sumber Data .....	13
4.2. Lokasi Penelitian .....	13
4.3 Teknik Pengumpulan Data .....	13
4.4 Teknik Analisis Data .....	13
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN .....	15
5. 1. Strategi Wacana dalam buletin Dakwah Islam .....	15
5. 2. Posisi Ideologis Hizbut Tahrir Indonesia pada Representasi Subjek dan Objek dalam Buletin Dakwah Al Islam dalam Konteks Analisis Wacana Kritis (CDA) .....	40
BAB VI. SIMPULAN DAN SARAN .....	52
6.1. Simpulan .....	52
6.2. Saran .....	54
DAFTAR PUSTAKA .....	55
LAMPIRAN	
1. Personalia Tenaga Peneliti	
2. Buletin Dakwah Al-Islam edisi 293, 294, 297,298,299	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

“Penjajahan Asing Lewat Undang-Undang” (293), “Saatnya Khilafah Memimpin Dunia dengan Syariah” (294), “Mengawal RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi” (297), “Jangan Biarkan Pihak Asing Memecah-Belah Negeri Kita” (298), “Mengikuti dan Meneladani Rasulullah SAW” (299) adalah beberapa judul Buletin Dakwah Al Islam yang diterbitkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (selanjutnya akan disebut sebagai HTI). Judul-judul tersebut bersifat respon terhadap peristiwa yang sedang hangat terjadi di Indonesia dan seringkali juga tidak bisa dipisahkan dari berbagai peristiwa yang terjadi dalam skala internasional. Contohnya, buletin AL Islam no 298 yang berjudul “Jangan Biarkan Pihak Asing Memecah-Belah Negeri kita” merupakan bentuk protes yang ditujukan kepada pemerintah Australia yang memberikan visa sementara kepada 42 aktifis pro-penglepasan Papua yang meminta suaka. Buletin tersebut menyatakan bahwa “Tindakan pemerintah Australia ini jelas merupakan campur tangan terhadap masalah dalam negeri Indonesia.... Jelas tindakan ini adalah bentuk dan upaya Australia untuk menginternasionalisasi persoalan di Papua. Tindakan ini juga sekaligus menunjukkan bahwa Australia berupaya masuk ke dalam masalah pelepasan Papua dari Indonesia.”

Contoh lain yang bersifat respon terhadap peristiwa lokal terlihat pada Buletin no 297 yang berjudul “Mengawal RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi”. Buletin nomor tersebut berisi penyesalan akan adanya penolakan berbagai pihak terhadap rencana disahkannya Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi. Al Isiam menyebutkan bahwa alasan penolakan tersebut “terlihat amat konyol dan tidak masuk akal” karena UU tersebut dimaksudkan sebagai “upaya untuk menata kehidupan moral yang lebih baik

(yang) ditolak hanya demi kepentingan pribadi, golongan, bisnis, dan juga kepentingan asing yang berupaya menghancurkan generasi muda kita.”

Respon-respon tersebut akan dilampiri dengan sejumlah data ataupun alasan-alasan yang menguatkan kenapa organisasi HTI menyikapi suatu peristiwa dengan cara tertentu. Secara umum argumentasi yang disusun berupa penjelasan-penjelasan yang bersifat umum dan kemudian dikuatkan dengan pandangan-pandangan yang dianggap berasal dari sumber kanonik Islam seperti Al-Qur'an dan hadits. Seluruh penjelasan tadi akan ditutup dengan himbauan kepada umat Islam untuk selalu berjuang dan membela agama (Jihad) dan kembali kepada nilai-nilai yang dianggap Islami oleh kelompok ini. Pembaca, dalam hal ini diasumsikan sebagai umat Islam, juga diingatkan agar selalu waspada terhadap berbagai propaganda yang dilancarkan oleh berbagai pihak (khususnya Barat) yang selalu berusaha untuk menghancurkan Islam.

Ciri-ciri utama yang nampak dalam Buletin ini amat menarik untuk diteliti karena bisa dipakai untuk melihat suatu fenomena yang jauh lebih luas dan mendalam. Sebuah fenomena yang nampaknya juga tidak bisa dilepaskan dari fenomena keagamaan yang sedang marak di tanah air atau bahkan dalam skala yang lebih luas bersifat Internasional. Melalui media dakwahnya yang terbit berkala setiap minggu ini HTI (sebagai bagian dari jaringan Hizbut Tahrir Internasional) nampaknya secara perlahan-lahan mulai merebut simpati khalayak di tengah kebingungan umat memaknai pelbagai perubahan sosial, politik, maupun budaya di sekitar mereka. Seruan kembali kepada Islam berhasil menyedot umat yang selama ini rindu spiritualitas. Tidak heran jika kelompok ini mampu menancapkan pengaruhnya di tengah komunitas muslim perkotaan kelas profesional terdidik. Perkembangan HTI di kampus-kampus umum sering menjadi bukti betapa berpengaruhnya kelompok tersebut terhadap generasi muda muslim. Sasaran ini dibidik

secara baik oleh mereka sebagai rencana strategis yang diharapkan dapat menjadi generasi andalan bagi perkembangan Islam yang dicita-citakan.

Dalam situsnya disebutkan bahwa Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik yang berideologi Islam. Politik merupakan kegiataannya dan Islam adalah ideologinya. Latar belakang berdirinya Hizbut Tahrir dikatakan dalam rangka memenuhi seruan Allah SWT. Hizbut Tahrir bermaksud membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan yang amat parah, membebaskan umat dari ide-ide, sistem perundang-undangan, dan hukum-hukum kufur, serta membebaskan mereka dari cengkeraman dominasi dan pengaruh negara-negara kafir. Hizbut Tahrir bermaksud juga membangun kembali Daulah Khilafah Islamiyah di muka bumi, sehingga hukum yang diturunkan Allah SWT dapat diberlakukan kembali. Salah satu tujuan yang disebutkan adalah membangkitkan umat Islam dengan kebangkitan yang benar, melalui pola pikir yang cemerlang. Hizbut Tahrir berusaha mengembalikan posisi umat ke masa kejayaan dan keemasannya seperti dulu, di mana umat akan mengambil alih kendali negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia ini, dan negara khilafah akan kembali menjadi negara nomor satu di dunia—sebagaimana yang terjadi di masa silam—serta memimpin dunia sesuai dengan hukum-hukum Islam. Kegiatan Hizbut Tahrir adalah kegiatan yang bersifat politik, dimana Hizbut Tahrir memperhatikan urusan masyarakat sesuai dengan hukum-hukum serta pemecahannya secara syar'i karena politik adalah mengurus dan memelihara urusan masyarakat sesuai dengan hukum-hukum Islam dan pemecahan-pemecahannya. Perjuangan politiknya terlihat dari perjuangannya terhadap kaum kafir imperialis untuk memerdekakan umat dari belenggu dominasinya, membebaskan umat dari cengkeraman pengaruhnya serta mencabut akar-akarnya yang berupa pemikiran, kebudayaan, politik, ekonomi, maupun militer dari seluruh negeri-negeri Islam. (Online)

Al Islam sebagai media resmi Hizbut Tahrir berperan sangat penting bagi tersosialisasikannya ide-ide gerakan politik HT. Dalam pandangan kritis media bukan hanya sekadar alat dari kelompok dominan untuk mensosialisasikan gagasannya (dalam hal ini organisasi HT yang memproduksi teks) tetapi juga memproduksi ideologi dominan. Media membantu kelompok dominan menyebarkan gagasannya, mengontrol kelompok lain, dan membentuk konsensus antar anggota komunitas. Lewat medialah, ideologi dominan, apa yang baik dan apa yang buruk dimapankan. (Barrat, 51-52) Media bukanlah sekadar saluran yang bebas, ia juga subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihakannya. Media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas sesuai dengan kepentingannya. (Bennet, 288). Dalam pandangan kritis, media juga dipandang sebagai arena pertarungan ideologi antara kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat. Disini, media bukan sarana yang netral yang menampilkan kekuatan dan kelompok dalam masyarakat secara apa adanya, tetapi kelompok dan ideologi yang dominan itulah yang akan tampil dalam pemberitaan. (Woolacott, 51-52).

Titik penting dalam memahami media menurut paradigma Kritis adalah bagaimana media melakukan politik pemaknaan. Makna tidak tergantung pada struktur makna itu sendiri, tetapi pada praktek pemaknaan. Makna adalah suatu produksi sosial, suatu praktik. (Hall, 67). Lebih lanjut Hall mengatakan bahwa media pada dasarnya tidak mereproduksi, melainkan menentukan (*to define*) realitas melalui pemakaian kata-kata yang terpilih. Makna tidaklah secara sederhana dapat dianggap sebagai reproduksi dalam bahasa, tetapi sebuah pertentangan sosial (*social struggle*) perjuangan dalam memenangkan wacana. Oleh karena itu, pemaknaan yang berbeda merupakan arena pertarungan yang memasukkan bahasa di dalamnya. (Hall, 77).

Dalam konteks terbentuknya bangunan wacana, studi analisis wacana bukan sekedar mengenai pernyataan, tetapi juga struktur dan tata aturan dari wacana (Foucault, dalam Sara Mills 48-62). Realitas dipahami disini sebagai seperangkat konstruk yang dibentuk melalui wacana. Realitas itu sendiri tidak bisa didefinisikan jika tidak ada akses terhadap pembentukan struktur diskursif tersebut. Cara mempersepsi dan bagaimana menafsirkan objek dan peristiwa dalam sistem makna tergantung pada struktur diskursif. Struktur diskursif ini, menurut Foucault, membuat objek atau peristiwa menjadi terlihat nyata. Pandangan tentang suatu objek dibentuk dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh struktur diskursif tersebut.: Wacana dicirikan oleh batasan bidang dari objek, definisi dari perspektif yang paling dipercaya dan dipandang benar dan yang lain tidak.

Realitas yang diinformasikan oleh buletin Al Islam, misalnya, hanya dapat dipahami sebagai seperangkat konstruksi yang dibentuk oleh wacana. Realitas tersebut tidak bisa dipahami jika tidak ada akses terhadap pembentukan struktur diskursif tersebut. Pandangan tentang suatu objek atau peristiwa dibentuk dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh struktur diskursif tersebut. Misalnya melalui pelampiran data, legitimasi ayat-ayat suci Al-Qur'an, hadits ataupun pelabelan yang diberikan kepada pihak-pihak lain yang berbeda kepentingannya dengan produsen teks (HTI)

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Strategi wacana apakah yang dipakai oleh Hizbut Tahrir Indonesia dalam buletin Dakwah Al Islam pada konteks analisis wacana kritis?
2. Bagaimanakah ideologi dikonstruksikan melalui representasi subjek dan objek dalam teks buletin Dakwah Al Islam dalam konteks analisis wacana kritis?

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Analisis wacana adalah istilah umum yang banyak dipakai dalam banyak disiplin ilmu dan dengan berbagai pengertian. Meskipun ada gradasi yang besar dari berbagai definisi, titik singgungnya adalah analisis wacana berhubungan dengan studi mengenai bahasa/ pemakaian bahasa. Dalam melihat posisi bahasa dipandang dalam analisis wacana terdapat beberapa perbedaan pandangan. Secara umum, terdapat tiga pandangan penting dalam analisis wacana yaitu *positivisme-empiris*, konstruktivisme, dan pandangan kritis.

Sesuai dengan tema penelitian, maka pandangan ketiga yaitu pandangan kritis yang akan dibahas dalam studi kepustakaan ini sementara dua pandangan lain tidak dibahas. Analisis wacana dalam pandangan kritis menekankan pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. Individu tidak dianggap sebagai subjek yang netral yang bisa menafsirkan secara bebas sesuai dengan pikirannya, karena sangat berhubungan dan dipengaruhi oleh kekuatan yang ada dalam masyarakat. Bahasa dalam pandangan kritis dipahami sebagai representasi yang berperan dalam membentuk subjek tertentu, tema-tema wacana tertentu, maupun strategi yang ada di dalamnya. Wacana melihat bahasa selalu terlibat dalam hubungan kekuasaan, terutama dalam pembentukan subjek, dan berbagai tindakan representasi yang terdapat dalam masyarakat. (Hikam, 85) Karena memakai perspektif kritis, analisis wacana kategori ketiga ini juga disebut sebagai analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis/ CDA*) untuk membedakannya dengan analisis wacana kategori pertama dan kedua (*Discourse Analysis*).

Menurut Fairclough dan Wodak, CDA melihat wacana – pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan – sebagai bentuk dari praktik sosial. Menggambarkan wacana sebagai praktik sosial menyebabkan sebuah hubungan dialektis di antara peristiwa diskursif

tertentu dengan situasi, institusi, dan struktur sosial yang membentuknya. Praktik wacana bisa jadi menampilkan efek ideologi. Analisis wacana kritis melihat bahasa sebagai faktor penting, yakni bagaimana bahasa digunakan untuk melihat ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat terjadi. (Lihat Fairclough & Wodak, 1997; Eriyanto, 2001; dan Van Dijk, 1993)

Posisi CDA yang semacam ini tidak mengherankan karena banyak dipengaruhi oleh berbagai aliran teori dalam teori kritis — misalnya Foucault dengan *discursive formation*, Antonio Gramsci dengan teori hegemoni, Frankfurt School, Bakhtin, dan Louis Althusser, dan Stuart Hall. Althusser dengan teori ideologinya melihat bagaimana ideologi menempatkan seseorang atau suatu kelompok dalam posisi tertentu dalam hubungan sosial. Dalam hubungannya dengan media maka Stuart Hall dan koleganya di *Center for Contemporary Cultural Studies at Birmingham* di Inggris berhasil mengawinkan teori Gramsci di satu sisi dengan teori Althusser. Dalam konteks CDA beberapa pendekatan yang penting dapat diringkas sebagai berikut (Eriyanto, 15-18):

1. Analisis Bahasa Kritis (*Critical Linguistics*) yang memusatkan diri pada analisis wacana pada bahasa dan menghubungkannya dengan ideologi. Aspek Kebahasaan yang diperiksa adalah aspek gramatika. Tokoh-tokoh penting yang mengembangkan model analisis berdasarkan pada pendekatan ini adalah Robert Fowler, Robert Hodge, Gunther Kress, dan Tony Trew.

2. Analisis Wacana Pendekatan Prancis (*French Discourse Analysis*)

Pendekatan ini banyak dipengaruhi oleh teori ideologi Althusser dan teori wacana Foucault. Dalam pendekatan ini, bahasa dan ideologi bertemu pada pemakaian bahasa, dan materialisasi bahasa pada ideologi. Kata yang digunakan dan makna dari kata-kata menunjukkan posisi seseorang dalam kelas tertentu. Bahasa adalah medan pertarungan melalui mana berbagai kelompok dan kelas sosial berusaha

menanamkan keyakinan dan pemahamannya. Pecheux memusatkan perhatian pada efek ideologi dari formasi diskursus yang memposisikan seseorang sebagai subjek dalam situasi sosial tertentu.

### 3. Pendekatan kognisi sosial (*Socio Cognitive approach*)

Tokoh utama pendekatan ini adalah Teun Van Dijk. Pendekatan ini disebut kognisi sosial karena Van Dijk melihat faktor kognisi sebagai elemen penting dalam produksi wacana. Wacana dilihat bukan hanya dari struktur wacana, tetapi juga menyertakan bagaimana wacana itu diproduksi. Proses produksi wacana itu menyertakan suatu proses yang disebut sebagai kognisi sosial. Dari analisis teks misalnya dapat diketahui bahwa wacana cenderung memarginalkan kelompok minoritas dalam pembicaraan publik. Akan tetapi wacana semacam ini hanya tumbuh dalam suasana kognisi pembuat teks yang memang berpandangan cenderung memarginalkan kelompok minoritas.

### 4. Pendekatan Perubahan Sosial (*Sociocultural Change Approach*)

Analisis wacana ini memusatkan perhatian pada bagaimana wacana dan perubahan sosial. Fairclough banyak dipengaruhi oleh pemikiran Foucault dan tradisi intertekstualitas Julia Kristeva serta Bakhtin. Wacana dipandang sebagai praktik sosial yang mengartikan adanya hubungan dialektis antara praktik diskursif tersebut dengan identitas dan relasi sosial. Memaknai wacana demikian dapat menjelaskan bagaimana dapat memproduksi dan mereproduksi status quo.

### 5. Pendekatan Wacana Sejarah (*Discourse Historical Approaches*)

Analisis wacana ini dikembangkan oleh kelompok pengajar di Vienna di bawah Ruth Wodak yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran Frankfurt School, khususnya Jurgen Habermas. Wacana tersebut disebut historis karena analisis wacana harus

menyertakan konteks sejarah bagaimana wacana tentang suatu kelompok atau komunitas digambarkan.

Penelitian ini akan menggunakan Analisis Wacana Pendekatan Prancis (*French Discourse Analysis*). Pendekatan ini dikembangkan oleh Sara Mills yang banyak menulis tentang teori wacana terutama wacana feminis tetapi tidak berarti tidak dapat diterapkan pada bidang-bidang lain. Gagasan dari Sara Mills agak berbeda dari model *critical linguistics* yang memusatkan perhatiannya pada struktur kebahasaan dan bagaimana pengaruhnya dalam pemaknaan khalayak, Mills lebih melihat pada bagaimana posisi-posisi aktor ditampilkan dalam teks. Posisi dalam arti siapa yang menjadi subjek dan objek penceritaan akan menentukan bagaimana struktur teks dan bagaimana makna diperlakukan dalam teks secara keseluruhan. Selain posisi-posisi aktor dalam teks, Mills juga memperhatikan pada bagaimana pembaca dan penulis ditampilkan serta bagaimana pembaca mengidentifikasi dan menempatkan dirinya dalam penceritaan teks. Posisi semacam ini akan menempatkan pembaca pada salah satu posisi dan mempengaruhi bagaimana teks itu hendak dipahami dan bagaimana pula aktor sosial ini ditempatkan. Pada akhirnya cara penceritaan dan posisi-posisi yang ditempatkan dan ditampilkan dalam teks ini membuat satu pihak menjadi *legitimate* dan pihak lain menjadi *illegitimate*. (Eriyanto, 200-216)

Dalam konteks penelitian buletin Al Islam maka bagaimana buletin tersebut merepresentasikan satu pihak, gagasan, atau peristiwa dengan cara tertentu dalam wacana berita akan mempengaruhi pemaknaan ketika diterima oleh khalayak. (Mills, 1997). Posisi sebagai subjek atau objek dalam representasi ini mengandung muatan ideologis tertentu. Posisi ini, pertama, dalam batas tertentu, menunjukkan sudut pandang penceritaan. Artinya seluruh peristiwa dijelaskan melalui suara tunggal sang pencerita (Hizbut Tahrir). Dengan demikian, khalayak tergantung sepenuhnya kepada narator yang bukan hanya

menampilkan dirinya sendiri tetapi juga sebagai juru warta kebenaran. Kedua, subjek representasi mempunyai otoritas penuh dalam mengabsahkan penyampaian peristiwa tersebut kepada pembaca. Karena posisinya sebagai subjek, ia tidak hanya mempunyai keleluasaan menceritakan peristiwa tersebut tetapi juga menafsirkan berbagai tindakan yang membangun peristiwa itu, dan kemudian hasil penafsirannya digunakan untuk membangun pemaknaan yang disampaikan kepada khalayak. Ketiga, karena proses pendefinisian ini bersifat subjektif, tentu saja sukar dihindari kemungkinan penafsiran secara sepihak peristiwa atau kelompok lain. Subjek bukan hanya mendefinisikan dirinya sendiri tetapi juga mendefinisikan pihak lain dalam perspektif atau sudut pandangnya sendiri.

Sebagai contoh dalam menafsirkan buletin AL Islam, terlihat bagaimana Redaksi buletin tersebut menempatkan dirinya sebagai *self* atau *us* yang mempunyai otoritas untuk menafsirkan pihak lain (*other*) atau *them* yang berseberangan ideologi atau kepentingannya. Berbagai label seperti musuh Islam, kelompok Barat, kelompok Kafir, kelompok sekular dialamatkan kepada kelompok *other* tersebut. Sementara Redaksi menempatkan dirinya dalam posisi subjek yang lebih tinggi dengan menyebut diri sebagai agent/ subjek yang bermaksud membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan yang amat parah, membebaskan umat dari ide-ide, sistem perundang-undangan, dan hukum-hukum kufur, serta membebaskan mereka dari cengkeraman dominasi dan pengaruh negara-negara kafir. Untuk itu suatu Daulah Khilafah Islamiyah di muka bumi harus dibangun kembali. Dalam konteks ini, Islam sebagai agama dibekukan menjadi suatu ideologi yang tertutup, bertafsir tunggal, dan menafikan adanya perbedaan penafsiran di antara pemeluknya dalam memaknai berbagai peristiwa ataupun dalam menginterpretasi keberadaan teks-teks kanoniknya.

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan dan manfaat penelitian, yaitu:

#### **III. 1. Tujuan Penelitian**

1. Ingin mengkaji strategi wacana yang dipakai oleh Hizbut Tahrir Indonesia dalam buletin Dakwah Al Islam dalam konteks analisis wacana kritis (CDA)
2. Ingin membongkar posisi ideologis Hizbut Tahrir Indonesia dalam representasi subjek dan objek dalam buletin Dakwah Al Islam pada konteks analisis wacana kritis (CDA)

#### **III.2. Manfaat Penelitian**

1. Menambah wawasan model penerapan analisis wacana kritis (CDA) dalam memahami kebermaknaan sebuah teks
2. Penerapan CDA dalam penelitian ini bisa menjadi salah satu contoh dalam memaknai keberadaan media serta berita – berita yang ada di dalamnya misalnya untuk memeriksa strategi wacana yang dipakai oleh produsen teks dan sekaligus melihat dan menguji pada posisi ideologis manakah suatu media menempatkan dirinya
3. Memberikan alternatif secara lebih luas dalam penelitian suatu teks dengan cara dan hasil yang bisa sama sekali berbeda dibandingkan dengan penelitian yang menggunakan paradigma positivis ataupun konstruktivis
4. Data penelitian ini dapat digunakan oleh para peneliti gerakan keagamaan di tanah air, khususnya HTI, untuk melihat strategi berwacana serta posisi ideologis yang

dipakai oleh kelompok ini melalui buletin dakwah AL Islam dalam bingkai penelitian CDA

5. Data penelitian ataupun model penelitian ini bisa dipakai oleh para peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut



## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan metode analisis datanya adalah kualitatif. Untuk menjangkau data, digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Sumber Data

Data penelitian ini adalah buletin dakwah AL Islam yang diterbitkan oleh HTI dengan nomor penerbitan 293: Penjajahan Asing Lewat Undang-Undang, 294: Saatnya Khilafah Memimpin Dunia dengan Syariah, 297: Mengawal RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi, 298: Jangan Biarkan Pihak Asing Memecah-Belah Negeri Kita, 299: Mengikuti dan Meneladani Rasulullah SAW. Penentuan sumber data dilakukan secara terbatas dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu penelitian dan *issue* yang dirasakan sudah cukup memadai untuk diteliti yaitu telah meliputi aspek berita lokal/ nasional dan internasional

#### 2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini mengambil tempat di kota Surabaya

#### 3. Teknik pengumpulan data

Data dikumpulkan dari lima edisi yang dipilih kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian yaitu pembongkaran struktur wacana dan ideologi dibalik struktur tersebut. Dalam pengklasifikasian ini masing-masing edisi akan dilihat teknik penulisannya yaitu meliputi bagian pembukaan, persuasi, dan legitimasi sikap. Melalui teknik penulisan akan diperoleh data bagaimana posisi subjek dan objek direpresentasikan.

#### 4. Teknik analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis kualitatif akan dipergunakan. Metode penelitian kualitatif adalah penggunaan kata-kata atau kalimat dalam struktur yang logis, untuk menjelaskan konsep-konsep dalam hubungan satu dengan lainnya (Danandjaja, 98). Dalam proses penelitian analisis data dilakukan terhadap sumber data yang telah dipilih dengan menerapkan analisis wacana kritis untuk mencapai tujuan penelitian yaitu mengetahui mengkaji strategi yang dipakai oleh Hizbut Tahrir Indonesia dalam buletin Dakwah Al Islam dan membongkar posisi ideologis Hizbut Tahrir Indonesia yang tercermin dalam buletin tersebut.

## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil dan pembahasan penelitian ini dipaparkan melalui dua tahap analisis yang sesuai dengan perumusan masalah yaitu, (1) mengkaji strategi wacana yang dipakai oleh Hizbut Tahrir Indonesia dalam buletin Dakwah Al Islam dalam konteks analisis wacana kritis (CDA) dan (2) membongkar posisi ideologis Hizbut Tahrir Indonesia dalam representasi subjek dan objek dalam buletin Dakwah Al Islam pada konteks analisis wacana kritis (CDA). Analisis strategi wacana akan diikuti dengan pembongkaran posisi ideologis Hizbut Tahrir Indonesia dalam teks buletin. Pembongkaran posisi ideologis ini dilakukan tidak secara terpisah dalam tiap-tiap teks melainkan menjadi satu bangun wacana ideologis yang muncul dalam semua teks.

#### **5.1 Strategi Wacana dalam Buletin Dakwah Islam**

Pada perumusan awal yang bertujuan untuk mengkaji strategi wacana yang dipakai dalam buletin Dakwah Al Islam terdapat lima contoh edisi yang akan diteliti yaitu edisi 293, 294, 297, 298, dan 299. Edisi-edisi tersebut sengaja dipilih berdasarkan pertimbangan adanya perbedaan-perbedaan tema maupun skala berita yang bersifat persoalan nasional (dalam negeri Indonesia) ataupun internasional (dalam konteks hubungan dengan negara asing), ataupun yang berifat misi dari Hizbut Tahrir sendiri. Teks akan dilihat mula-mula sebagai korpus yang terpisah satu sama lain kemudian akan dicari benang merah ideologis yang mengaitkan strategi wacana yang terlihat di semua teks. Analisis pada strategi wacana ini akan membagi setiap teks dalam tiga bagian yaitu pembukaan, persuasi, dan legitimasi sikap.

Sebagaimana telah dijelaskan, penelitian terhadap teks-teks ini akan memanfaatkan model penelitian Analisis Wacana Kritis Pendekatan Prancis (*French Discourse Analysis*). Sara Mills yang mengembangkan pendekatan ini melihat pada bagaimana posisi-posisi aktor ditampilkan dalam teks. Posisi dalam arti siapa yang menjadi subjek penceritaan dan siapa yang menjadi objek penceritaan akan menentukan bagaimana struktur teks dan bagaimana makna diperlakukan dalam teks secara keseluruhan. Selain posisi-posisi aktor dalam teks, Mills juga memperhatikan pada bagaimana pembaca dan penulis ditampilkan dalam teks. Bagaimana pembaca mengidentifikasi dan menempatkan dirinya dalam penceritaan teks. Posisi semacam ini akan menempatkan pembaca pada salah satu posisi dan mempengaruhi bagaimana teks itu hendak dipahami dan bagaimana pula aktor sosial ini ditempatkan. Pada akhirnya cara penceritaan dan posisi-posisi yang ditempatkan dan ditampilkan dalam teks ini membuat satu pihak menjadi *legitimate* dan pihak lain menjadi *illegitimate*. (Eriyanto, 200-216)

Dalam konteks penelitian buletin Al Islam maka bagaimana buletin tersebut merepresentasikan satu pihak, gagasan, atau peristiwa dengan cara tertentu dalam wacana berita akan mempengaruhi pemaknaan ketika diterima oleh khalayak. (Mills, 1997). Posisi sebagai subjek atau objek dalam representasi ini mengandung muatan ideologis tertentu. Posisi ini, pertama, dalam batas tertentu menunjukkan sudut pandang penceritaan. Artinya seluruh peristiwa dijelaskan melalui suara tunggal sang pencerita (Hizbut Tahrir). Dengan demikian, khalayak tergantung sepenuhnya kepada narator yang bukan hanya menampilkan dirinya sendiri tetapi juga sebagai juru warta kebenaran. Kedua, subjek representasi mempunyai otoritas penuh dalam mengabsahkan penyampaian peristiwa tersebut kepada pembaca. Karena posisinya sebagai subjek, ia tidak hanya mempunyai keleluasaan menceritakan peristiwa tersebut tetapi juga menafsirkan berbagai tindakan yang membangun peristiwa itu, dan kemudian hasil penafsirannya digunakan untuk membangun

pemaknaan yang disampaikan kepada khalayak. Ketiga, karena proses pendefinisian ini bersifat subjektif, tentu saja sukar dihindari kemungkinan penafsiran secara sepihak peristiwa atau kelompok lain. Subjek bukan hanya mendefinisikan dirinya sendiri tetapi juga mendefinisikan pihak lain dalam perspektif atau sudut pandangnya sendiri.

### **5.1.1 Edisi 293/ Tahun XIII: Penjajahan Asing Lewat Undang-Undang**

#### **5.1.1.a Pembukaan**

Judul yang dipilih pada edisi 293/ tahun XIII ini adalah 'Penjajahan Asing Lewat Undang-Undang.' Judul ini menandakan adanya keterkaitan antara Undang-Undang yang akan diproduksi dengan pihak asing. Tetapi hubungan ini bukanlah sebuah hubungan yang bersifat menguntungkan, atau setidaknya tidak bersifat berpihak, karena kata 'penjajahan' yang dipakai menunjukkan bagaimana keberadaan pihak asing ini akan bersifat sangat merugikan karena hubungan yang terbentuk adalah hubungan antara penjajah dan yang dijajah (*colonizer versus colonized*). Dengan demikian, posisi awal yang dipilih oleh Buletin Al Islam mengindikasikan adanya kecurigaan dalam memaknai keberadaan pihak asing pada proses produksi berbagai UU.

Buletin dibuka dengan pelampiran sejumlah data yang berkaitan dengan rencana DPR-RI mengundang sejumlah tenaga ahli bagi kepentingan peningkatan produktifitas produksi berbagai UU. Pada bagian ini Buletin menyertakan berbagai data pendukung seperti pernyataan dari ketua DPR Agung Laksono yang menekankan pentingnya keberadaan pihak asing (dalam hal ini Amerika Serikat) yang akan melakukan asistensi pembuatan naskah akademik, *legal drafting* (pembuatan rancangan undang-undang, sampai menjadi Undang-undang. Tenaga ahli yang diberbantukan dikatakan Laksono sebagai bantuan dari Pemerintah AS untuk negara yang demokrasinya sedang tumbuh.

Selanjutnya, masih pada bagian pembukaan, dijelaskan bagaimana campur tangan pihak asing terhadap negeri ini bersifat sangat berbahaya. Hal tersebut dikatakan terbukti pada produk berbagai UU seperti UU Migas, UU Listrik, UU Sumber Daya Air, UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang isinya dianggap sarat dengan liberalisme. Keputusan DPR sendiri untuk menerima keterlibatan pihak asing juga amat disesali dan bahkan dianggap bersifat ‘tragis’, serta “tidak memberikan manfaat apapun”.

“Tragis! Mungkin, itulah kata yang pantas kita lontarkan ketika DPR-RI berencana mengundang sejumlah tenaga ahli asing dalam rangka meningkatkan produktifitas lembaga itu dalam memproduksi berbagai UU.”

“Entah apa yang ada dalam benak para anggota dewan yang terhormat. Setelah banyak memproduksi UU yang diduga kuat banyak dipengaruhi oleh kekuatan asing—seperti UU Migas, UU Listrik, UU Sumber Daya Air, UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan sejumlah UU lainnya—DPR kini malah secara terang-terangan mengundang pihak asing untuk turut campur tangan secara langsung dalam pembuatan UU di berbagai bidang”

“... Yang pasti, apapun jawabannya, campur tangan asing terhadap negeri ini, apalagi dalam pembuatan berbagai produk UU, jelas sangat berbahaya! Pengalaman membuktikan, UU Migas, UU Listrik (meski kemudian dibatalkan oleh MK), UU Sumber Daya Air (UU SDA), dan UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT), isinya sarat dengan liberalisme

“Jelas, dengan alasan apapun, keterlibatan pihak asing secara langsung dalam pembuatan UU tidak memberikan manfaat apapun; bahkan sebaliknya, berbahaya bagi kondisi ekonomi, politik, sosial, budaya, bahkan keamanan negeri ini pada masa-masa mendatang.

Dalam konteks kehidupan keagamaan (Islam) juga disebutkan bagaimana secara sistematis campur tangan asing ini mengarah pada penghancuran institusi/ lembaga keluarga, terutama pada keluarga-keluarga Muslim.

“Campur tangan asing .... Sebagaimana diketahui, UU KDRT yang beberapa waktu lalu disahkan, misalnya, juga sarat dengan pasal-pasal ‘liberal’ yang mengarah pada penghancuran secara sistematis institusi/ lembaga keluarga, terutama keluarga Muslim. ....

Secara umum dapat dikatakan bahwa pada bagian pembukaan ini Buletin AL Islam telah mulai memposisikan kedudukan aktor-aktor yang berkaitan dengan tema yang tengah diangkat. Aktor-aktor tersebut adalah Pemerintah AS (sebagai pihak asing yang terlibat)

dan pemerintah RI khususnya lembaga DPR RI yang diposisikan sebagai objek pemberitaan, kelompok Hizbut Tahrir yang berperan sebagai subjek pemberitaan yang bersifat mengontrol sepenuhnya isi berita, dan pembaca yang telah diarahkan pada suatu identifikasi tertentu ketika menempatkan dirinya dalam penceritaan teks.

### 5.1.1.b Persuasi

Sesudah melalui tahap pembukaan yang bersifat memperkenalkan dan 'mempersiapkan' pembaca kepada topik yang ada, maka tahapan berikutnya adalah tahapan persuasi. Pada tahapan ini Buletin memberikan alasan persuasif yang melatarbelakangi sikap penolakannya terhadap keberadaan pihak asing tersebut. Alasan yang diberikan cenderung memperlihatkan 'kecurigaan' yang amat besar terhadap maksud atau agenda yang ada dibalik pemberian bantuan tersebut. Buletin menggunakan diksi 'bahaya' untuk menggambarkan posisi pihak asing.

Ada dua bahaya:

"Pertama, ... Artinya impor tenaga ahli itu bukan semata-mata keinginan dari DPR RI, tetapi merupakan 'niat baik' AS. Dalam 'pakem perpolitikan internasional, yang namanya bantuan asing kepada suatu Negara—apalagi dari Negara kapitalis seperti AS yang notabene merupakan negara Imperialis (penjajah)—jelas tidak murni datang dari 'hati yang tulus'. Tegasnya, tatkala negara asing kapitalis seperti AS memberikan bantuan, tidak mungkin (mustahil) itu dilakukan tanpa agenda/tujuan/ kepentingan tertentu. Terlalu 'lugu dan polos' jika kita menilai bantuan AS – yang notabene pengemban utama ideologi kapitalisme – itu semata-mata sebagai kebaikan Negara itu kepada Indonesia."

"Kedua: bantuan tenaga ahli itu, sekali lagi, tidak mungkin hanya menyangkut masalah teknis semata; pasti akan menyangkut permasalahan yang lebih mendasar seperti: filosofi pembuatan UU, kerangka acuan, kerangka berpikir, aspek hukum, batasan masalah, dan konsepsi mendasar lainnya."

Dua alasan yang dikemukakan di atas memperlihatkan posisi yang diambil oleh subjek sekaligus bagaimana objek ditempatkan dalam pemberitaan. Teks pada bagian persuasi memperlihatkan tidak adanya 'suara' pembanding selain yang berasal dari Hizbut

Tahrir sendiri. Khalayak pembaca harus tergantung sepenuhnya pada informasi yang sengaja dipilih oleh bulletin ini untuk menjelaskan 'bahaya' yang dimaksudkan di atas. Diksi-diksi seperti 'negara kapitalis seperti AS yang notabene merupakan negara Imperialis (penjajah)' juga dilabelkan begitu saja tanpa ada suatu keterangan yang menjelaskan bagaimana negara tersebut bisa dikategorikan sebagai negara kapitalis ataupun negara imperialis berkaitan dengan konteks bantuan tenaga ahlinya kepada pemerintah RI. Demikian juga dengan kecurigaan bahwa bantuan ini tidak hanya menyangkut masalah teknis semata tetapi lebih jauh akan memasuki wilayah yang lebih mendasar juga tidak mendapat penjelasan yang cukup memadai. Pembaca buletin diasumsikan telah masuk dalam konstruksi wacana yang sama ketika membaca edisi ini. Subjek representasi mempunyai otoritas penuh dalam mengabsahkan penyampaian peristiwa tersebut. Posisi HT sebagai subjek memungkinkannya menafsirkan berbagai tindakan yang membangun peristiwa tersebut sepenuhnya dan menyampaikannya kepada khalayak. Dalam bagian akhir persuasi pengabsahan ini makin menemukan bentuknya dengan cara menempatkan berbagai produk hukum yang dianggap bercorak liberal, pro kapitalis sebagai akibat dari tindakan mengundang/ melibatkan pihak asing. Kata 'paham' yang dipakai menunjukkan bagaimana subjek representasi menempatkan posisi pembaca dalam konteks yang 'pasti' sejalan dengan keinginan subjek. Pemaknaan bersifat tunggal dan sepenuhnya dikontrol oleh subjek. Dalam bagian akhir persuasi ini pembaca juga mulai dipersiapkan untuk memasuki wilayah konstruksi wacana yang dilegitimasi sebagai sesuatu yang bersifat Islami dengan cara mengeliminasi segala sesuatu yang 'berbau' asing khususnya yang berkaitan dengan wacana negara Amerika Serikat sebagai hal yang selalu bersifat melanggar hukum syari'ah alias tidak Islami.

Karena itu, kita pun semakin 'paham', mengapa setiap produk hukum di Indonesia senantiasa bercorak liberal, pro kapitalis/ memihak pemilik modal, memberikan peluang kepada pihak asing, sering bertentangan dengan kehendak rakyat, dan yang pasti selalu melanggar hukum syariah .

### 5.1.1.c Legitimasi Sikap

Bagian terakhir dari edisi ini bersifat melegitimasi segala tindakan subjek dan menjadikan pihak lain (dalam hal ini pihak 'asing') sebagai *illegitimate*. Proses legitimasi ini dilakukan dengan model penceritaan tertentu serta penempatan atau penampilan posisi subjek dan objek yang bersifat *one-sided*. Judul yang dipilih pada bagian Legitimasi Sikap adalah 'Islam melarang kita Tunduk Kepada Pihak Kafir'. Judul tersebut mengarahkan pembaca akan adanya dua kutub biner yang berseberangan kepentingan ideologinya yaitu kelompok yang dilegitimasi sebagai *us* yang diwakili oleh kelompok Islam atau, dalam konteks ini, secara eksklusif diambil perannya oleh Hizbut Tahrir dan pembaca bulletin yang telah dikonstruksi mempunyai wacana yang sama. Kelompok lainnya adalah kelompok yang dianggap tidak sejalan ideologinya dengan ajaran Islam yaitu *them* atau *other* yang disamakan dengan pihak Barat atau Amerika Serikat.

Dalam model *othering* ini pihak Hizbut Tahrir cenderung menggunakan legitimasi ayat-ayat dalam AL-Qur'an untuk melegitimasi kepentingannya. Setiap tindakan yang diambil oleh yang disebut sebagai kelompok Barat atau Amerika Serikat akan dimaknai sebagai tindakan kelompok musuh Islam dan Allah SWT telah memperingatkan kaum Muslim akan hal tersebut. Kutipan di bawah ini menunjukkan hal tersebut:

“Barat dan AS sebenarnya adalah musuh kaum Muslim yang berpura-pura bersikap manis dan berpura-pura menolong, namun hakikatnya mereka tetap musuh yang hendak memangsa kaum Muslim. Allah SWT menegaskan bahwa orang-orang kafir itu merupakan musuh yang nyata bagi kaum Muslim”

*Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh kalian yang nyata. (Q.S. an-Nisa' (4:101))*

### 5.1.1 Edisi 294/Tahun XIII: Saatnya Khilafah memimpin dunia dengan syariah

### 5.1.2.a Pembukaan

Pada bagian awal artikel ini, HTI melakukan strategi pemosisian pembaca. Dalam bagian ini terlihat bagaimana dilakukan mediasi dan penggunaan kode budaya untuk meletakkan pembaca di posisi tertentu sebagaimana yang dikehendaki oleh HTI selaku subyek pendefinisi peristiwa dan juru warta kebenaran.

Langkah mediasi di sini berarti mensugesti pembaca agar berada pada suatu posisi tertentu seperti dikehendaki oleh subyek. Dalam bagian ini pembaca disugesti untuk melihat bahwa system Khilafah adalah sebuah system yang terbaik untuk umat Islam dan bahwa hilangnya system Khilafah adalah sebuah kehilangan yang sangat besar. Untuk mensugesti pembaca dalam bagian ini, pembaca diarahkan untuk menafsirkan kasus runtuhnya Kekhilafahan Islam tersebut dengan memosisikan obyek (Barat imperialis dan Yahudi yang melakukan konspirasi jahat) sebagai musuh bersama yang memiliki kekuatan besar. Dalam hal ini penafsiran pembaca tentang adanya musuh bersama ini dibantu dengan pemaparan sejarah dunia Islam (Khilafah yang berhasil mempersatukan negara-negara Islam) dan pemaparan tentang keberhasilan khilafah membangun peradaban yang sejahtera. Pembaca yang diposisikan sebagai orang Islam berada pada posisi yang sama dan bersimpati dengan HTI.

Pada bagian pembukaan ini yang tidak muncul adalah bagaimana sistem Khilafah Islamiyah yang diinginkan oleh kelompok HTI ini bekerja pada tataran praksis. Contoh yang diberikan dalam sistem Khilafah ditunjukkan sebagai sesuatu yang sangat ideal dan bermakna tunggal. Demikian juga dengan rujukan yang selalu mengacu pada contoh-contoh yang terjadi di masa lampau menjadikan formalisasi politik Islam dalam sistem kenegaraan menjadi terjebak pada romantisisme masa lalu dan menjauhkannya dari persoalan-persoalan kekinian. Klaim tentang Negara Islam dan penerapan syariat Islam di masa kini, misalnya, sebenarnya juga masih mengundang banyak perdebatan karena sering

justu menimbulkan pemahaman yang sempit. Alih-alih dapat meraih nilai universal syariat, yang sering terjadi justru perbedaan-perbedaan penerapan di wilayah yang berbeda. Sebagai contoh di Arab Saudi perempuan dilarang menyetir mobil sementara di Afganistan di bawah pemerintahan Taliban warga Afganistan dilarang mendengarkan musik karena dianggap haram oleh penguasanya. Contoh kegagalan penerapan syariat Islam yang tidak dicantumkan dalam bagian awal bulletin ini menunjukkan suatu struktur awal formasi wacana yang secara sengaja telah dikonstruksikan sejak awal sebagai sebuah langkah pengkondisian.

Hilangnya sistem Khilafah berarti hilangnya sebuah sistem Islam yang menyatukan dunia Islam dibawah satu kepemimpinan berlandaskan syariat islam, juga berarti hilangnya Negara Islam, juga berarti hilangnya Negara Islam yang-menurut Dr. Yusuf Qardhawi- merupakan perwujudan dari ideologi Islam, yang antara lain akibat dari berbagai konspirasi jahat Barat Imperialis dan Yahudi selama puluhan tahun terhadap Khilafah. Tragedi terbesar sepanjang sejarah umat manusia, hanya Khilafahlah yang sudah terbukti mampu menyatukan dan melebur bangsa-bangsa yang mendiami wilayah antara Xinjiang (Cina Barat), wilayah Kaukasus sampai semenanjung Krimea di Utara. Khilafah juga membawa kesejahteraan, kebangkitan sains dan teknologi, serta kemajuan peradaban umat. Khilafah pun pernah berhasil menjadikan rakyatnya berkecukupan sehingga tidak ada seorang pun yang mau mengambil harta zakat.

#### 5.1.2.b. Persuasi

Dalam bagian ini strategi HTI untuk mendefinisikan obyek adalah dengan cara mengemukakan fakta-fakta buruk tentang kapitalisme (orang miskin, hasil perzinaan, kriminalitas, kebobrokan). Dengan cara ini, obyek didefinisikan sebagai sesuatu yang buruk. Pemilihan fakta-fakta untuk mendefinisikan obyek sebagai sesuatu yang buruk ini adalah seleksi pengetahuan (misalnya bahwa runtuhnya kekhilafahan Islam sebagai akibat konspirasi jahat; tidak disebutkan apakah ada hal-hal lain di dalam tubuh kekhilafahan yang mungkin berkontribusi terhadap runtuhnya kekhilafahan) untuk melegitimasi kekuasaan dalam hal ini adalah wacana HTI. Hal ini sejalan dengan strategi wacana yang dilakukan pada awal artikel di mana pendefinisian obyek berhubungan erat dengan

pemosisian pembaca yang didasarkan pada sugesti adanya ‘musuh bersama umat Islam’ yang telah menyebabkan runtuhnya khilafah (sesuatu yang baik) dan bahwa pihak yang telah menyebabkan runtuhnya khilafah itu toh juga tidak mampu membawa sesuatu yang baik untuk masyarakat – apabila dibandingkan dengan keadaan pada masa kekhilafahan (rakyat berkecukupan, tidak ada seorang pun yang mengambil zakat).

#### Bidang Ekonomi

Di bawah sistem Kapitalisme, terdapat 1,214 milyar orang miskin pada tahun 1997 saja (20% dari penduduk dunia).

#### Bidang Sosial

Harian Newsweek edisi bulan Januari tahun 1997 menulis: Lebih dari separuh anak yang dilahirkan di Swedia adalah hasil perzinaan. Di Perancis dan Inggris angka ini mencapai sepertiganya. Adapun di Amerika, tingkat kehamilan sebagai hasil perzinaan lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan yang terjadi di negara-negara Barat lainnya.

#### Bidang Keamanan

Dalam banyak penelitian terungkap bahwa angka kriminalitas-pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, penyalahgunaan narkoba, bunuh diri, dll-di AS dan sejumlah negara Barat menempati peringkat tertinggi di dunia.

Itulah diantara kebobrokan yang diciptakan oleh ideologi Kapitalisme di dunia, dengan AS dan Barat sebagai pengemban utamanya.

### 5.1.2.c. Legitimasi Sikap

Setelah di bagian sebelumnya menggunakan strategi penciptaan ‘musuh bersama’ dan proses othering obyek pada bagian sebelumnya, di sini HTI melakukan legitimasi atas posisinya sebagai juru warta kebenaran. Dalam proses legitimasi ini digunakan ayat-ayat Al Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW untuk mendukung pendefinisian HTI terhadap obyek – bahwa obyek adalah pihak yang salah dan jangan diikuti – sekaligus juga pendefinisian HTI terhadap dirinya sendiri sebagai pihak yang membawa kebenaran dan harus diikuti. Ini berpengaruh pada proses mediasi teks – di mana pembaca yang diposisikan dan mampu menafsirkan argumentasi HTI dalam konteks pengetahuan Islam – akan tersugesti untuk mengikuti dan memihak HTI sebagai wakil/representasi Islam yang

benar dan sebagai pihak yang melakukan perlawanan terhadap penindasan Obyek. Dengan posisi sebagai wakil/representasi Islam yang benar HTI menegaskan bahwa system negara yang dilandasi syariah adalah yang paling benar dan akan membawa kebaikan berdasarkan ayat-ayat Al Qur'an dan Sunnah Rasul. Di sini juga disebutkan bahwa hukum negara yang tidak berlandaskan syariah adalah 'kafir, zalim dan fasik.' Pendefinisian hukum negara yang tidak berlandaskan syariah ini adalah proses othering sekali lagi terhadap obyek.

**Syariah adalah solusi**

Menyaksikan berbagai kezaliman akibat ideologi Kapitalisme diatas (yang hanya sebagian kecil saja yang diungkap), seharusnya umat Islam segera kembali pada ideologi penyelamat, yang tidak lain adalah Islam; sebuah ideologi yang pasti membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Allah SWT berfirman:

Tidaklah Kami mengutusmu (Muhammad) kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. (QS al-Anbiya' [21]" 107)

**Khalifah adalah penegak Syariah dan Pengayom Umat Manusia**

Didalam Al-Quran Allah sesungguhnya telah mewajibkan kaum Muslim untuk menegakkan syariah-Nya secara total dalam seluruh aspek kehidupan. (QS al-Maidah [5]:48). Sebaliknya Allah telah melarang secara tegas umat manusia untuk menerapkan hukum-hukum di luar syariah-Nya, sekaligus mencap pelakunya sebagai kafir, zalim, atau fasik (QS al-Maidah [5]: 44, 45, 47).

Di sini juga disebutkan bagaimana kaum Muslim harus menegakkan Khilafah (wakil penegakan hukum syariah secara total) – namun di sini dalam sunnah Rasul yang disitir, tidak terdapat informasi yang secara gamblang menyebutkan 'sistem Khilafah sebagai wakil umat Islam' melainkan hanya 'kewajiban untuk baiat (kepada Khalifah).' Yang jadi pertanyaan apakah pembaca diharapkan untuk menyamakan 'khilafah' dengan 'khalifah.' Di sini tidak disebutkan (seperti dalam artikel 298) tentang definisi kekhilafahan Islam yang bentuknya adalah penyatuan negara-negara Islam di bawah satu panji kekhilafahan melainkan justru fungsi dan kewajiban 'khalifah' (pemimpin). Mengingat definisi keduanya yang cukup berbeda, tidak dijelaskan dalam bagian ini apa hubungan 'khilafah' dengan 'khalifah,' namun penyebutan keduanya dalam konteks kalimat di mana kedua kata-kata ini muncul, pembaca (yang awam) bisa menafsirkan

bahwa ‘khalifah’ dan ‘khilafah’ adalah hal yang sama. Dengan demikian sepertinya terjadi proses seleksi/manipulasi pengetahuan untuk melegitimasi posisi HTI.

Disamping itu, didalam As-Sunnah, Rasullulah SAW, telah memerintahkan kaum Muslim untuk menegakkan Khilafah yang berfungsi sebagai wakil mereka dalam menerapkan hukum-hukum syariah secara total.

Rasullulah SAW bersabda:

*Siapa saja yang melepaskan tangan dari ketaatan, ia akan menjumpai Allah pada hari Kiamat kelak tanpa memiliki hujjah, dan siapa saja yang mati, sedangkan di pundaknya tidak terdapat baiat (kepada Khalifah), maka ia mati seperti kematian Jahiliah (HR Muslim)*

Khalifah juga adalah pelayan, pengurus, dan pengayom umat. Nabi SAW bersabda: *Dulu Bani Israel diurus dan dipelihara oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, nabi yang lain menggantikannya. Sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku dan akan ada para Khalifah, yang berjumlah banyak (HR Bukhari dan Muslim)*

Seleksi dan manipulasi pengetahuan ini semakin diperkuat dalam bagian terakhir – sekarang kata-kata ‘khilafah’ berganti menjadi ‘Khalifah Islamiyah’ dan ‘Hanya Khalifahlah – Negara Islam yang bersifat global ...’ Mengapa HTI menggantikan istilah ‘khilafah’ yang selalu dipakainya berulang-ulang dalam bagian ini dengan ‘khalifah’ sangat mungkin disebabkan untuk membuat kedua kata-kata agar memiliki konotasi yang sama karena pada kenyataannya semua ayat Al Qur’an dan sunnah Rasul yang disitirnya tidak secara gamblang menyebutkan bahwa ‘khilafah’ adalah bentuk negara yang diwajibkan oleh Allah SWT. Tujuannya bisa jadi adalah menjadikan pembaca bersimpati dan mendukung munculnya lagi kekhilafahan Islam sebagai mana dikehendaki oleh HTI. Dengan posisi sebagai pihak yang melakukan perlawanan terhadap penindasan Obyek (sejak awal didefinisikan sebagai musuh yang kuat karena mampu mengalahkan khilafah walaupun dengan cara yang kotor – konspirasi jahat) maka HTI dan ‘khilafah’ juga meletakkan posisinya sebagai pihak yang tertindas namun legitimate. Dengan demikian

pembaca secara otomatis juga akan tersugesti bahwa dengan berada pada posisi yang sama dengan HTI maka mereka (umat Islam) juga merupakan pihak tertindas.

Disinilah letak pentingnya kaum Muslim untuk segera menegakkan Khalifah Islamiyah saat ini ditengah-tengah mereka. Hanya Khalifahlah-Negara Islam yang bersifat global- yang akan mampu menghimpun potensi kaum Muslim dan menyatukan Dunia Islam untuk berjihad melawan penindasan negara-negara Barat Kapitalis, sekaligus mengubur ideologi Kapitalisme yang dibawanya, yang terbukti telah banyak menyengsarakan umat manusia. *Wallah Muwaffiq ila aqdam aththariq.*

### 5.1.3 Edisi 297/Tahun XIII: Mengawal RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi.

#### 5.1.3.a Pembukaan

Dalam bagian pembukaan artikel ini obyek yang didefinisikan HTI adalah segelintir orang/lembaga yang menolak UU Anti Pornografi dan Pornoaksi (selanjutnya UU APP). Obyek digambarkan sebagai berjumlah sedikit (segelintir), konyol dan tidak masuk akal dan juga egois karena hanya memikirkan kepentingan pribadi, golongan, bisnis dan asing. Obyek digambarkan memiliki niat yang buruk karena berupaya menghancurkan generasi muda bangsa Indonesia. Di sisi yang lain, konsekuensi dari pendefinisian obyek yang seperti itu adalah pandangan bahwa bangsa Indonesia belum seluruhnya memiliki moral yang baik (karena ada 'keinginan bangsa ini untuk menata kehidupan moral masyarakat menjadi lebih baik') yang alat untuk mewujudkannya adalah UU APP. Dengan pendefinisian dan pemaknaan posisi obyek di bagian ini, HTI melakukan upaya menetapkan dua kubu biner; HTI dan UU APP di satu sisi dan segelintir orang (orang Indonesia) yang berpihak pada pihak asing untuk menghancurkan bangsanya sendiri. Penetapan dua kubu biner ini meletakkan pembaca pada posisi HTI. Kalimat 'di tengah-tengah keinginan bangsa *ini*' dan penggambaran obyek sebagai 'segelintir orang/lembaga' meletakkan pembaca di luar kubu obyek dan otomatis mensugesti pembaca untuk menafsirkan teks berdasarkan sudut pandang HTI.

Menyedihkan, di tengah-tengah keinginan bangsa ini untuk menata kehidupan moral masyarakat menjadi lebih baik dengan satu cara, yakni dengan mengeluarkan UU Anti Pornografi dan Pornoaksi (UU APP), masih ada segelintir orang/lembaga – yang menolaknya. Penolakan tersebut jelas terlihat ‘konyol’ dan ‘tidak masuk akal’. Bagaimana tidak? Upaya untuk menata kehidupan moral yang lebih baik ditolak hanya demi kepentingan pribadi, golongan, bisnis, dan juga kepentingan asing yang berupaya menghancurkan generasi muda kita.

### 5.1.3.b Persuasi

Dalam bagian Argumentasi Penolakan, bisa dilihat struktur penulisannya yang jelas mendukung pernyataan ini. Gagasan obyek (argumentasi penolakan UU APP dari obyek) ditempatkan lebih dahulu sebelum kemudian HTI memberikan argumentasi mengapa alasan penolakan dari obyek ini lemah.

UU APP, jika diberlakukan, akan membunuh kreativitas para seniman. Kreativitas jelas tidak boleh dilarang, namun perlu diarahkan, jangan sampai merusak tatanan kehidupan bermasyarakat. Lagipula, jika para seniman hanya bisa tumbuh kreativitasnya ketika karyanya mengeksploitasi seks dan sensualitas semata-mata, itu menunjukkan bahwa mereka tidak kreatif alias jumud.

Karena HTI dalam posisinya sebagai subyek pencerita dan juru warta kebenaran, maka argumentasi penolakan obyek hanya disebutkan sangat singkat. Ini dikarenakan tujuannya adalah memperlemah argumentasi penolakan tersebut. Seandainya argumentasi penolakan obyek dibuat panjang dan mendetil, maka ini akan mempengaruhi pemaknaan pembaca akan posisi obyek. Semakin mendetil argumentasi ini, maka pembaca akan mendapat lebih banyak informasi tentang bentuk obyek yang sebenarnya. Ini akan bisa memperlemah argumentasi HTI sendiri karena posisinya adalah juru warta kebenaran yang harus terwakili secara mendetil. Pembaca harus bisa mendapatkan gambaran yang sejelas-jelasnya tentang siapa HTI sebagai subyek dan gambaran yang hanya samar-samar tentang obyek untuk dapat masuk dan bersimpati pada posisi HTI. Ini cocok dengan pola seleksi pengetahuan di mana hanya pengetahuan yang akan mendukung legitimasi subyek yang dipilih untuk disajikan kepada pembaca.

UU APP akan memberangus kebudayaan. Untuk menjawab argumen ini tentu kita harus sepakat terlebih dahulu, kebudayaan seperti apa yang harus dipertahankan dan harus dilestarikan. Kebudayaan Jahilliyah atau rendah serta tidak sesuai dengan mertabat dan nilai-nilai yang digariskan Sang pencipta jelas tidak perlu dilestarikan. Kebudayaan yang mengumbar aurat atau mengeksploitasi perempuan demi memuaskan hasrat seksual laki-laki misalnya, jelas tidak perlu dilestarikan hanya karena alasan seni, menjaga tradisi leluhur, memelihara kearifan (baca: budaya) lokal, dan lain-lain. Bukankah lebih baik, misalnya, orang-orang Papua yang terbiasa memakai koteka mulai kita ajari berpakaian yang 'benar' dan lebih 'beradab', yakni dengan pakaian yang menutup aurat.

Tubuh manusia adalah keindahan yang merupakan anugerah dari Tuhan sehingga perlu disyukuri dan 'dinikmati'. Argumentasi ini jelas merupakan logika orang 'kurang iman'. Jelas, Allah SWT, sang Pencipta sekaligus pemilik tubuh manusia, telah melarang kita untuk menutup aurat kita rapat-rapat dimuka umum.

Kekhawatiran mayoritas menjadi tiran atas minoritas. Yang dimaksud mayoritas tentu Islam, sedangkan yang minoritas adalah non-Islam. Sebab, tatkala Islam diterapkan secara sempurna maka kebaikan dan kemsalhatan bukan hanya untuk keum Muslim semata, tetapi juga untuk seluruh umat manusia.

### 5.1.3.c. Legitimasi

Untuk melegitimasi posisinya, HTI kembali melakukan strategi penetapan adanya dua kubu biner – yaitu HTI, Islam, Indonesia dan pembaca melawan kubu orang-orang sekular yang kapitalis. Penggunaan istilah-istilah seperti 'ushul fikih yang mu'tabar' seperti menegaskan bahwa HTI adalah otoritas dalam bidang keagamaan Islam (yang biasanya diasosiasikan dengan dunia dan bahasa Arab) yang dengan demikian harus diikuti. Sebaliknya kubu kaum sekular kapitalis digambarkan sebagai pihak yang tidak peduli dengan nilai-nilai agama karena ideologi Kapitalisme hanya memikirkan keuntungan semata.

Akarnya adalah Sekularisme

Jika ditelaah lebih jauh, berbagai alasan para penolak RUU APP disebabkan oleh cara pandang mereka yang sekular, yakni cara pandang yang menihilkan agama. Karena itu pronografi adalah tindakan yang diharamkan berdasarkan kaidah ushul fikih yang mu'tabar (diakui). Karena itu, pornoaksi juga jelas diharamkan dalam Islam, karena mempertontonkan aurat di muka umum adalah haram.

Dalam pandangan orang-orang sekular, agama tidak boleh mengatur interaksi manusia ditengah-tengah masyarakat. Agama cukup hanya urusan pribadi. Cara pandang inilah yang akhirnya memunculkan sikap bebas-yang tidak mau terikat oleh ajaran-ajaran agama-baik dalam berbicara maupun dalam berperilaku.

Disamping itu, sekularisme merupakan akidah yang melandasi ideologi Kapitalisme. Kapitalisme sendiri telah menjadikan manfaat (utility) sebagai tolok ukur dalam kehidupan manusia. Tolok ukur inilah yang merasuk dalam dunia industri yang dibangun para kapitalis. Karena itu, selama industri pornografi dan pornoaksi mendatangkan manfaat dan keuntungan ekonomis, ia tidak boleh dilarang. Apalagi industri 'esek-esek' ini memang selalu mendatangkan keuntungan menggiurkan. Itulah yang ada dalam benak para kapitalis. Mereka tidak peduli dengan nilai-nilai moral maupun ajaran agama karena dianggap hanya akan merugikan mereka secara ekonomis.

Setelah melakukan proses legitimasi tersebut di atas, HTI selanjutnya mengimbau kaum Muslim (dalam hal ini berarti pembaca diposisikan sebagai kaum Muslim) untuk mengkritisi RUU APP. Dalam bagian ini HTI menggunakan 'nilai-nilai Islam' untuk melakukan imbauan. Yang menarik, dalam bagian ini tidak terdapat sitiran ayat-ayat Al Qur'an. Imbauan (pemosisian pembaca) dilakukan dengan jargon-jargon yang secara umum dikenal dan dipakai. Sepertinya dalam isu-isu politik kenegaraan seperti dalam penyikapan RUU APP ini yang dipakai HTI untuk melegitimasi posisinya adalah bentuk logika yang umum dikenal dan dipakai, terlebih lagi pada bagian sebelumnya telah dipaparkan secara sangat mendetil tentang kelemahan-kelemahan logika dari pihak penentang RUU APP.

Wahai Kaum Muslim:

Kita jangan terjebak pada aksi menolak atau menerima RUU APP semata. Namun, seharusnya kita lebih kritis lagi terhadap perjalanan perumusan dan pembuatan RUU APP ini. Sebab, dalam perjalanannya, RUU APP ini semakin lama semakin jauh menyimpang dari syariat Islam. Pada isi RUU APP tersebut telah terjadi kompromi-kompromi dan reduksi terhadap nilai-nilai Islam.

Walhasil, jika UU APP justru bertentangan dengan syariat Islam maka kita harus menolaknya, bukan malah mendukungnya. Artinya, yang penting dicermati di sini adalah isi UU APP itu sendiri, apakah sesuai dengan syariat Islam atau tidak.

#### **5.1.4 Edisi 298/ tahun XIII: Jangan Biarkan Pihak Asing Memecah Belah Negeri Kita**

##### **5.1.4.a. Pembukaan**

Diksi yang dipilih pada pembukaan artikel ini – yang mendefinisikan obyek sebagai ‘jelas melakukan campur tangan terhadap masalah dalam negeri...’ dan ‘berupaya masuk ke dalam masalah penglepasan Papua dari Indonesia’ merupakan upaya meletakkan obyek dalam posisi yang berseberangan dengan HTI – menciptakan dua kubu biner. Seperti juga dalam artikel-artikel sebelumnya, ini merupakan bagian di mana HTI menciptakan konsep ‘musuh Islam bersama’ untuk dikembangkan lebih jauh dalam bagian-bagian selanjutnya.

Tindakan pemerintah Australia ini jelas merupakan campur tangan terhadap masalah dalam negeri... Tindakan ini juga sekaligus menunjukkan bahwa Australia berupaya masuk ke dalam masalah penglepasan Papua dari Indonesia.

#### 5.1.4.b. Persuasi

Penampilan gagasan dan pendefinisian obyek dalam artikel ini (Australia) memiliki tujuan tertentu. Yang perlu diperhatikan di sini adalah pemosisian Australia sebagai bagian dari kubu negara-negara (internasional) yang berupaya menghancurkan Indonesia, dengan yang jelas tersebut di sini selain Australia adalah Amerika Serikat. Kembali kita menemui kasus yang sama. Dengan pemosisian ini maka akan terlihat bahwa HTI selaku juru warta kebenaran berusaha menciptakan penggambaran dua kubu biner yang saling berseberangan (binary opposition) antara pihak HTI (dan Indonesia) melawan pihak asing yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Kubu asing tersebut selalu dilukiskan dengan cara yang negatif – pemakaian kata-kata seperti ‘campur tangan’, ‘tidak menghiraukan’, ‘agen militer’ dan sebagainya – mengindikasikan hal ini. Pelukisan negatif pihak musuh ini secara otomatis meletakkan HTI pada posisi positif. Namun pada saat yang bersamaan, pendefinisian obyek yang seperti ini juga menunjukkan bahwa musuh tersebut dianggap sebagai musuh yang kuat dan harus diwaspadai. Ini mengingatkan pada strategi HTI pada artikel pertama (*Saatnya Khilafah memimpin dunia dengan Syaria*) Penampilan gagasan dan

pendefinisian obyek yang seperti itu diperlukan untuk membangun posisi pembaca yang dikehendaki oleh HTI.

Sebagai obyek Australia dipandang oleh HTI sebagai berikut:

1. Pihak yang selalu suka campur tangan dalam masalah dalam negeri Indonesia

Tindakan ini (pemberian suaka) juga sekaligus menunjukkan bahwa Australia berupaya masuk ke dalam masalah penglepasan Papua dari Indonesia.

2. Pihak yang bermuka dua dalam masalah Timor Timur –

Setelah pada awal-awalnya menyatakan dukungan atas keutuhan Indonesia, pada 8 Pebruari 1999 Australia secara tegas mengusulkan lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Selanjutnya Australia terlibat secara aktif, baik melalui opini maupun militer, dalam upaya melepaskan ‘Timor Timur’ dari Indonesia.

3. Australia adalah bagian dari kubu yang berusaha menghancurkan Indonesia dan secara aktif berupaya menggalang kekuatan internasional untuk melakukannya. Ini terbukti pada kegiatan-kegiatan misalnya penggalangan dukungan internasional dalam Kongres Papua untuk kemerdekaan Papua.

Kehadiran Sekretaris Kedubes Amerika serta utusan Australia, Inggris, dan negara asing lainnya dalam Kongres Papua pada tanggal 29 Mei hingga 4 Juni 2000 yang lalu. Kongres tersebut menggugat penyatuan Papua dalam NKRI yang dilakukan pemerintah Belanda, Indonesia, dan PBB pada masa Soekarno. Menurut Kongres tersebut, bangsa Papua telah berdaulat sebagai bangsa dan negara sejak 1 Desember 1961. Selanjutnya Kongres meminta dukungan internasional untuk memerdekakan Papua (Kompas, 5/6/2000).

4. Australia juga merupakan kekuatan pendukung kebijakan Amerika Serikat –

Australia mendukung seluruh kebijakan AS dalam kasus Papua. Misalnya, Australia memberikan dukungan atas pernyataan Kongres AS yang membuat Rancangan Undang Undang (RUU) 2601, yang memuat masalah Papua di Amerika pada bulan Juli 2005, dan akhirnya disetujui oleh Kongres AS. RUU tersebut menyebutkan adanya kewajiban Menteri Luar Negeri AS untuk melaporkan kepada Kongres tentang keefektifan otonomi khusus dan keabsahan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969.

5. Australia juga adalah sekutu utama Amerika Serikat di Asia Tenggara; disebut sebagai sheriff AS di Asia Tenggara. Di sini Australia dianggap sebagai pemimpin kawasan yang lebih unggul dibandingkan negara lain

Pembenaran posisi HTI dalam bagian ini sebagian besar didukung dengan sitiran ayat-ayat Al Qur'an. Dalam bagian ini pembaca akan tersugesti untuk melihat:

1. Indonesia sebagai negara Muslim yang terus menerus dirongrong gangguan kubu Australia (dan AS).
2. Indonesia sebagai negara Muslim harus dipertahankan dari upaya pecah belah yang dilakukan kubu Australia.
3. Tujuan akhir kaum Muslim adalah untuk meraih kejayaan dan tegaknya kembali Khilafah Islamiyah.
4. Negara-negara Islam harus lebur bersatu dalam satu wadah kekhilafahan sebagai bentuk negara Islam yang terbaik yang diwajibkan Allah SWT dan Muhammad SAW.
5. Sikap tunduk pada negara-negara asing (kubu Australia dan AS) adalah bukan jati diri umat Muslim.

Dengan sugesti demikian, pembaca akan bisa memposisikan dirinya sebagai bagian dari umat Muslim yang harus melakukan perlawanan pada kubu Australia (dan AS) dan bahwa HTI adalah pengemban amanat perlawanan kaum Muslim sedunia ini. Yang menarik di sini adalah bagaimana HTI menyikapi masalah kekhilafahan (seperti yang terjadi dalam artikel 294). Di sini disebutkan bahwa Khilafah Islamiyah adalah bentuk pemerintahan terbaik yang diwajibkan oleh Allah SWT dan Muhammad SAW – namun di sini tidak terdapat legitimasi dengan ayat-ayat Al Qur'an atau sunnah Nabi. Mengapa tidak terdapat legitimasi ayat Al Qur'an atau sunnah Nabi bisa dipertanyakan (mungkinah sebetulnya tidak ada ayat atau sunnah yang secara gamblang menyatakan bahwa sistem khilafah-lah yang terbaik) namun di sini terlihat sekali lagi terjadi pemilihan/manipulasi pengetahuan untuk menggiring opini pembaca.

### Islam Melarang Perpecahan

Perpecahan di antara negeri-negeri Islam adalah sebuah dosa besar dan sebuah keharaman yang nyata. Allah SWT dan RasullullahNya telah melarang tegas hal itu. Karena itu, upaya Australia untuk memanas-manasi sebagian wilayah Indonesia- yang merupakan salah satu negeri Muslim- untuk melepaskan diri tentu harus kita sikapi secara benar. Allah SWT berfirman:

*Berpegang teguhan pada tali (agama) Allah dan janganlah kalian bercerai berai. (QS al-Imran [3]:103).*

Dalam nash tersebut kita dilarang tegas untuk saling bercerai berai. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan tali ukhuwah kita dan menjaganya hingga titik darah penghabisan. Sebab, upaya asing memecah belah negeri-negeri Muslim, termasuk Indonesia, selain dimaksudkan untuk memepremah kaum Muslim dan negeri-negeri Islam, juga ditujukan untuk memperlambat upaya kaum Muslim untuk meraih kejayaannya kembali melalui tegaknya kembali Khilafah Islamiyah.

Wahai Kaum Muslim:

Selayaknya kita jangan mau didikte oleh pihak asing atau tunduk pada negara-negara kafir, seperti Australia dan AS. Sebab, sikap tunduk pada negara-negara asing yang sangat bertentangan dengan jati diri kaum Muslim sebagai umat yang terbaik. Allah SWT berfirman:

*Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia;melakukan amar makruf nuhi mungkar dan beriman kepada Allah. (QS Ali-Imran [3]:110).*

Selain itu, sudah saatnya kaum Muslim, khususnya di Indonesia, mandiri. Semakin kaum Muslim di Indonesia tunduk pada tekanan asing, niscaya semakin kokoh pula cengkraman itu diatas negeri ini. Tidak ada cara lain kecuali rakyat Indobesia bersatu dan menolak segala campur tangan asing serta jangan mudah diadu domba.

Wahai para penguasa:

Waspadailah setiap sikap dan tindakan Australia yang turut mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Negara-negara besar, termasuk Australia, pada hakikatnya telah memproklamirkan diri sebagai 'sheriff' AS di Asia Pasifik, yang akan senantiasa mengobok-obok Indonesia agar tidak menjadi negara muslim yang mandiri, kokoh, kuat, dan maju. Kasus terakhir (pemberian suaka pada aktivis pro-penglepasan Papua dari Indonesia) merupakan rangkaian panjang upaya Australia mencampuri dan mencabik-cabik bangsa ini. Untuk itu, sikap yang tegas terhadap Australia adalah memutuskan hubungan diplomatik dengannya dan hubungan yang lain. Janganlah pula kita tunduk pada kekuatan asing manapun. Ingatlah firman Allah SWT:

*Janganlah kalian tunduk kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kalian disentuh api neraka. Sekali-kali kalian tiada mempunyai seorangbg penolong pun selain Allah, kemudian kalian tidak akan diberi pertolongan. (QS. Hud [11]:113).*

Dengan memberikan banyak ayat-ayat Al Qur'an dan sunnah Rasul untuk memperkuat posisi HTI dalam beberapa hal yang tidak berhubungan langsung dengan konsep 'khilafah' HTI (misalnya dalam hal persatuan negara-negara Islam dan jati diri umat Islam) namun muncul dalam konteks pemaknaan yang sama diharapkan pembaca akan tersugesti bahwa sistem khilafah (seperti menjadi misi HTI) adalah memang sistem pemerintahan yang diwajibkan.

Wahai kaum muslim:

Kami menyerukan kepada seluruh kaum Muslim-baik pada para ulama, cendekiawan, para pemimpin ormas/parpol, para politisi, budayawan, para pengacara, para hartawan, para dosen maupun mahasiswa-agar waspada terhadap makar negara-negara asing yang ingin menggerogoti wilayah kita dengan menciptakan perpecahan di negara Muslim ini. Marilah kita bersatu menghadapi makar itu dan mari kita berjuang untuk menjaga kesatuan negeri ini agar tidak semakin terpecah-belah. Allh SWT mewajibkan kita untuk memepertahankan keutuhan wilyah negeri-negeri Islam, termasuk Indonesia, bahkan memerintahkan kita untuk menyatukan seluruh negeri-negeri Islam yang lainnya dalam naungan Daulah Khilafah Islamiyah.

Kita sadar, perpecahan hanya akan semakin memperlemah Islam dan umatnya yang mengakibatkan langgengnya kezaliman. Kelemahan itulah yang diinginkan oleh negara-negara penjajah kafir. Pihak penjajah seperti AS, baik langsung ataupun melalui negara-negara yang menjadi agennya, akan terus berupaya mengerat-erat negeri Muslim. Indonesia adalah salah satu negara yang kini tengah dipecah-pecah oleh mereka.

Agar kaum Muslim menjadi umat yang kuat dan negeri-negeri Muslim menjadi negeri yang kokoh, tidak ada cara lain selain harus ada upaya dari kita semua untuk terus menyatukan diri dalam satu kesatuan dan satu kekuatan. Semua itu tidak mungkin terjadi kecuali kita harus menyatukan diri dalam satu institusi negara, yakni Khilafah Islamiyah, yang telah diwajibkan atas kita, Muhammad SAW. Hanya dalam wadah Khilafahlah kaum Muslim sedunia tidak akan mudah dipecah-belah oleh kekuatan kafir manapun. Wallahu al'am bi as-shawab.

### **5.1.5 Edisi 299/Tahun XIII: Mengikuti dan meneladani Rasullullah SAW**

#### **5.1.5.a Pembukaan**

Dalam bagian awal artikel ini, obyek yang didefinisikan HTI sebenarnya tetap seperti dalam artikel-artikel sebelumnya yaitu pihak 'Barat'. Perbedaannya terletak pada susunan struktur wacana pendefinisian obyek ini. Dalam bagian pendahuluan ini HTI tetap berfungsi sebagai juru warta kebenaran/Subyek pencerita. Yang didefinisikan di sini

adalah ‘Rasullulah SAW.’ Di bagian ini Rasullulah SAW didefinisikan sebagai ‘suri tauladan, mencintainya, dan mengikutinya (*ittiba*)’. Tidak seperti dalam artikel-artikel sebelumnya di sini terlihat bahwa HTI tidak melakukan proses *othering* dalam pengertian penciptaan dua kubu biner – Rasullullah SAW adalah bagian dari HTI dan pembaca juga diposisikan sebagai pihak/orang (Islam) yang ada dalam posisi yang sama dengan HTI karena pembaca diharapkan akan mampu menafsirkan bahwa sudah menjadi keharusannya sebagai orang (Islam) untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW.

#### **Mengikuti Rasullulah SAW**

Hal terpenting saat mengingat Nabi Muhammad SAW adalah menjadikannya sebagai suri teladan, mencintainya, dan mengikutinya (*ittiba*). Keharusan mencontoh Rasullulah SAW bukan semata-mata didasarkan pada ketentuan dari nash-nash Al-Quran, melainkan juga fakta sejarah.

#### **5.1.5.b. Persuasi**

Sekali lagi secara umum strategi HTI dalam penyikapan isu ini agak berbeda dengan artikel-artikel sebelumnya. Dengan tidak adanya kubu biner yang diciptakan pada bagian sebelumnya, dalam bagian ini HTI lebih menekankan legitimasi posisinya. Penekanan legitimasi posisi ini dilakukan dengan strategi yang sama yaitu dengan mencantumkan sitiran ayat-ayat Al Qur’an. Legitimasi posisi HTI bersandar pada pendefinisian syariah sebagai hukum yang sangat baik (Syariat Islam diturunkan oleh Zat Yang Mahatahu tentang seluruh manusia dengan segala aspek kemanusiaannya) dan hubungannya dengan kewajiban orang (Islam) untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, dan sisi positif mengikuti Rasul (karena sesuai dengan fitrah manusia).

Berkaitan dengan mengikuti Rasul ini ada tiga prinsip yang penting dicamkan:

##### Pertama:

Makna *ittiba*’ (mengikuti Rasul) adalah mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasullulah SAW. Allah SWT berfirman:

*Apa saja yang dibawa Rasul kepada kalian, terimalah; apa saja yang dilarangnya atas kalian, tinggalkanlah; dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya (QS al Husyr [59]:7).*

**Kedua:**

Syariat Islam diturunkan oleh Zat Yang Mahatahu tentang seluruh manusia dengan segala aspek kemanusiaannya. Perbedaan suku, bangsa, bahasa, tempat dan waktu hidup bukanlah pembatas ataupun penghalang bagi penerapan syariat Islam.

**Ketiga:**

Mengikuti Rasulullah SAW adalah sesuai dengan fitrah manusia. Betapa tidak, Islam yang dibawanya sesuai dengan fitrah manusia. Setiap ajaran manusia berupa akidah, ibadah, muamalah dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya pasti sesuai dengan fitrah manusia. Allah SWT berfirman:

*Katakanlah, "Jika kalian (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS Ali Imran [3]:31)*

Selanjutnya dalam bagian ini ditunjukkan beberapa karakter Rasulullah SAW.

Dalam bagian ini strategi wacana HTI mulai berubah dengan mulai masuknya konsep penciptaan dua kubu biner – seperti terlihat dalam ‘keras terhadap kekufuran dan lembut terhadap sesama Muslim’ dan ‘berkata benar dan tegas dalam berdialog dengan kaum kafir.’ Dengan pembangunan posisi pembaca sejak awal bahwa HTI dan pembaca berada dalam posisi yang sama, pernyataan ini menggiring pembaca untuk menafsirkan bahwa pada kenyataannya terdapat kubu yang berlawanan dengan mereka – kubu kaum kafir yang kufur yang harus dilawan secara benar, yaitu keras dan tegas.

**Beberapa Karakter Rasulullah SAW.**

Di antara karakter Rasulullah SAW adalah:

1. Senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT.
2. Teguh dalam kebenaran
3. Pengayom rakyat
4. Keras terhadap kekufuran dan lembut terhadap sesama Muslim
5. Berkata benar dan tegas dalam berdialog dengan kaum kafir.

**5.1.5.c. Legitimasi sikap**

Dalam bagian ini secara jelas terlihat adanya penciptaan dua kubu biner. Pendefinisian ‘dua peradaban besar, yakni peradaban besar Islam dan Barat’ merujuk pada definisi selanjutnya tentang peradaban Barat yaitu bahwa peradaban Barat sejak jaman Rasulullah SAW telah berada pada posisi yang berseberangan dengan umat Islam sehingga

tidak perlu adanya upaya dialog mencari persamaan karena hanya akan merupakan upaya yang sia-sia. Dihubungkan dengan beberapa karakter Rasulullah SAW yang disebutkan di atas, diharapkan di sini pembaca untuk tersugesti bahwa peradaban barat adalah sama dengan kaum kafir karena Rasulullah SAW selalu bersikap tegas dalam berdialog dengan kaum kafir. Penggunaan kata 'dialog' dalam dua konteks kalimat ini diharapkan mampu membuat pembaca menafsirkan bahwa dialog dengan peradaban Barat adalah sama dengan dialog dengan orang kafir. Selanjutnya kata-kata 'peradaban Barat' berubah menjadi 'Barat' saja – 'agenda Barat' yang berkonotasi negatif karena 'disembunyikan, berlindung di balik slogan 'dialog antarperadaban.'" Ini lebih memperkuat lagi konsep bahwa kaum kafir yang kufur dan licik (karena tersembunyi dan berlindung di balik sesuatu) adalah pihak kubu Barat. Dengan pihak yang semacam ini pembaca diharapkan akan mampu menafsirkan bahwa pihak Barat tidak bisa diajak berdialog. Dengan pemosisian pembaca yang semacam ini ditambah dengan strategi wacana sejak awalnya yang merujuk pada pentingnya mengikuti tauladan Nabi Muhammad SAW, pembaca diyakinkan bahwa dialog yang mungkin dilakukan adalah 'dialog yang bisa menundukkan mana yang haq dan mana yang batil.' Ini sesuai dengan karakter Rasulullah SAW yang dicantumkan sebelumnya.

Yang juga menarik untuk dicermati dalam bagian ini adalah kecenderungan HTI untuk menggunakan istilah Arab dalam mendukung argumentasinya (misalnya *haq*, *batil*, *ash-shira al-fikri*). Hal ini mungkin disebabkan faktor pemosisian pembaca – dengan kode budaya yang dipahami sebagian besar orang Islam bahwa Islam berasosiasi dengan Arab dan bahasa Arab, dan bahwa orang-orang yang merupakan otoritas dalam ilmu keagamaan Islam harusnya bisa berbahasa Arab atau pernah belajar di Arab, diharapkan bahwa pembaca akan terpersuasi untuk berpikir bahwa konsep HTI ini sangat 'legitimate' karena didukung dengan konsep dari Arab/bahasa Arab dan bahwa HTI merupakan otoritas Islam karena memiliki kemampuan ini.

Pada saat ini terdapat dua peradaban besar, yakni peradaban besar Islam dan Barat. Merujuk pada contoh Rasulullah SAW maka yang harus dilakukan bukanlah dialog mencari persamaan. Hal itu hanya akan merupakan pemanis bibir saja, tetapi sekam tetap membara. Belum lagi ketika ada agenda Barat yang disembunyikan, berlindung di balik slogan 'dialog antarperadaban'. Yang harus dilakukan adalah dialog yang dapat menundukkan mana yang *haq* dan mana yang batil. Dialog seperti ini lebih merupakan pertarungan pemikiran (*ush-shira al-fikri*).

## 5.2. Posisi Ideologis Hizbut Tahrir Indonesia pada Representasi Subjek dan Objek dalam Buletin Dakwah Al Islam Konteks Analisis Wacana Kritis (CDA)

Dalam penelitian CDA salah satu konsep pentingnya adalah pada aspek ideologi yang ada pada teks karena teks adalah bentuk dari ideologi atau pencerminan dari ideologi tertentu. Teori-teori klasik tentang ideologi di antaranya mengatakan bahwa ideologi dibangun oleh kelompok yang dominan dengan tujuan untuk mereproduksi dan melegitimasi dominasi mereka. Salah satu strategi utamanya adalah dengan membuat kesadaran kepada khalayak bahwa dominasi itu diterima secara *taken for granted*. Wacana dalam pendekatan semacam ini dipandang sebagai medium bagi kelompok dominan untuk mempersuasi dan mengkomunikasikan kepada khalayak produksi kekuasaan dan dominasi yang mereka miliki sehingga tampak absah dan benar. "*Discourse in this approach essentially serve as the medium by which ideologies are persuasively communicated in society, and there by helps reproduce power and domination of spesific groups or classes.*" (Van Dijk, 25 dalam Eriyanto, 13). Asumsinya adalah ideologi dari kelompok dominan hanya efektif jika didasarkan pada kenyataan bahwa anggota komunitas termasuk yang didominasi menganggap hal tersebut sebagai kebenaran dan kewajiban.

Bagaimanakah hal tersebut dikaitkan dengan konsep wacana? Van Dijk menjelaskan bahwa ideologi dimaksudkan untuk mengatur masalah tindakan dan praktek individu atau anggota suatu kelompok. Ideologi membuat anggota dari suatu kelompok akan bertindak dalam situasi yang sama, dapat menghubungkan masalah mereka, dan

memberikan kontribusi dalam membentuk solidaritas dan kohesi di dalam kelompok. Dalam perspektif ini, ideologi mempunyai beberapa implikasi penting.

Pertama, ideologi secara inheren bersifat sosial, tidak personal, atau individual: ia membutuhkan *share* dibagikan di antara anggota kelompok, organisasi atau kolektivitas dengan orang lainnya. Hal yang sama-sama dirasakan/dibagikan tersebut bagi anggota kelompok digunakan untuk membentuk solidaritas dan kesatuan langkah dalam bertindak dan bersikap. Kedua, ideologi meski bersifat sosial, ia digunakan secara internal di antara anggota kelompok atau komunitas. Oleh karena itu, ideologi tidak hanya menyediakan fungsi koordinatif dan kohesi tetapi juga membentuk identitas diri kelompok, membedakan diri dengan kelompok lain. Ideologi di sini bersifat umum, abstrak, dan nilai-nilai yang terbagi antaranggota kelompok menyediakan dasar bagaimana masalah harus dilihat. Dengan pandangan semacam ini, wacana lalu tidak dipahami sebagai sesuatu yang netral dan berlangsung secara alamiah. Karena dalam setiap wacana selalu terkandung ideologi untuk mendominasi dan berebut pengaruh. Oleh karena itu analisis wacana tidak bisa menempatkan bahasa secara tertutup melainkan harus selalu melihat pada konteks terutama pada bagaimana ideologi dari kelompok-kelompok yang ada tersebut berperan dalam membentuk wacana. Lebih jauh, dalam perspektif CDA, pengertian wacana sendiri banyak dipengaruhi oleh pemikiran Foucault dan Althusser. Sumbangan terbesar Foucault adalah mengenalkan wacana sebagai praktek sosial yang berperan untuk mengontrol, menormalkan, dan mendisiplinkan individu. Sementara dalam konsepsi Althusser, wacana berperan dalam mendefinisikan individu dan memposisikan seseorang dalam posisi tertentu dalam rangkaian hubungan dengan kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. Pemikiran dari Mazhab Frankfurt terutama berperan besar dalam membentuk pola pikir dan pandangan bagaimana media dan teks berita seharusnya dilihat. (Eriyanto, 19)

Pemikiran awal tentang ideologi seperti disebutkan di atas menjadi titik mula pembongkaran ideologi buletin AL Islam karena adanya kemiripan dengan konsep ideologi yang telah disebutkan di atas. Untuk membuktikan pengertian bahwa ideologi dibangun oleh kelompok yang dominan dengan tujuan untuk mereproduksi dan melegitimasi dominasi mereka, pertama-pertama harus dilihat siapakah yang memproduksi teks AL Islam. Sebagai produsen teks maka tentu saja kepentingan dari produsen teks harus tercermin dari isi teks secara keseluruhan karena teks adalah representasi ideologi dari si produsen teks yaitu Hizbut Tahrir. Bagaimanakah membuat tujuan ideologis ini tersampaikan secara maksimal, menciptakan 'kesadaran' kepada khalayak (pembaca) secara alamiah atau wajar? Dengan menggunakan wacana atau pengetahuan tertentu yang telah 'sengaja dipilih' atau 'diseleksi' sebagai suatu strategi sesuai dengan tujuan ideologis yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini analisis konstruksi wacana memperlihatkan adanya benang merah yang menghubungkan setiap edisi yang terbit. Analisis menunjukkan adanya seleksi pengetahuan pada masing-masing bagian yaitu Pembukaan, Persuasi, dan Legitimasi Sikap. Pada bagian Pembukaan, misalnya, seleksi wacana diperlihatkan melalui pemilihan data yang cenderung sudah memperlihatkan 'kecondongan' media terhadap suatu tujuan tertentu. Hal tersebut diperlihatkan dengan cara hanya menunjukkan sejumlah data yang mendukung premis yang tengah dibangun dan mengeliminasi data lainnya yang dianggap kurang menguntungkan. Contohnya terlihat, antara lain, pada edisi Edisi 293: 'Penjajahan Asing Lewat Undang-Undang' dimana data yang bersifat pro terhadap kehadiran ahli-ahli hukum Amerika Serikat hanya didapat dari pernyataan ketua DPR RI (yang dianggap simbol representasi anggota DPR RI keseluruhan). Selanjutnya seluruh keterangan yang bersifat dominan dan bersifat kontra berasal dari dewan redaksi AL Islam sendiri. Dengan demikian, pendapat dari ketua DPR menjadi berkesan illegitimate, tidak populer, dan

hanya berfungsi untuk dikomentari saja karena bertentangan dengan ‘nalar umum’ yang telah (sebenarnya) dikonstruksikan oleh pihak dewan redaktur Al Islam. Pada bagian Persuasi kecondongan tersebut makin diperkuat dengan cara mempersuasi dan mengkomunikasikan kepada pembaca bahwa data yang ditampilkan oleh pihak Al Islam adalah sebuah kebenaran yang sama sekali tidak bisa disangkal. Sebagai contoh pada edisi Edisi 294: ‘Saatnya Khilafah Memimpin Dunia dengan Syariah’ terlihat bagaimana seleksi data dilakukan untuk mengkonstruksi kebenaran dalam perspektif organisasi dengan cara menunjukkan kegagalan negara-negara Barat pengemban ideologi kapitalis dalam membangun dunia pasca keruntuhan Khilafah. Kegagalan-kegagalan tersebut dikategorikan sebagai kegagalan di bidang ekonomi, sosial, dan keamanan. Sebagai pembandingnya ditunjukkanlah kebesaran masa lalu Khilafah Islamiyah dalam memimpin dunia. Seleksi data pada bagian persuasi ini juga makin memperlihatkan bagaimana wacana bukanlah sesuatu yang bersifat netral karena di dalamnya sudah mengandung ideologi organisasi Hizbut Tahrir. Pada bagian Legitimasi Sikap yang menjadi klimaks dari media Al Islam bentuk yang paling menonjol adalah pada bagaimana teks-teks skriptural (ayat-ayat suci Al-Qur’an) dipakai untuk melegitimasi segala sikap atau tindakan Hizbut Tahrir dalam menyikapi sebuah persoalan. Segala persoalan duniawi dikembalikan kepada teks (suci). Yang menarik adalah bagaimana proses pemilihan teks skriptural ini selalu menjustifikasi kewajiban melawan musuh, baik secara defensif maupun ofensif. Ayat-ayat Al Qur’an dikutip di banyak tempat untuk melegitimasi sikap-sikap perlawanan ataupun pelabelan secara negatif terhadap kelompok atau negara yang dianggap sebagai musuh. Tidak ditemukan sama sekali kutipan-kutipan ayat (misalnya) tentang toleransi, kerjasama dalam memberantas kemiskinan, persoalan-persoalan kemanusiaan, dsb dalam konteks hubungan kerjasama dengan pihak ‘liyan’ yang dicantumkan. Yang berlaku kemudian adalah suatu adagium “kami yang benar, mereka yang salah”. Di sini ‘ancaman yang

dibayangkan' tidaklah dianggap sebagai pertempuran politik biasa, melainkan sebuah pertarungan kosmis yang diridhoi Tuhan bahkan disuruh atau menjadi perintah Tuhan. Sebuah pertarungan antara yang baik melawan yang jahat, yang benar melawan yang salah, yang diberkati dengan yang dikutuk Tuhan.

Sebuah kondisi yang kemudian sering dimaknai sebagai kebangkitan fundamentalisme agama (Islam). Terdapat beberapa definisi Fundamentalisme yang bisa menjelaskan fenomena ini. Dari *Oxford English Dictionary* fundamentalisme adalah 'bentuk kepatuhan keras kepada ajaran ortodoks yang menjadi dasar kepercayaan agama, penentangan terhadap liberalisme (sekularisme) dan modernisme serta mengajak kembali kepada ajaran yang pokok, asli, murni, suci karena dijaga kebenarannya.' Armstrong menjelaskan istilah fundamentalisme sebagai 'kritik atau perlawanan terhadap modernitas. Tetapi, zaman fundamentalisme adalah zaman sejarah yang memuja bentuk dan penampakan (literalis) ketimbang kedalaman (substansialis), merayakan kesucian peperangan daripada kerjasama, kekhusukan ketimbang permainan dan kenikmatan, serta mengejar keintiman iman ketimbang kemanfaatan-pemerintahan. Tak heran bila dalam masyarakat yang dihidupi budaya fundamentalisme, masyarakat beragama menumbuhkan simbol-simbol dan aktivitas kebudayaan yang (di)barukan/ reproduksi dari zaman keemasan. Nasyid, pakaian adat arab (jilbab), ibrah, harakah, adalah sederet ikon gaya hidup dan kosakata baru budaya fundamentalisme.' Pengertian lain yang bisa menjelaskan adalah Fundamentalisme Islam dimaknai sebagai perilaku keagamaan berdasarkan *normative approach* (penghayatan normatif) yang skriptural (berdasar teks semata) tanpa melihat persoalan-persoalan substansif lainnya (mis: sejarah, peradaban, iptek). Perilaku Politik berbasis ideologi-ideologi Barat dinilai gagal oleh kelompok ini. Mereka kemudian menawarkan alternatif *normative approach* ini yang kemudian melahirkan *sibling rivalry* yaitu permusuhan antar saudara kandung (maksudnya *Abrahamic*

*religions*—Yahudi, Kristen, dan Islam) dengan mengedepankan sikap *truth claim*, merasa paling benar dengan menyalahkan—menyesatkan agama dan pemeluk lainnya (Haryono, viii). Beberapa definisi terminologi tentang fundamentalisme ini ternyata memang banyak sekali ditemukan jejaknya dalam buletin Al Islam. Dengan kata lain, fundamentalisme menjadi sebuah makna ideologis yang dapat disingkap dari model konstruksi wacana Hizbut Tahrir.

Dalam konteks ideologi yang berfungsi untuk mengatur masalah tindakan dan praktek individu atau anggota suatu kelompok maka gerakan kembali kepada teks sebagaimana terlihat pada bagian Legitimasi Sikap di atas akan melahirkan masyarakat teks yaitu suatu masyarakat yang lahir, hidup, berjuang, dan mati demi teks. (Zaid, dalam Haryono 27). Pada anggota masyarakat teks ini kemudian akan terlihat empat ciri utama yaitu: menghadirkan perlawanan pada orang lain, menghadirkan Tuhan, menghadirkan teks, dan menerima surga sebagai imbalan. Kohesifitas yang terbentuk dalam anggota kelompok ini akan membentuk identitas diri kelompok yang nantinya akan bersifat membedakan dirinya dengan kelompok lain yang pada gilirannya dalam tataran yang paling ekstrim akan mengantar pada sikap yang eksklusif dan tidak bersedia menerima perbedaan-perbedaan.

Dalam perkembangan selanjutnya CDA berkembang dalam banyak perspektif dan salah satunya adalah CDA aliran Perancis yang diaplikasikan konsepnya dalam penelitian ini. CDA aliran Perancis, terutama pada konsep pengembangan ideologinya, sangat dipengaruhi oleh pemikiran Althusser. Ideologi atau level suprastruktur dalam konsep Althusser adalah dialektika yang dikarakteristikan dengan kekuasaan yang tidak seimbang atau bersifat dominasi. Althusser mendefinisikan konsep ideologi sebagai praktek ketimbang ide atau gagasan. (Cahyadi, 55-56). Althusser mengatakan ada dua dimensi hakiki negara /kekuasaan yaitu yang bersifat represif (*Repressive State Apparatus/ RSA*)

dan yang bersifat Ideologi (*Ideological State Apparatus/ ISA*). Kedua dimensi ini erat dengan eksistensi negara sebagai alat perjuangan kelas. Yang satu masuk dengan jalan memaksa, sedangkan yang lain dengan cara mempengaruhi. Meskipun berbeda, kedua perangkat tersebut mempunyai fungsi yang sama, yakni melanggengkan penindasan yang tampak dalam relasi produksi masyarakat.

Dalam pembongkaran posisi ideologis Hizbut Tahrir melalui buletin Al Islam maka konsep Althusser yang akan diaplikasikan adalah yang berada pada tataran ISA. Hal ini berangkat dari asumsi tentang adanya kemiripan cara beroperasi pada representasi subjek dan objek yang bersifat dominasi ideologi dan bukan represi dalam buletin Dakwah AL Islam. Sifat buletin yang berupa media yang bersifat memberikan informasi kepada khalayak pembacanya juga dapat memberikan suatu kerangka legitimasi atau dasar pembenar bagi setiap tindakan politik HT dalam menyikapi suatu peristiwa.

Hal penting dalam teori ideologi Althusser adalah konsepnya mengenai subjek dan ideologi. Ideologi dalam pengertian ini selalu memerlukan subjek dan subjek selalu memerlukan ideologi. Ideologi adalah hasil rumusan dari individu-individu tertentu. Keberlakuannya tidak hanya menuntut kelompok yang bersangkutan akan tetapi sekaligus juga menciptakan subjek. Usaha ini disebut sebagai interpelasi. Dalam interpelasi ini, individu konkret direkrut menjadi subjek ideologi. Althusser berpandangan bahwa kehidupan manusia sebagai subjek identik dengan subjek bagi struktur, di mana struktur tadi bukan ciptaanya melainkan ciptaan kelompok atau kelas tertentu. Karena struktur tadi diciptakan untuk dan identik dengan kepentingan kelompok penciptanya, individu di sini dikatakan sebagai subjek bagi struktur tertentu. Kendati seringkali merasakan diri sebagai subjek yang bebas, kebebasan atau kesadarannya hanyalah hasil dari interpelasi dan diciptakan oleh struktur atau, dengan kata lain, ideologi atau perangkatnya hanyalah suatu

alat untuk menciptakan manusia sebagai subjek bagi sebuah kepentingan kekuasaan. (Cahyadi, 62-63)

Konsep interpelasi adalah konsep yang penting dalam dunia komunikasi. Semua tindakan komunikasi pada dasarnya menyapa seseorang, dan dalam penyapaan/ penyebutan itu selalu terkandung usaha menempatkan seseorang dalam posisi dan hubungan sosial tertentu. Dalam penyapaan dan penyebutan itu dan dalam menanggapi komunikasi terjadi partisipasi yang secara ideologis bersifat konstruksi. Semua tindakan komunikasi selalu merupakan bentuk proses interpelasi yang menempatkan individu sebagai subjek tertentu. (Fiske, 175-176). Sebagai contoh, ketika seseorang berbicara dengan seorang perempuan, maka pembicaraan akan menempatkan perempuan tersebut dalam subjek gender. Demikian juga contoh lainnya seperti percakapan yang terjadi antara guru dan murid, maka yang terjadi adalah adanya partisipasi di antara murid dan guru tersebut dimana keduanya akan menyadari pada posisi dan hubungan sosial yang bagaimanakah yang memungkinkan komunikasi tersebut tetap bisa berlangsung. Interpelasi ini tidak hanya terjadi dalam pembicaraan interpersonal, tetapi juga dapat terjadi dalam isi media. Media juga mengandung interpelasi dimana posisi sosial atau hubungan sosial tentang posisi seseorang ditentukan. Tolson mengatakan "*Media text always address somebody, that is to say, they invite the reader viewer to participate, and seek to engage her or him in specific practise of reading and viewing.*" (53). Hal tersebut terjadi karena teks media pada dasarnya ditujukan untuk berkomunikasi dengan khalayak. Dalam hal ini interpelasi berhubungan dengan identifikasi, bagaimana dan dengan siapa seseorang mengidentifikasi dirinya dalam teks yang disediakan (Tolson, 56). Bagian yang penting di sini adalah interpelasi yang menunjukkan posisi ideologis yang diambil ketika membaca suatu teks media. Fiske mengatakan bahwa berita dan proses komunikasi secara keseluruhan pada dasarnya adalah praktek dari proses sosial dan hampir selalu bersifat

ideologis dan dalam hal ini interpelasi adalah bagian penting dari praktek ideologi tersebut. Dalam konteks masyarakat teks yang tercipta dari 'seruan' untuk mengembalikan segala sesuatu kepada teks skriptural sebagaimana telah dijelaskan di atas jelas terlihat bagaimana interpelasi mengambil bentuknya.

Terdapat dua konsekuensi dari proses penyapaan dan komunikasi ini. Pertama, bagaimana media menempatkan pembacanya dalam posisi tertentu. Kedua, bagaimana khalayak menempatkan dirinya dalam kisah ataupun berita yang dibawakan oleh media. Posisi apa yang diambil dan bagaimana seseorang ditempatkan dan disubjekkan menggambarkan bagaimana ideologi itu berlangsung. Mills mengatakan bahwa dalam suatu teks posisi pembaca amatlah penting dan harus diperhitungkan dalam teks. Dalam hal ini Mills berpandangan bahwa teks adalah suatu hasil negosiasi antara penulis dan pembaca. Oleh karena itu pembaca tidaklah dianggap semata sebagai pihak yang menerima teks, tetapi juga ikut melakukan transaksi sebagaimana terlihat dalam teks. Bagi Mills, membangun suatu model yang menghubungkan antara teks dan penulis di satu sisi dengan teks dan pembaca di sisi lain mempunyai sejumlah kelebihan. Pertama, model semacam ini akan secara komprehensif melihat teks bukan hanya berhubungan dengan faktor produksi tetapi juga resepsi. Kedua, posisi pembaca di sini ditempatkan dalam posisi yang penting. Hal ini karena teks memang ditujukan untuk secara langsung atau tidak "berkomunikasi" dengan khalayak. Teks mempunyai ragam sapaan dengan khalayak. Pemakaian kata ganti saya, anda, kami, atau kita dalam teks media, misalnya, jelas menempatkan pembaca menjadi bagian integral dalam keseluruhan teks. Bagian yang integral ini bukan hanya khalayak diperhitungkan keberadaannya, tetapi juga dalam penulisan suatu teks media penulis secara tidak langsung memperhitungkan keberadaan pembaca. Kehadiran yang diperhitungkan itu bisa untuk menarik dukungan, menekankan, atau untuk menarik simpati

dari pembaca, atau meyakinkan. Di sini terjadi negosiasi antara penulis dengan pembacanya (Mills, 183-84).

Kalau konsepsi ini hendak diterjemahkan dalam suatu teks, maka analoginya adalah teks tersebut bukanlah semata hasil produksi dari awak media, dan pembaca tidaklah semata ditempatkan sebagai sasaran, karena teks media adalah hasil negosiasi antara penulis dengan khalayak pembacanya. Oleh karena itu, dalam mempelajari konteks tidak cukup hanya konteks dari sisi penulis saja tetapi perlu juga mempelajari konteks dari sisi pembaca. Ilustrasinya adalah sebagai berikut:

Konteks Penulis ..... Teks ..... Konteks Pembaca

Gambar: Model konteks dalam analisis wacana

Ilustrasi di atas menunjukkan secara jelas proses interpelasi yang berlangsung dalam konteks hubungan antara penulis, teks, dan pembaca. Dalam hal ini individu ditempatkan sebagai subjek yang 'disadarkan' tentang posisinya dalam masyarakat. Individu menjadi subjek dari dua dunia: Subjek sebagai individu dan subjek dari kekuasaan. Contoh tersebut terlihat polanya dalam model analisis buletin Dakwah AL Islam dimana seorang individu 'disadarkan' akan posisinya melalui bagian legitimasi sikap yang menyertakan ayat-ayat suci AL-Qur'an. Kepatuhan diasumsikan akan terjadi karena individu akan menerima dan mengakui posisinya bukan hanya sebagai individu tetapi juga dalam hubungan relasi kekuasaan antara yang sakral (Allah SWT, Nabi Muhammad, AL-Qur'an, hadits, dll) dengan yang profan (manusia yang penuh dosa, tanpa pengetahuan). HT menggunakan kuasa yang bersifat sakral sebagai alat legitimasi serta mempunyai kekuasaan dominan untuk menentukan salah tidaknya tindakan individu pembacanya

sekaligus untuk membangun klaim 'pendosa' bagi kelompok yang dianggap musuhnya (AS, Barat).

Berhubungan dengan model interpelasi ini, Mills sendiri mengakui bahwa model ini terlalu simplifistik dalam menjelaskan bagaimana suatu peristiwa interpelasi bekerja karena konstruksi subjek sebetulnya berjalan melalui proses yang kompleks. Bagi Mills, penyapaan/ penyebutan itu umumnya bukan langsung (*direct address*) tetapi melalui penyapaan/ penyapaan tidak langsung (*indirect address*) dimana pembaca disapa atau ditempatkan secara tidak langsung.

Menurut Mills penyapaan tidak langsung ini bekerja melalui dua cara: Pertama, mediasi. Suatu teks umumnya membawa tingkatan wacana, dimana posisi kebenaran ditempatkan secara hirarkis sehingga pembaca akan mensejajarkan atau mengidentifikasi dirinya sendiri dengan karakter atau apa yang tersaji dalam teks. Klaim ini pun terlihat dalam buletin Dakwah Al Islam. Dalam semua artikel buletin Dakwah Al Islam pembaca selalu mengalami proses mediasi – tersugesti/mengidentifikasi dirinya dengan karakter yang tersaji dalam teks (dalam hal ini penulis buletin Dakwah Al Islam/HT). Proses persugestian/pengidentifikasian pembaca terjadi dengan beragam cara dan strategi (misalnya diksi, penggunaan ayat-ayat Al Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, struktur wacana dalam bagian-bagian buletin) namun semuanya bertujuan membuat pembaca mengidentifikasi diri/bersimpati dengan HTI dan misinya untuk menegakkan Daulah Khilafah Islamiyah. Distorsi, seleksi dan manipulasi pengetahuan memegang peranan sangat penting dalam proses mediasi ini.

Kedua, kode budaya. Istilah yang diperkenalkan oleh Roland Barthes ini mengacu kepada kode atau nilai budaya yang dipakai oleh pembaca ketika menafsiran suatu teks. Barthes, seperti dikutip Mills, menunjukkan bahwa kode budaya ini dapat ditemukan, misalnya, dengan pernyataan: "seperti kita tahu bersama" atau "kenyataannya"—

mensugestikan sejumlah informasi yang dipercaya dan diakui secara bersama, dianggap sebagai kebenaran bersama. Kode budaya ini membantu pembaca menempatkan dirinya terutama dengan orientasi nilai yang disetujui dan dianggap benar oleh pembaca. Dalam buletin Dakwah Al Islam, kode budaya yang dipakai pembaca untuk menafsirkan teks beragam namun terutama adalah kode budaya yang menempatkan penafsirnya dalam posisi bersimpati dan mengidentifikasi diri dengan HTI – dalam hal ini kode budaya Islam dan segala atribut keislaman (sejarah, ayat-ayat Al Qur'an, sunnah Rasul, bahasa Arab dst.)

Di sini bisa disimpulkan bahwa dalam penggunaan proses mediasi dan kode budaya, buletin Dakwah Al Islam menggunakan keduanya secara saling berkaitan untuk mencapai tujuannya – yang dalam konteks lebih besar bisa dikembalikan kepada konsep fundamentalisme.

Uraian di atas, yaitu ciri yang terlihat pada buletin Al Islam ataupun pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir menunjukkan adanya ciri gerakan fundamentalisme agama yang amat kental. Hal ini pertama, ditandai dengan ideologi gerakan yang direfleksikan dengan jihad. Seruan jihad kerap kali dikeluarkan untuk memperjuangkan dan membela agama. Jihad menjadi kata kunci bagi gerakan Islam fundamentalis untuk tetap eksis pada komunitas di luarnya. Ideologi Jihad memerankan fungsi yang amat penting untuk menggugah militansi dan radikalisasi umat. Kedua, orientasi utama perjuangan kelompok Islam fundamentalis diwujudkan dalam konteks pemberlakuan syariat Islam yang dianggap mereka sebagai solusi alternatif terhadap krisis bangsa. Syariat Islam adalah tujuan dari semua gerakan yang mereka lakukan. (Afkar, 1)

## BAB VI

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1. Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka terdapat beberapa simpulan yang bisa diambil:

1. Ideologi menjadi bagian yang sentral bahkan bagian terpenting dari analisis.
2. Kekuasaan menjadi bagian yang sentral dalam analisis. Dalam konteks kekuasaan ini wacana dapat dipakai untuk memperbesar pengaruh kekuasaan.
3. Wacana dapat dimanipulasi oleh kelompok dominan untuk memperbesar kekuasaannya. Wacana tidak hanya memproduksi dan mereproduksi kekuasaan kelompok atau kelas tertentu dalam masyarakat, ia juga sarana untuk merendahkan dan memarjinalkan kelompok lain.
4. Unit bahasa dipakai sebagai alat untuk mendeteksi ideologi dalam teks. Artinya bahasa menjadi alat utama untuk melihat ideologi. Analisis terutama ditunjukkan untuk menunjukkan representasi bagaimana seseorang, kelompok, kegiatan, atau tindakan tertentu ditampilkan. Proses representasi dalam teks ini ini selalu diiringi dengan ketidakadilan atau upaya untuk memburukkan kelompok lain.

Contoh dalam menafsirkan buletin AL Islam memperlihatkan bagaimana Redaksi buletin tersebut menempatkan dirinya sebagai *self* atau *us* yang mempunyai otoritas untuk menafsirkan pihak lain (*other*) atau *them* yang berseberangan ideologi atau kepentingannya. Kelompok liyan ini dilabeli dengan berbagai label seperti musuh Islam, kelompok Barat, kelompok Kafir, kelompok sekular. Sementara Redaksi menempatkan dirinya dalam posisi subjek yang lebih tinggi dengan menyebut diri sebagai *agent/ subjek* yang bermaksud membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan yang amat parah,

membebaskan umat dari ide-ide, sistem perundang-undangan, dan hukum-hukum kufur, serta membebaskan mereka dari cengkeraman dominasi dan pengaruh negara-negara kafir. Untuk menejahwontahkan posisi ini maka suatu *Daulah Khilafah Islamiyah* di muka bumi harus dibangun kembali. Dalam konteks ini, Islam sebagai agama dibekukan menjadi suatu ideologi yang tertutup, bertafsir tunggal, dan menafikan adanya perbedaan penafsiran di antara pemeluknya dalam memaknai berbagai peristiwa ataupun dalam menginterpretasi keberadaan teks-teks kanoniknya.

Buletin Dakwah Al Islam melakukan pemilihan teks skriptural untuk menjustifikasi kewajiban melawan musuh, baik secara defensif atau ofensif. Legitimasi ayat-ayat Al Qur'an digunakan untuk melabeli secara negatif pihak atau negara yang dianggap musuh sehingga pertarungan yang muncul adalah pertarungan yang baik melawan yang jahat, antara yang diberkati dan dikutuk Tuhan. Ini adalah bagian dari apa yang dimaknai sebagai kebangkitan (fundamentalisme) agama Islam. Dengan kata lain, fundamentalisme adalah makna ideologis yang bisa disingkap dari buletin Al Islam. Fundamentalisme ini memandang politik berbasis ideologi Barat sebagai 'gagal'. Yang dikedepankan dalam fundamentalisme ini adalah sikap '*truth claim*' – merasa paling benar dengan menyalahkan, menyesatkan agama dan pemeluk lainnya.

Sikap seperti inilah yang pada gilirannya akan melahirkan 'masyarakat teks' – masyarakat yang lahir, hidup dan berjuang demi teks. Ciri utama masyarakat teks adalah perlawanan pada orang lain, menghadirkan Tuhan, menghadirkan teks dan menerima surga sebagai imbalan yang pada akhirnya melahirkan sikap eksklusif – tidak mau menerima perbedaan.

Dalam pandangan Althusser, pembongkaran posisi ideologis Hizbut Tahrir berada pada dimensi *Ideological State Apparatus*; eksistensi negara sebagai alat perjuangan kelas yang masuk dengan cara mempengaruhi untuk melanggengkan penindasan yang tampak

dalam relasi produksi masyarakat. Dalam buletin Dakwah Al Islam terdapat kemiripan cara beroperasi pada representasi Subyek-Obyek yang bersifat dominasi ideologi.

Pemosisian subyek-obyek dalam buletin Dakwah Al Islam melahirkan cara penyapaan tertentu terhadap pembaca yang menurut Mills disebut proses penyapaan tidak langsung melalui cara mediasi dan kode budaya. Proses mediasi adalah proses mensugesti pembaca agar mengidentifikasi diri dengan subyek pencerita/pendefinisi peristiwa sedangkan kode budaya adalah kode-kode budaya yang digunakan pembaca untuk menafsirkan teks sebagai benar atau bisa diterima. Pembongkaran posisi ideologi Hizbut Tahrir berdasarkan proses penyapaan ini menunjukkan sekali lagi bagaimana fundamentalisme memang merupakan ideologi yang menjiwai isi buletin tersebut.

## 6.2. Saran

Sebagai penutup, akan sangat menarik untuk meneruskan penelitian ini dengan penelitian selanjutnya dengan memanfaatkan berbagai temuan. Penelitian tentang respons pembaca, misalnya, (terutama kaum muda terdidik di perkotaan) terhadap isi buletin tersebut akan menarik untuk dilihat karena akan menjawab pertanyaan seberapa besar pengaruh fundamentalisme dalam media terhadap masyarakat - apakah saluran media semacam buletin ini memang tepat sasaran dalam mempengaruhi pandangan masyarakat tentang fundamentalisme.

## DAFTAR PUSTAKA

### Data Primer

1. Buletin Dakwah Al Islam Edisi 293/ Tahun XIII: *Penjajahan Asing Lewat Undang-Undang*
2. Buletin Dakwah Al Islam Edisi 294/ Tahun XIII: *Saatnya Khilafah Memimpin Dunia Dengan Syariah*
3. Buletin Dakwah Al Islam Edisi 297/ Tahun XIII: *Mengawal RUU Anti Pornografi Dan Pornoaksi*
4. Buletin Dakwah Al Islam Edisi 298/ Tahun XIII: *Jangan Biarkan Pihak Asing Memecah Belah Negeri Kita*
5. Buletin Dakwah Al Islam Edisi 299/ Tahun XIII: *Mengikuti Dan Meneladani Rasulullah Saw*

### Data Sekunder

Barrat, David. 1994. *Media Sociology*. London and New York: Routledge  
 Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta:

### LkiS

- Fairclough, Norman. 1995. *Media Discourse*. London: Edward Arnold  
 dan Wodak, Ruth. 1997. "Critical Discourse Analysis". Dalam Teun A. Van Dijk (ed.), *Discourse as Social Interaction: Discourse Studies a Multidisciplinary Introduction*, Vol. 1. London: Sage Publication.
- Hall, Stuart. 1982. "The Rediscovery of Ideology: Return of the Repressed in Media Studies". Dalam Michael Gurevitch, Bennet, James Curran, dan James Wollacott (ed), *Culture, Society and the Media*. London: Methuen.
- Hikam, Mohamad A.S. 1996. *Bahasa dan Politik: Penghampiran Discursive Practice*, dalam Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim (ed.), *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Bandung: Mizan.

**LAMPIRAN 1**  
**CURRICULUM VITAE**

- L.7 Kepala peneliti
1. Nama lengkap dengan gelar : Lina Puryanti, S.S., M.HUm.
  2. Umur/Jenis Kelamin/Agama : 32 tahun/Perempuan/Islam
  3. Alamat (Bagian, Fakultas, d.l.l.) : Sastra
  4. Pangkat/Golongan/NIP : Penata Muda/IIIA/132205667
  5. Jabatan Pokok : Dosen
  6. Kesatuan/Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga
  7. Alamat Kantor : Jl. Airlangga 4-6, Surabaya
  8. Riwayat Pendidikan Tinggi

No	MACAM PENDIDIKAN	TEMPAT	TAHUN		BIDANG SPESIALIS	TITEL/ IJAZAH
			DARI	SAMPAI		
1.	Universitas Airlangga	Surabaya	1991	1996	Sastra Inggris	Sarjana/S1
2.	Universitas Indonesia	Jakarta	2001	2004	Sastra dan kajian Budaya	S2

L.8 Pengalaman Penelitian

No	TAHUN	JUDUL PENELITIAN	SUMBER BIAYA	KETERANGAN
1.	1996	The Emergence of Primordial Instinct on Buck as the Main Character on Jack London's The Call of the Wild (Thesis S1	Mandiri (skripsi S1)	Ketua
2.	2004	Representasi Muhammad dalam Novel The Satanic Verses karya Salman Rusdhie	Mandiri (tesis S2)	Ketua
3.	2002	Relasi antara Wacana Seksualitas dan Kekuasaan dalam Saman dan Larung karya Ayu Utami	DIKS	Anggota
4.	2002	Wanita dan Kebijakan Publik: Studi atas Keterlibatan Wanita dalam Pengambilan Kebijakan di Pemkot Surabaya	DIKS	Ketua
5.	2003	Wacana Dekonstruksi dalam Novel Supernova Supernova: Ksatria, Putri, dan Bintang Jatuh Dalam Supernova Episode: Akar karya Dee	DIKS	Anggota
6.	2005	Penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi Mata Pelajaran Bahasa Inggris di SLTP di Surabaya: Implementasi dan Kendala yang	DIKS	Anggota

		Dihadapi		
7	2005	Modernitas dan Lokalitas dalam Novel Mencari Sarang Angin Karya Suparto Brata	SP4	Ketua
8	2006	Modal Sosial Demokrasi: Kajian Atas Fungsi Folklor dalam Masyarakat Adat Tengger	RISTEK	Anggota
9	2006	Personalitas dan Impersonalitas dalam Puisi-puisi S. Yoga	Mandiri	Ketua
10	2006	Strategi Wacana dan Konstruksi Ideologi dalam Buletin Dakwah Al Islam Dakwah Al Islam Terbitan Hizbut Tahrir Indonesia: Analisis Wacana Kritis	DIKS	Ketua

**PUBLIKASI HASIL PENELITIAN:**

1. Representasi Multikulturalisme Australia dalam Puisi Wogs dan Australia karya Ania Walwics
2. Posisi Ideologis Pengarang dalam Novel The Satanic Verse Karya Salman Rusdhi
3. Perubahan Paradigma Musik Klasik pada Kelompok musik "bond"

**CURRICULUM VITAE**

1. Nama lengkap dengan gelar : Lusvita Fitri Nuzuliyanti, S.S., M.A  
 2. Umur/Jenis Kelamin/Agama : 32 tahun/Perempuan/Islam  
 3. Alamat (Bagian, Fakultas, d.l.l.) : Sastra  
 4. Pangkat/Golongan/NIP : Penata Muda/IIIA/132295669  
 5. Jabatan Pokok : Dosen  
 6. Kesatuan/Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga  
 7. Alamat Kantor : Jl. Airlangga 4-6, Surabaya  
 8. Riwayat Pendidikan Tinggi

No	MACAM PENDIDIKAN	TEMPAT	TAHUN		BIDANG SPESIALIS	TITEL/ IJAZAH
			DARI	SAMPAI		
1.	Universitas Airlangga	Surabaya	1991	1995	Bahasa Inggris	Sarjana/S1
2.	The University of Melbourne	Melbourne	2003	2004	Linguistik Terapan	S2

**L.8 Pengalaman Penelitian**

No	TAHUN	JUDUL PENELITIAN	SUMBER BIAYA	KETERANGAN
1.	2006	Strategi Wacana dan Konstruksi Ideologi dalam Buletin Dakwah Al Islam Dakwah Al Islam Terbitan Hizbut Tahrir Indonesia: Analisis Wacana Kritis	DIKS	Anggota
2.	2005	Intended meaning soal-soal tipe esai untuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester	DIKS	Anggota
3.	2005	Penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi Mata Pelajaran Bahasa Inggris di SLTP di Surabaya: Implementasi dan Kendala yang Dihadapi	DIKS	Anggota
4.	2004	Turn-taking organization in postgraduate classes	Mandiri	Ketua
5.	1995	Social and psychological conflict of Clyde Griffith in Theodore Dreiser's <i>An American Tragedy</i> .	Mandiri	Ketua



**Outdoor Campaign**  
Peringatan 82 Tahun Perjuangan Menegakkan Kembali Khilafah

IR-PERPUSTAKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**“SAATNYA KHILAFAH MEMIMPIN DUNIA DENGAN SYARIAH”**

Pada tahun-tahun mendatang, dunia akan menyaksikan kebangkitan Islam yang sesungguhnya. Kita sebagai umat Islam harus mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan tersebut. Kita harus menegakkan kembali Khilafah yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Kita harus menegakkan kembali Khilafah yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Kita harus menegakkan kembali Khilafah yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.

1. Aksi Sejuta Umat Bersama Hizbut Tahrir Indonesia tanggal 5 Maret 2006 di seluruh Indonesia.
2. Diskusi Tokoh
3. Talk Show
4. Dauroh Dirosah Islamiyah

Dengan semangat bollymes dan koreografi yang spektakuler, para peserta akan mengikuti atraksi yang penuh dengan makna. Acara ini akan berlangsung di Gedung Sate, Bandung, pada tanggal 5 Maret 2006. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Hizbut Tahrir Indonesia di nomor telepon 021-3893848.



**Simak Terus HTI on Air**

Program "Mutiara Senja"  
Radio Carolina AM 1080 KHz  
Tiap hari, 16.30 - 17.30 WIB  
Telp. Interaktif 5029877  
**MUTIARA ISLAMI**  
AM 882 KHz RSPK Sidoarjo  
Setiap Jumat, 08.00 - 09.00 WIB  
Telp. Interaktif 8949633



**TALK LIVE KAFE RUMPI**  
Giga FM 99,85 MHz Kamis, 18.00 - 20.00 WIB  
Telp. Interaktif 2988111

**FUIPS Nganjuk on Air**

Program "Mutiara Senja Taslim"  
Radio Tasma FM 99.40 MHz Nganjuk  
Setiap Ahad & Kamis, 17.00-18.00 WIB  
Telp. Interaktif 0358-774444  
Materi: Aqidah & Syariah Islam (dalam Perspektif Hukum, Hikmah & Kontemporer)  
Narasumber:  
1. KH. Imam Fachrurrazie, SH.  
2. dr. M. Nurhadi, M.Kes.  
3. KH. Dr. Kharisudin Aqib, M.Ag.  
4. KH. Musthofa Ahwiy  
5. Samani, S.Ag.  
6. Abdul Aziz  
7. Tim LAZ FUIPS Nganjuk

**PEMUTARAN FILM KONSPIRASI**

**11 SEPTEMBER 2001**

**"Membongkar Propaganda Terorisme"**

Ahad, 26 Februari 2006 08.00 - 11.30 WIB  
Aula Masjid Masjidillah Karangmenjangan  
Narasumber: Ust. Asadullah  
Terbuka Untuk Umum & Gratis  
Info: Sugiono (031) 3893848

**SANTIKAN U**  
**DAURAH DIROSAH ISLAMIYAH.**  
Materi: Aqidah, Syariah, Syakhshiyah,  
Dakwah, dan Wawasan Kontemporer

Ikhwan/Akhwat

Segera Daftar Tempat Terbatas

Pendaftaran (031) 3893848 / 71745303

**PENGAJIAN TOMBO ATI**

Kitab *Min Muqowwimat An Natsiyah Al Islamiyyah*  
Bersama Ust. Farhan Abd. Hamid (HTI Gresik)  
Setiap Ahad ba'da Maghrib  
Di Masjid Al Jihad Jl. Mutiara Perum TNI AL  
Kota Baru Driyorejo Gresik  
CP. Andie 031-71261602

Buletin Dakwah AL-ISLAM terbit setiap Jum'at. Penerbit: **HIZBUT TAHRIR INDONESIA**  
Kantor HUMAS HTI daerah Surabaya: Gedung LSA, Jl. Mulyorejo Utara 203 A ☎ (031) 3893848 / 70437742;  
Gresik: (031) 70142715, Lamongan: (0322) 311067, Jombang: (0321) 7208271, Sumenep: (0328) 672390,  
Pamekasan: (0323) 321898, Sampang: (0323) 321898, Bangkalan: (031) 70147323, Nganjuk: (0358) 7601507,  
Mataram: (0370) 621038. Bertangganan min. 50 eks. Infaq: Rp 200, -Eks.



**AL ISLAM**

**HIZBUT TAHRIR INDONESIA**

Melanjutkan Kehidupan Islam

http://www.hizbut-tahrir.or.id  
e-mail: Info@al-islam.or.id

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Edisi 293/Tahun XIII

**PENJAJAHAN ASING LEWAT UNDANG-UNDANG**

Tragis! Mungkin, itulah kata yang pantas kita lontarkan ketika DPR-RI berencana mengundang sejumlah tenaga ahli asing dalam rangka meningkatkan produktivitas lembaga itu dalam memproduksi berbagai UU. Sebagaimana diberitakan, untuk menggenjot produktivitas DPR dalam menjalankan proses legislasi atau pembuatan undang-undang, DPR segera 'mengimpor' tenaga ahli dari Capitol Hill, Amerika Serikat (AS). Tenaga-tenaga ahli yang akan didatangkan berasal dari House of Representatives atau DPR Amerika maupun dari Kongres atau MPR Amerika.

"Tenaga dari House of Representatives dan Kongres itu akan didatangkan dalam waktu dekat. Mereka akan melakukan asistensi pembuatan naskah akademik, *legal drafting* (pembuatan rancangan undang-undang *red.*), sampai menjadi undang-undang," papar Ketua DPR, Agung Laksono, saat berkunjung ke Redaksi *Republika*, Jakarta, Rabu (15/2). Dia menambahkan, bahwa tenaga ahli itu merupakan bantuan dari Pemerintah AS' untuk negara yang demokrasinya sedang tumbuh.

Pada tahun 2006 ini, Agung menargetkan DPR akan menghasilkan 70 undang-undang. Agung mengaku optimistis mencapai target itu karena dalam tiga bulan terakhir DPR telah membuat 20 UU. (*Republika*, 16/2/

2006). Entah apa yang ada dalam benak para anggota dewan yang terhormat. Setelah banyak memproduksi UU yang diduga kuat banyak dipengaruhi oleh kepentingan asing—seperti UU Migas, UU Listrik, UU Sumber Daya Air, UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan sejumlah UU lain—DPR kini malah secara terang-terangan mengundang pihak asing untuk turut campur tangan secara langsung dalam pembuatan UU di berbagai bidang. Memang, sebagaimana dinyatakan oleh Ketua DPR Agung Laksono, mereka hanya campur tangan dalam masalah teknis. Pertanyaannya, betulkah para tenaga asing itu hanya akan mengurus hal-hal yang bersifat teknis? Betulkah DPR, yang notabene merupakan lembaga legislasi/pembuat UU yang sudah berusia puluhan tahun dan berpengalaman dalam memproduksi ratusan UU itu masih memiliki keterbatasan teknis sehingga perlu bantuan

**Komentar AL-ISLAM**



AS Bukan Pendekar HAM dan Demokrasi (*Republika*, 20/02/2006)



HAM dan Demokrasi hanyalah alat penjajahan AS, khususnya terhadap Dunia Islam.

mohon tidak diletakkan sembarang, karena mengandung ayat suci Al Qur'an

"teknisi" ahli dari luar negeri?

Jawabannya, hanya para anggota DPR yang bisa secara jujur menjawabnya. Yang pasti, apapun jawabannya, campur tangan asing terhadap negeri ini, apalagi dalam pembuatan berbagai produk UU, jelas sangat berbahaya! Pengalaman membuktikan, UU Migas, UU Listrik (meski kemudian dibatalkan oleh MK), UU Sumber Daya Air (UU SDA), dan UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT), isinya sarat dengan liberalisme. Pasal-pasal dalam UU Migas dan UU SDA, misalnya, mengarah pada upaya liberalisasi dan privatisasi, yang memungkinkan perusahaan-perusahaan asing menguasai sumberdaya-sumberdaya alam milik rakyat. Melalui UU Migas, misalnya, Pertamina, yang notabene perusahaan milik Pemerintah/rakyat, saat ini bukan pemain tunggal. Pertamina kini harus bersaing dengan perusahaan minyak asing seperti Shell, Exxon Mobil, Mobil Oil, dll. Bahkan dalam kasus pengelolaan ladang minyak Blok Cepu Jateng, Pertamina harus rela berbagi keuntungan sama rata (45:45) dengan Exxon Mobil. Padahal, banyak pengamat energi menilai, Pertamina sesungguhnya mampu mengelola sendiri ladang tersebut tanpa keterlibatan Exxon Mobil; di samping tidak ada alasan yang logis bagi Pemerintah untuk memperpanjang kontrak dengan Exxon Mobil dalam pengelolaan ladang minyak Blok Cepu.

Jelas, UU Migas ini telah sesuai dengan kehendak Barat dan AS. Sebab, dengan begitu, perusahaan multinasional seperti Shell, Exxon Mobil, Caltex, dan yang lainnya berlomba-lomba masuk ke Indonesia tanpa ada hambatan sedikitpun.

Selain itu, munculnya UU Migas ini adalah bentuk dari realisasi *Letter of Intent* (LoI) Pemerintah Indonesia dengan IMF (yang mewakili kepentingan Barat dan AS).

Campur tangan asing dalam pembuatan berbagai UU di negeri ini bahkan tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi sudah merambah ke dalam institusi/lembaga keluarga. Sebagaimana diketahui, UU KDRT yang beberapa waktu lalu disahkan, misalnya, juga sarat dengan pasal-pasal 'liberal', yang mengarah pada penghancuran secara sistematis institusi/ lembaga keluarga, terutama keluarga Muslim. Campur tangan

asing bahkan telah menyentuh aspek moral. Sebagaimana diberitakan, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang AntiPornografi dan Pornoaksi (RUU APP), Balkas Kapale, pernah didatangi pihak yang mengatasnamakan perwakilan Uni Eropa dan Amerika Serikat (AS). Orang-orang asing tersebut mengkhawatirkan bergulirnya RUU APP menjadi UU. (*Republika*, 18/2/2006). Pertanyaannya, mengapa mereka harus khawatir, kalau bukan karena RUU APP itu—jika disahkan—akan mempersempit ruang gerak mereka dalam menjajakan budaya liberalnya (yakni pornografi dan pornoaksi atas nama HAM dan kebebasan berekspresi) di tengah-tengah masyarakat negeri ini yang notabene mayoritas Muslim.

Jelas, dengan alasan apapun, keterlibatan pihak asing secara langsung dalam pembuatan UU tidak memberikan manfaat apapun; bahkan sebaliknya, berbahaya bagi kondisi ekonomi, politik, sosial, budaya, bahkan keamanan negeri ini pada masa-masa mendatang.

#### Bahaya Campur Tangan Asing dalam Pembuatan UU

Setidaknya ada dua bahaya jika sampai pada masa-masa mendatang pihak asing terlibat langsung dalam pembuatan UU. *Pertama*: sebagaimana diungkapkan sendiri oleh Ketua DPR Agung Laksono, tenaga ahli yang 'diimpor' nanti merupakan bantuan langsung dari Pemerintah AS bagi Indonesia yang dinilai AS sebagai negara demokratis yang sedang tumbuh. Artinya, 'impor' tenaga ahli itu bukan semata-mata keinginan dari DPR RI, tetapi merupakan 'niat baik' AS. Dalam 'pakem' perpolitikan Internasional, yang namanya bantuan asing kepada suatu negara—apalagi dari negara kapitalis seperti AS yang notabene negara imperialis (penjajah)—jelas tidaklah murni datang dari 'hati yang tulus'. Tegasnya, tatkala negara asing kapitalis seperti AS memberikan bantuan, tidak mungkin (mustahil) itu dilakukan tanpa agenda/tujuan/kepentingan tertentu. Terlalu 'lugu dan polos' jika kita menilai bantuan AS—yang notabene pengemban utama Ideologi Kapitalisme—itu semata-mata sebagai kebaikan negara itu kepada Indonesia.

*Kedua*: bantuan tenaga ahli itu, sekali lagi, tidak mungkin hanya menyangkut masalah teknis semata; pasti akan menyangkut permasalahan yang lebih mendasar seperti: filosofi pembuatan undang-undang, kerangka acuan, kerangka berpikir, aspek hukum, batasan masalah, dan konsepsi mendasar lainnya.

Jika yang terjadi seperti di atas maka bisa dipastikan bahwa yang terjadi sebenarnya adalah 'penjajahan' Barat/AS melalui undang-undang. Sebab, sebagai negara kapitalis, AS tentu paham betul, bahwa jika ingin sukses melaksanakan kepentingannya ke dalam suatu negeri, maka diperlukan payung hukum dari negeri itu untuk menjamin terealisasinya kepentingan tersebut. Dengan kata lain, jika produk hukum yang dilahirkan oleh DPR/Pemerintah telah sesuai dengan kehendak AS maka sepakterjang AS dalam 'mengobok-obok' negeri ini akan dengan mudah dilakukan tanpa khawatir terbentur dengan hukum yang berlaku. Itulah yang telah terjadi dalam proses pembuatan dan pengesahan sejumlah UU di Indonesia.

Karena itu, kita pun semakin 'paham', mengapa setiap produk hukum di Indonesia senantiasa bercorak liberal, pro kapitalis/memihak pemilik modal, memberikan peluang kepada pihak asing, sering bertentangan dengan kehendak rakyat, dan yang pasti selalu melanggar hukum syariah. Sebut saja di antaranya: UU Migas No. 22 Th. 2001 yang rancangannya dibuat oleh USAID), UU Ketenagalistrikan No. 20 Th. 2002 yang pengesahannya di bawah tekanan Bank Dunia (meskipun UU ini kemudian dibatalkan oleh MK), UU Sumber Daya Air (yang pengesahannya juga berada di bawah tekanan Bank Dunia), dan UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Walaupun, rencana mengundang ahli pembuat UU dari AS menunjukkan bahwa secara sadar DPR RI telah membuka diri untuk diintervensi (baca: dijarah) oleh Barat dan AS.

#### Islam Melarang Kita Tunduk Kepada Pihak Kafir

Barat dan AS sebenarnya adalah musuh kaum Muslim yang berpura-pura bersikap manis dan berpura-pura menolong, namun hakikatnya mereka tetap musuh yang hendak

mengangsa kaum Muslim. Allah SWT menegaskan bahwa orang-orang kafir itu merupakan musuh yang nyata bagi kaum Muslim:

﴿إِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عٰدُوْۤا نٰٓيِبًاۙ﴾

Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh kalian yang nyata. (QS an-Nisâ' [4]: 101).

Kita tentu menyadari, tidak ada musuh yang menghendaki kebaikan dan kejayaan bagi kaum Muslim. Kalaupun mereka menampilkan sikap baik, maka itu hanyalah untuk menutupi niat jahat yang mereka sembunyikan di dalam hati-hati mereka.

Karena itu, kita yang telah mengaku beriman kepada Allah, hendaknya meyakini kebenaran firman-Nya, yang telah melarang kita untuk meminta bantuan kepada orang-orang kafir. Allah SWT berfirman:

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عٰدُوِيْ وَعٰدُوَكُمْ اَوْلِيَاۙ﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil musuh-Ku dan musuh kalian menjadi teman setia. (QS al-Mumtahanah [60]: 1).

Allah SWT juga berfirman:

﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاۙ﴾

Janganlah orang-orang Mukmin mengambil orang-orang kafir sebagai penolong mereka. (QS Ali Imrân [3]: 28).

Semua nash di atas menjelaskan kepada kita bahwa kaum Muslim seluruhnya, tanpa kecuali, dilarang untuk meminta bantuan/pertolongan, apalagi sampai tunduk dan mengekor pada Barat dan AS, karena pada hakikatnya mereka adalah musuh nyata kaum Muslim. Karena itu, DPR—yang notabene mayoritas anggotanya adalah Muslim—hendaknya tidak membuka diri bagi penjajahan Barat dan AS melalui UU. DPR—juga Pemerintah—justru harus menutup semua celah dan peluang bagi setiap intervensi, campur tangan, dan penjajahan pihak asing atas negeri ini. *Wallâh Muwaffiq ilâ aqwam ath-thariq.* [ ]

Mohon tidak diletakkan sembarang karena mengandung ayat suci Al Quran



# AL ISLAM

HIZBUT TAHRIR INDONESIA

Melanjutkan Kehidupan Islam

<http://www.hizbut-tahrir.or.id>

Edisi 294/Tahun XIII

e-mail: [Info@al-islam.or.id](mailto:Info@al-islam.or.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## SAATNYA KHILAFAH MEMIMPIN DUNIA DENGAN SYARIAH

**T**epat 82 tahun lalu (3 Maret 1924), Khilafah Islam dibubarkan secara resmi oleh Mustafa Kemal Attaturk, seorang Yahudi agen Inggris. Hilangnya sistem Khilafah berarti hilangnya sebuah sistem Islam yang menyatukan Dunia Islam di bawah satu kepemimpinan berlandaskan syariat Islam, juga berarti hilangnya Negara Islam yang—menurut Dr. Yusuf Qaradhawi—merupakan perwujudan dari Ideologi Islam.

Karena itu, keruntuhan Khilafah Islam 82 tahun lalu, yang antara lain akibat dari berbagai konspirasi jahat Barat Imperialis dan Yahudi selama puluhan tahun terhadap Khilafah, sesungguhnya merupakan tragedi terbesar yang belum pernah dialami oleh kaum Muslim sebelumnya. Bagaimana tidak?! Khilafahlah yang selama 13 abad (632-1924 M)—jika dihitung dari masa Khulafaur Rasyidin, Khilafah Bani Umayyah, Khilafah Bani Abbasiyah hingga Khilafah Utsmaniyah—menjadi institusi pelayan dan pelindung umat manusia, yang wilayah kekuasaannya pernah meliputi hampir 2/3 bagian dunia, dengan berbagai kesuksesannya di berbagai bidang kehidupan.

Sepanjang sejarah umat manusia, hanya Khilafahlah yang sudah terbukti mampu menyatukan dan melebur bangsa-bangsa yang mendiami wilayah antara Xinjiang (Cina Barat) di timur melintasi Timur Tengah, Mesir, Afrika

Utara sampai Maroko dan Spanyol di Barat; antara India di selatan melintasi Asia Selatan, Timur Tengah, wilayah Kaukasus sampai semenanjung Krimea di Utara. Khilafah juga membawa kesejahteraan, kebangkitan sains dan teknologi, serta kemajuan peradaban umat. Khilafah pun pernah berhasil menjadikan rakyatnya berkecukupan sehingga tidak ada seorang pun yang mau mengambil harta zakat. Carleton S, saat mengomentari peradaban Islam dari tahun 800 hingga 1600, menyatakan, "Peradaban Islam merupakan peradaban yang paling besar di dunia. Peradaban Islam sanggup menciptakan sebuah negara adidaya kontinental (*continental super state*) yang terbentang dari satu samudera ke samudera yang lain....Tentarnya merupakan gabungan dari berbagai bangsa yang melindungi perdamaian dan kemakmuran yang belum pernah dikenal sebelumnya." (Ceramahnya tanggal 26 September 2001, dengan judul, "Technology, Business, and Our Way of Life: What's Next").

### Komentar AL ISLAM



**Segera Putuskan Blok Cepu**  
(Kompas, 28/02/2006)



Putuskan untuk tidak dikelola oleh asing.

### Nasib Dunia Kini, Tanpa Khilafah

Bagaimana dengan dunia setelah 82 tahun tanpa Khilafah yang mengemban ideologi Islam, tetapi dipimpin oleh negara-negara Barat pengemban Ideologi Kapitalisme? Inilah sebagian faktanya:

#### Bidang Ekonomi

Di bawah sistem Kapitalisme, terdapat 1,214 miliar orang miskin pada tahun 1997 saja (20% dari penduduk dunia); 1,6 miliar jiwa (25%) penduduk dunia lainnya hidup hanya dengan 1-2 dolar AS perhari. Kesenjangan pendapatan antara 1/5 penduduk dunia di negara-negara kaya dengan 1/5 penduduk di negara-negara termiskin pada tahun 1998 adalah 78:1. Aset 3 orang terkaya di dunia lebih besar daripada gabungan GNP 48 negara terbelakang. Seperlima orang terkaya di dunia mengonsumsi 86% semua barang dan jasa, sementara 1/5 orang termiskin di dunia hanya mengonsumsi kurang dari 1% saja. [The United Nations Human Development Report, 1999].

Pada tahun 1997, 78% anak-anak di bawah usia 5 tahun yang kekurangan gizi di negara-negara sedang berkembang sebenarnya hidup di negara-negara yang mengalami surplus pangan. [United Nations Food and Agriculture Organization, 1998]. Dewasa ini 826 juta manusia menderita kekurangan pangan yang sangat kronis dan serius, kendati dunia sebenarnya mampu memberi makan 12 miliar manusia (2 kali lipat dari penduduk dunia) tanpa masafah sedikit pun. Setiap hari 11 ribu anak mati kelaparan di seluruh dunia, sedangkan 200 juta anak menderita kekurangan gizi dan protein serta kalori. Lebih dari 800 juta menderita kelaparan di seluruh dunia dan 70% di antara mereka adalah wanita dan anak-anak. Di seluruh dunia kira-kira 50 ribu orang meninggal setiap hari akibat kurangnya kebutuhan tempat tinggal, air yang tercemar, dan sanitasi yang tidak memadai. [Shukor Rahman, *New Straits of Malaysia Times*, 2001]. Jumlah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan gizinya diperkirakan bertambah besar hingga 3%, dari 1,1 miliar pada tahun 1998 menjadi 1,3 miliar orang pada tahun 2008. [US Departemen of Agriculture, *Food Security Assessment*, 1999]. IMF membunuh umat manusia tidak dengan peluru

ataupun rudal, tetapi dengan wabah kelaparan. [Chris Brinsford, *United Nations President Venezuela, The Ecologist Report, Globalizing Poverty*, 2000].

Pada akhir 1998, kira-kira 1 miliar pekerja (1/3 dari tenaga kerja dunia) menjadi pengangguran atau setengah pengangguran. [World Employment Report 1998-1999, International Labor Organization]. Di Indonesia, menurut *Center for Labor and Development Studies (CLDS)*, diperkirakan total pengangguran 42 juta pada 2002, dan dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi sekitar 3%, jumlah yang menganggur 43,6 juta pada 2003, dan 45,2 juta pada 2004 (*Republika*, 13/05/02).

#### Bidang sosial

Harian *Newsweek* edisi bulan Januari tahun 1997 menulis: Lebih dari separuh anak yang dilahirkan di Swedia adalah hasil perzinahan. Di Prancis dan Inggris angka ini mencapai sepertiganya. Adapun di Amerika, tingkat kehamilan sebagai hasil perzinahan lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan yang terjadi di negara-negara Barat lainnya. Di AS angka perceraian meningkat dengan tajam sejak tahun 1960-an. Tahun 1980 jumlah anak yang dibesarkan oleh kepala keluarga wanita telah mencapai 50%. Tahun 1997 angka perceraian tercatat 1,164 juta dan tahun 1998 sebanyak 1,94 juta. Tahun 1999 jumlah laki-laki yang dicerai 8,57 juta (8,3%) dan wanita 11,3 juta (10,2%). ([www.swaramuslim.net](http://www.swaramuslim.net)). Di Inggris dan umumnya negara-negara Eropa angka perceraian juga tergolong tinggi.

Data United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) menyebutkan, pada akhir tahun 2004, terdapat 39,4 juta orang dengan HIV/AIDS di seluruh dunia. Sebanyak 17,6 juta (45%) adalah perempuan dan 2,2 juta adalah anak-anak berusia kurang dari 15 tahun. Di Indonesia, meski bukan penyebab utama, perilaku seks bebas memberikan kontribusi terhadap mewabahnya virus HIV/AIDS di Tanah Air. Hingga akhir September 2005, negeri yang berpenduduk 220 juta jiwa ini sudah memiliki 8.251 kasus HIV/AIDS, terdiri dari 4.065 kasus HIV dan 4.186 kasus AIDS. ([Cybermed.cdn.com](http://Cybermed.cdn.com), 4/12/2005). Kebanyakan yang terjangkit adalah PSK (pekerja seks komersil). ([Tempinteraktif.com](http://Tempinteraktif.com), 18/11/2005).

#### Bidang keamanan

Dalam banyak penelitian terungkap bahwa angka kriminalitas—pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, penyalahgunaan narkoba, bunuh diri, dll—di AS dan sejumlah negara Barat menempati peringkat tertinggi di dunia. Di luar negaranya, menurut laporan majalah kesehatan Inggris *The Lancet*, AS dan sekutunya telah menewaskan sekitar 100 ribu warga sipil Irak. (BBC online, 29/10/2004). Sebelumnya, puluhan ribu rakyat Afghanistan lebih dulu meringang nyawa akibat serangan brutal AS dan sekutunya. Sejarah juga mencatat bahwa sejak dulu AS—yang notabene merupakan pengemban Ideologi Kapitalisme—begitu agresif dalam menciptakan konflik di dunia. AS juga telah menyerang lebih dari seratus negara di seluruh dunia; di antaranya adalah operasi militer di Yunani (1947-1949), Italia (1948), Korea (1950-1953), Iran (1953), Guatemala (1954), Kongo (1960), Kuba (1961), Vietnam (1969-1975), Laos (1961-1975), Dominika (1965), Kamboja (1969-1971), Chili (1973), Granada (1983), Lebanon (1958 dan 1983), Libia (1986), Panama (1989), Irak (1991, 1993, 1998-1999 dan 2003), Somalia (1991-1992), Afghanistan (1998-2002), dan Serbia (1999). AS pun bertanggung jawab atas terbunuhnya ratusan ribu rakyat Palestina karena selama ini AS-lah pihak yang paling mendukung penjajahan Israel atas Palestina. Wajar jika AS adalah pemegang rekor dunia sebagai negara yang telah berhasil membunuh jutaan manusia.

Itulah di antara kebobrokan yang diciptakan oleh Ideologi Kapitalisme di dunia, dengan AS dan Barat sebagai pengemban utamanya.

#### Syariah adalah Solusi

Menyaksikan berbagai kezaliman akibat Ideologi Kapitalisme di atas (yang hanya sebagian kecil saja yang diungkap), seharusnya umat Islam segera kembali pada Ideologi penyelamat, yang tidak lain adalah Islam; sebuah Ideologi yang pasti membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Allah SWT berfirman:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْمَٰلِكِينَ ﴾

Tidaklah Kami mengutusmu (Muhammad) kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.

(QS al-Anbiyâ' [21]: 107).

Ayat di atas menegaskan bahwa diutusnya Nabi Muhammad saw., dengan membawa syariah-Nya, adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi alam ini. Karena itu, ketika manusia berpaling dari syariah-Nya, mereka pasti tidak akan pernah meraih kemaslahatan; mereka malah akan ditimpa kemadaramatan dan kesempatan hidup. (lihat QS Thâhâ [20]: 124).

#### Khilafah adalah Penegak Syariah dan Pengayom Umat Manusia

Di dalam al-Quran Allah sesungguhnya telah mewajibkan kaum Muslim untuk menegakkan syariah-Nya secara total dalam seluruh aspek kehidupan. (QS al-Mâidah [5]: 48). Sebaliknya, Allah telah melarang secara tegas umat Islam untuk menerapkan hukum-hukum di luar syariah-Nya, sekaligus mencap pelakunya sebagai kafir, zalim, atau fasik (QS al-Mâidah [5]: 44, 45, 47).

Di samping itu, di dalam as-Sunnah, Rasulullah saw. telah memerintahkan kaum Muslim untuk menegakkan Khilafah dan mengangkat/membaiat seorang khalifah, yang berfungsi sebagai wakil mereka dalam menerapkan hukum-hukum syariah secara total. Rasulullah saw. bersabda:

﴿ مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنِّيَ مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ وَ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ فِي عُنُقِهِ شَيْءٌ مِّنْ مَّيْتَةٍ جَاهِلِيَّةٍ ﴾  
Slapa saja yang melepaskan tangan dari ketaatan, ia akan menjumpai Allah pada Hari Kiamat kelak tanpa memiliki hujjah, dan siapa saja yang mati, sedangkan di pundaknya tidak terdapat baiat (kepada Khilafah), maka ia mati seperti kematian Jahiliah. (HR Muslim).

Khalifah juga adalah pelayan, pengurus, dan pengayom umat. Nabi saw. bersabda:

﴿ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُبُّوهُمْ الْأَنْبِيَاءَ كُلَّمَا مَلَكَ نَبِيٌّ خَلَقَهُ نَبِيٌّ رَبَّهُ لَا يَبْدِي وَ تَسْتَكْرُونَ خُلَفَاءُ فَتَكْرَهُ ﴾

"Dulu Bani Israel diurus dan dipelihara oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, nabi yang lain menggantikannya. Sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku dan

Lina Bunyanti



Syariat Islam. Pada isi RUU APP tersebut telah terjadi kompromi-kompromi dan reduksi terhadap nilai-nilai Islam. Sebagai misal, definisi tentang pornografi dan pornoaksi. Saat ini, pornografi dan pornoaksi hanya berlaku dalam ruang lingkup 'pelacur' semata. Adapun orang yang membuka auratnya, tetapi profesinya bukan pelacur, tidak dianggap sebagai pelaku kepornoan. Walhasil, jika UU APP justru bertentangan dengan syariat Islam maka kita harus menolaknya,

sendiri, apakah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. *'Ala kullî hâi*, marilah kita senantiasa berupaya meningkatkan keimanan diri, keluarga, dan masyarakat agar semua sadar tentang betapa pentingnya syariat diterapkan secara sempurna dalam naungan Daulah Khilafah Islamiyah agar kehidupan kita senantiasa diridhai Allah SWT. *Wallâhu a'lam bi ash-shawâb. []*



# AL ISLAM

HIZBUT TAHRIR INDONESIA

Melanjutkan Kehidupan Islam

http://www.hizbut-tahrir.or.id  
e-mail: info@al-islam.or.id

Edisi 297/Tahun XIII

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## AGENDA KEGIATAN

### Saatnya Khilafah Memimpin Dunia dengan Syarlah

#### DISKUSI PUBLIK

Ahad, 26 Mar 2006 07.30 - 11.30 WIB  
di Masjid Jombang Permai  
Selatan Stadion Jombang

#### Pembicara:

Ust. Abd. Muchid Jaelani (Muhammadiyah Jombang); Ust. M. Farid Ma'ruf (Ketua FUIPS Jombang); Ust. Jaelani Ghofur (Dewan Pendidikan Jombang); Ust. Hisyam Hidayat (DPD HTI Jatim) CP. Siddiq (0321-7174981)

#### TALK SHOW:

Kamis, 30 Mar 2006 08.00 - 11.30 WIB  
di Masjid An Nur RSU Dr Soetomo  
Jl Karangmenjangan Surabaya

Kamis, 30 Mar 2006 08.00-11.30 WIB  
Di Masjid As Sakinah UPB  
Jl. Arief Rahman Hakim Sby

#### DISKUSI TOKOH TERBATAS

Ahad, 26 Mar 2006 08.30 - 11.30 WIB  
di Aula FMIPA Kampus C Unair  
CP. Ust. Rosyid, SSI. (031-3893848)

### Simak Terus HTI on Air

Kulliah Subuh Mitra Religi  
Radio Suara Mitra Polda Jatim FM 91,7 KHz  
Tiap Sabtu & Ahad, 05.00-06.00 WIB



Program "Mutiar Senja"  
Radio Carolina AM 1080 KHz  
Tiap hari, 16.30 - 17.30 WIB  
Telp. Interaktif 031-5029877

Radio Pesona 2000 AM 774 KHz Sumenep  
KARISMA (Kajian Ramaja Islam Aktual) tiap  
Senin, 15.00 - 16.00 WIB  
Mutiar Senja tiap Jum'at, 15.00 - 16.00 WIB  
Telp. Interaktif (0328-664717), SMS (0328-7703774), CP. Fajar (081-58333001)

#### TALK SHOW:

### Refleksi Iptek Dunia Ketiga

Ahad, 26 Maret 2006  
07.30 - 12.00 WIB

R. Seminar Lt. 2 Perpustakaan  
ITS

#### Pembicara:

Dr. Abdullah Shahab (Pakar ITS)  
Dr. Ir. Daniel M. Rosyid, Ph.D. (Dewan Pendidikan Jatim)  
Drs. Taufik NIQ (Pakar Sejarah Islam)  
CP. Rahmat (031-70755304)

Buletin Dakwah AL-ISLAM terbit setiap Jum'at. Penerbit: HIZBUT TAHRIR INDONESIA  
Kantor HUMAS HTI daerah Surabaya: Gedung LSIA, Jl. Mulyorejo Utara 203 A ☎ (031) 3893848/70437742;  
Gresik: (031)70142715, Lamongan: (0322)311067, Mojokerto: (0321)323942, Jombang: (0321)7208271,  
Sumenep: (0328)672059, Pamekasan: (0324)327145, Sampang: (0323)321898, Bangkalan: (031)7014732  
Mstaram: (0370)521038 Berlangganan min. 50 eks. Infaq: Rp 200,-/eks.

Membaca tidak ditetakkan sembarangan karena mengandung ayat suci Al Qur'an

## MENGAWAL RUU ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI

**M**enyedihkan, di tengah-tengah keinginan bangsa ini untuk menata kehidupan moral masyarakat menjadi lebih baik dengan satu cara, yakni dengan mengeluarkan UU Anti Pornografi dan Pornoaksi (UU APP), masih ada segelintir orang/lembaga—yang menolaknya. Penolakan tersebut jelas terlihat 'konyol' dan 'tidak masuk akal'. Bagaimana tidak? Upaya untuk menata kehidupan moral yang lebih baik ditolak hanya demi kepentingan pribadi, golongan, bisnis, dan juga kepentingan asing yang berupaya menghancurkan generasi muda kita.

#### Argumentasi Penolakan

Ada beberapa alasan yang sering dikedepankan oleh para penolak Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksi (RUU APP)—jika diberlakukan. Di antaranya:

**Pertama**, UU APP, jika diberlakukan, akan membunuh kreativitas para seniman. Jika kita telaah lebih dalam, ternyata kreativitas yang dimaksud oleh kelompok yang menolak lebih diarahkan pada kreativitas penciptaan seni semata-mata (itu pun dengan ukuran-ukuran seni yang tidak jelas), bukan pada kreativitas penciptaan ilmu dan teknologi guna peningkatan kesejahteraan hidup. Kreativitas

jelas tidak boleh dilarang, namun perlu diarahkan, jangan sampai merusak tatanan kehidupan bermasyarakat; sebut saja penciptaan seni yang mengeksploitasi seks dan sensualitas. Lagi pula, jika para seniman hanya bisa tumbuh kreativitasnya ketika karyanya mengexploitasi seks dan sensualitas semata-mata, itu menunjukkan bahwa mereka tidak kreatif alias jumud. Sebab, mereka seolah tidak mampu menghasilkan karya-karya kreatif, kecuali yang mengeksploitasi kepornoan.

**Kedua**, UU APP akan mematikan pariwisata. Alasan ini juga perlu dikritisi. Jika alasan penolakannya adalah khawatir industri pariwisata akan mati dengan adanya UU APP, berarti secara tersirat industri pariwisata kita memang hanya menjual kepornoan, bukan industri yang menjual keindahan panorama

### Komentar AL-ISLAM



Bush Anggap AS Sukses di Irak  
(Kompas, 21/03/2006)



Makin jelas watak penjajah AS, mengklaim sukses setelah menduduki dan membunuh rakyat Irak.

wisata, dan keramanan masyarakat. Padahal unsur-unsur inilah yang seharusnya dijual sebagai pariwisata, bukannya unsur-unsur yang berbau seks dan kepornoan, baik pornografi dan pornoaksi.

**Ketiga**, UU APP akan memberangus kebudayaan. Banyak pihak menilai, jika UU APP disahkan maka masyarakat Papua yang biasa memakal koteka, para wanita Jawa yang biasa pakai 'kemben', para wanita Bali yang biasa berpakaian terbuka, dan lain-lain dikhawatirkan akan dilarang. Untuk menjawab argumen ini tentu kita harus sepakat terlebih dulu, kebudayaan seperti apa yang harus dipertahankan dan harus dilestarikan. Kebudayaan yang harus dilestarikan tentu haruslah kebudayaan yang mencerminkan ketinggian martabat manusia dan selaras dengan nilai-nilai yang telah digariskan sang Pencipta, Allah SWT. Kebudayaan Jahiliah atau rendah serta tidak sesuai dengan martabat dan nilai-nilai yang digariskan sang Pencipta jelas tidak perlu dilestarikan. Kebudayaan yang mengumbar aurat atau mengeksploitasi perempuan demi memuaskan hasrat seksual laki-laki, misalnya, jelas tidak perlu dilestarikan hanya karena alasan seni, menjaga tradisi leluhur, memelihara kearifan (baca: budaya) lokal, dan lain-lain. Bukankah lebih baik, misalnya, orang-orang Papua yang terbiasa memakal koteka mulai kita ajari berpakaian yang 'benar' dan lebih 'beradab', yakni dengan pakaian yang menutup aurat.

**Keempat**, UU APP, jika diberlakukan, tidak mendidik masyarakat. Sebab, masyarakat nantinya melakukan perbuatan-perbuatan bermoral sekadar dilandasi keterpaksaan sebagai akibat diterapkannya hukum, bukan karena faktor kesadaran pribadi. Padahal kesadaran pribadi inilah, menurut mereka, yang seharusnya dikembangkan.

Alasan seperti ini juga mengada-ada. Sebab, jika logika ini dipakai, buat apa kita susah-susah membuat UU Anti Korupsi atau UU Anti Narkoba, misalnya. Sudah saja masyarakat dibiarkan memiliki kesadarannya sendiri untuk tidak korupsi dan tidak menggunakan narkoba. Tentu naif, bukan? Sebab, justru salah satu fungsi hukum atau undang-undang—di samping untuk merekayasa masyarakat—adalah juga untuk mendidik

manusia dan mana yang salah; mana yang bermoral dan mana yang tidak; mana yang baik dan mana yang buruk; dst. Artinya, adanya hukum atau UU justru demi terciptanya kebaikan dan kemaslahatan bagi masyarakat.

**Kelima**, kalau tujuannya adalah melarang industri pornografi maka tidak diperlukan produk hukum lagi; diefektifkan saja UU yang sudah ada seperti KUHP dan UU Pers. Alasan ini juga cenderung mengada-ada. Kita tahu bahwa KUHP dan UU Pers kita tidak berdaya dalam menjerat pornografi dan pornoaksi. Karena itu, adanya UU APP ini justru harus kita pahami sebagai pelengkap atau pemerkuat UU yang sudah ada.

**Keenam**, tubuh manusia adalah keindahan yang merupakan anugerah dari Tuhan sehingga perlu disyukuri dan 'dinikmati'. Argumentasi ini jelas merupakan logika orang 'kurang iman'. Seharusnya ketika dikatakan bahwa tubuh adalah keindahan hasil ciptaan Tuhan maka harus juga dipahami bagaimana Tuhan mengatur tubuh manusia. Jelas, Allah SWT, sang Pencipta sekaligus pemilik tubuh manusia, telah melarang kita untuk 'memamerkan' keindahan tubuh kita di tempat umum. Allah SWT justru telah memerintah kita untuk menutup aurat kita rapat-rapat di muka umum. Allah SWT, misalnya, telah mewajibkan kaum wanita mengenakan kerudung atau *khimâr* (QS an-Nûr [24]: 31) sekaligus memakal jilbab atau pakaian sejenis abaya yang longgar dan tidak tipis (QS al-Ahzâb [33]: 59) ketika mereka hendak keluar rumah.

**Ketujuh**, kekhawatiran mayoritas menjadi tiran atas minoritas. Yang dimaksud mayoritas tentu Islam, sedangkan yang minoritas adalah non-Islam. Artinya, dalam pandangan mereka, jika UU APP ini disahkan maka Islam akan menjadi tiran dan menindas non-Islam. Jelas ini adalah kesalahan fatal. Sebab, tatkala Islam diterapkan secara sempurna maka kebaikan dan kemaslahatan bukan hanya untuk kaum Muslim semata, tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Sebab, demikianlah apa yang telah dijanjikan oleh Allah SWT:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾

Tidaklah Aku mengutusmu (Muhammad) kecuali sebagai rahmat atas seluruh alam.

Strategi Wacana

Mohon tidak ditetakkan sembarangan karena mengandung ayat suci Al Quran

Lagi pula, dalam agama-agama samawi maupun, pornografi dan pornoaksi adalah terkutuk. Karena itu, alasan di atas sebenarnya lebih ditujukan untuk memojokkan Islam, bukan semata-mata menolak UU APP saja.

**Kedelapan**, UU APP akan memicu perpecahan (disintegrasi) bangsa. UU APP dianggap akan mendorong beberapa daerah untuk melepaskan diri dari negeri ini. Alasan ini pun mengada-ada. Sebab, pengesahan UU APP justru akan semakin mempererat tali persaudaraan, bukan memecah-belah. Sebab, semangat dalam UU tersebut adalah demi kebaikan bersama. Walhasil, alasan disintegrasi hanyalah 'gertak sambal' semata, sebagaimana tatkala akan disahkannya UU Sisdiknas dan UU Kerukunan Umat Beragama.

**Akarnya adalah Sekularisme**

Jika ditelaah lebih jauh, berbagai alasan para penolak RUU APP disebabkan oleh cara pandang mereka yang sekular, yakni cara pandang yang menihilkan agama. Dalam pandangan orang-orang sekular, agama tidak boleh mengatur interaksi manusia di tengah-tengah masyarakat. Agama cukup hanya urusan pribadi. Cara pandang inilah yang akhirnya memunculkan sikap bebas—yang tidak mau terikat oleh ajaran-ajaran agama—baik dalam berbicara maupun dalam berperilaku.

Di samping itu, sekularisme merupakan akidah yang melandasi Ideologi Kapitalisme. Kapitalisme sendiri telah menjadikan manfaat (*utility*) sebagai tolok ukur dalam kehidupan manusia. Tolok ukur inilah juga yang kemudian masuk dalam dunia Industri yang dibangun para kapitalis. Karena itu, selama Industri pornografi dan pornoaksi mendatangkan manfaat dan keuntungan ekonomis, ia tidak boleh dilarang. Apalagi Industri 'esek-esek' ini memang selalu mendatangkan keuntungan mengglurkan. Itulah yang ada dalam benak para kapitalis. Mereka tidak peduli dengan nilai-nilai moral maupun ajaran agama karena dianggap hanya akan merugikan mereka secara ekonomis.

**Pandangan Islam**

Islam sebenarnya telah memberikan definisi yang jelas tentang pornografi dan pornoaksi.

(tulisan, gambar, film)—baik dalam bentuk majalah, tabloid, VCD, film-film atau acara-acara di TV, situs-situs porno di internet, ataupun bacaan-bacaan porno lainnya yang mengumbar aurat (baik aurat laki-laki maupun wanita)—yang dipertontonkan dan dijual ke tengah-tengah masyarakat. Tindakan ini jelas menimbulkan dampak buruk di masyarakat. Banyak kasus hubungan seksual di kalangan anak-anak remaja, misalnya, diawali oleh kegemaran mereka menonton VCD-VCD porno atau situs-situs porno. Karena itu, pornografi adalah tindakan yang diharamkan berdasarkan kaidah ushul fikih yang *mu'tabar* (diakul):

﴿ اَلْوَسِيْلَةُ اِلَى الْحَرَامِ حَرَامٌ ﴾

Sarana yang menjerumuskan pada tindakan keharaman adalah haram.

Adapun pornoaksi adalah perbuatan memamerkan aurat yang digelar dan ditonton secara langsung, dari mulai aksi yang 'biasa-biasa' saja seperti aksi para artis di panggung-panggung hiburan umum hingga yang luar biasa dan atraktif seperti tarlan telanjang atau setengah telanjang di tempat-tempat hiburan khusus (diskotek-diskotek, klab-klab malam, dll). Karena itu, pornoaksi juga jelas diharamkan dalam Islam, karena mempertontonkan aurat di muka umum adalah haram. Tentu saja, dalam konteks ini, yang dimaksud adalah aurat menurut syariat Islam. Seorang wanita yang memperlihatkan sekadar rambut atau bagian bawah kakinya, misalnya, jelas termasuk orang yang mengumbar aurat; apalagi memamerkan sebagian besar anggota tubuhnya. Sebab, aurat wanita dalam pandangan Islam—yang telah disepakati oleh para ulama tanpa silang pendapat—adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Keharaman ini tentu berlaku bagi yang melihatnya, termasuk bagi para pembuat pornografi (kamerawan, pengarah gaya, sutradara, dsb.).

**Wahai Kaum Muslim:**

Kita jangan terjebak pada aksi menolak atau menerima RUU APP semata. Namun, seharusnya kita lebih kritis lagi terhadap perjalanan perumusan dan pembuatan RUU APP ini. Sebab, dalam perjalanannya, RUU APP ini

memerintahkan kita untuk menyatukan seluruh negeri-negeri Islam yang lainnya dalam naungan Daulah Khilafah Islamiyah.

Kita sadar, perpecahan hanya akan semakin memperlemah Islam dan umatnya yang mengakibatkan langgengnya kezaliman. Kelemahan itulah yang diinginkan oleh negara-negara penjajah kafir. Pihak penjajah seperti AS, baik langsung ataupun melalui negara-negara yang menjadi agennya, akan terus berupaya mengerat-erat negeri Muslim. Indonesia adalah salah satu negara yang kini tengah berusaha dipecah-pecah oleh mereka.

**AGENDA KEGIATAN**

Syukur Alhamdulillah atas terselenggaranya Rapat Umum Ormas-ormas Islam Se-Jatim di DPRD Jatim. Semoga mendapat Ridho Allah SWT dan semakin kokoh bersatu. Aku dukung RUU-APP yang sesuai Syariah karena standarnya jelas dari Allah SWT. Allahu Akbar!!

**DISKUSI PUBLIK**

*Agenda Global War on Terrorism Vs Perjuangan Global Penerapan Syariat*  
Sabtu, 1 April 2006 08.00 - 12.00 WIB  
di Ruang 340 FISIP Kampus B Unair

**Keynote Speaker:**  
Prof. Dr. H. Fasich, Apt. (PR I Unair)\*  
**Pembicara:**  
Tim Pembela Muslim Surabaya\*  
Erlangga Pribadi, SIP. (FISIP Unair)  
Drs. Rokhmat S. Labib, M.E.I. (HTI)  
CP. Fendy (081 2522 7048)  
Mia (031-5920905)

Buletin Dakwah AL-ISLAM terbit setiap Jum'at. Penerbit: HIZBUT TAHRIR INDONESIA  
Kantor HUMAS HTI daerah Surabaya: Gedung LSA, Jl. Mulyorejo Utara 203 A ☎ (031) 3893848 / 70437742;  
Gresik: (031)70142715, Lamongan: (0322)311067, Mojokerto: (0321)323942, Jombang: (0321)7208271,  
Sumopone (0328)672390, Pamekasan: (0324)327145, Sampang: (0323)321898, Bangkalan: (031)70147323,  
Mataram (0370)621038. Berlangganan min. 50 eks. Infaq: Rp 200,-/eks.

kokoh, tidak ada cara lain selain harus ada upaya dari kita semua untuk terus menyatukan diri dalam satu kesatuan dan satu kehormatan. Semua itu tidak mungkin terjadi kecuali kita harus menyatukan diri dalam satu institusi negara, yakni Khilafah Islamiyah, yang telah diwajibkan atas kita dan di-nubuwah-kan oleh Rasul Junjungan kita, Muhammad saw. Hanya dalam wadah Khilafahlah kaum Muslim sedunia tidak akan mudah dipecah-belah oleh kekuatan kafir manapun. Wallahu a'lam bi ash-shawab.

**PENGGAJIAN UMUM**  
*Menyambut Kembalinya*  
*Kejayaan dan Kemullaan Islam*  
**Saatnya Khilafah Memimpin**  
**Dunia dengan Syariah**

Kamis, 30 Mar 2006 19.30 - selesai WIB  
Di Masjid Muhajirin Karang Asem Utara  
Jl. Karang Asem Gg X Surabaya

Ahad, 2 April 2006 08.00 - 11.30 WIB  
Di Gd. SERBA GUNA Kec. WIYUNG  
CP: 70635453, 71045304

Di Masjid Asy Syuhada  
Dakota Surabaya  
CP: Imam 70198701



TERBARU 1 April '06

**MENYALAKAN KEBENARAN**  
HIZBUT TAHRIR INDONESIA  
حزب التحرير إندونيسيا  
**MELAHIRKAN KETAQWAAN**  
Segera Dapatkan,  
Jangan Sampai  
Kehabisan.

Mohon tidak ditetakkan sembarangan karena mengandung ayat-ayat Al-Quran

**AL-ISLAM**

HIZBUT TAHRIR INDONESIA Melanjutkan Kehidupan Islam  
http://www.hizbut-tahrir.or.id Edisiel 298/Tahun XII  
e-mail: info@al-islam.or.id

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**JANGAN BIARKAN PIHAK ASING MEMECAH-BELAH NEGERI KITA**

Tanggal 23 Maret 2006 yang lalu, pemerintah Australia memberikan visa sementara kepada 42 aktivis pro-penglepasan Papua yang meminta suaka (perlindungan). Sebanyak 42 WNI tersebut berangkat dari Papua naik perahu layar menuju ke Australia dengan spanduk bertuliskan, "Selamatkan Orang Papua dari Genocide (Pembantaian) dan Pengejaran TNI". Ini adalah sebuah propaganda. Mereka mendarat di Cape York, kemudian ditempatkan di Christmas Island hingga mendapatkan visa sementara.



memanas-manasi dan ikut campur tangan dalam masalah dalam negeri Indonesia. Hal ini tampak pada:

**Pertama:** Setelah pada awal-awalnya menyatakan dukungan atas keutuhan Indonesia, pada 8 Februari 1999 Australia secara tegas mengusulkan lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Selanjutnya Australia terlibat secara aktif, baik melalui opini maupun militer, dalam upaya 'melepaskan' Timor Timur dari Indonesia. Selama berbulan-bulan sebelum jajak pendapat di Timtim, pasukan-pasukan intelijen dan helikopter-helikopter Australia mondar-mandir masuk ke wilayah Indonesia, bahkan sampal masuk ke kawasan Maluku Tenggara. TNI sendiri baru berteriak-teriak

Tindakan pemerintah Australia ini jelas merupakan campur tangan terhadap masalah dalam negeri Indonesia. Apalagi tatkala para pencari suaka tersebut menyeberang, Presiden SBY telah menghubungi John Howard untuk 'tidak melayani' permintaan tersebut. Jelas tindakan ini adalah bentuk dan upaya Australia untuk menginternasionalisasi persoalan di Papua. Tindakan ini juga sekaligus menunjukkan bahwa Australia berupaya masuk ke dalam masalah penglepasan Papua dari Indonesia.

Jika kita menengok kembali 'sejarah' sepak-terjang Australia dalam upayanya menginternasionalisasi masalah di Papua akan tampak bahwa Australia sangat 'getol'

**Komentar AL-ISLAM**

- Dino (Jubir Kepr президенenan, red.): Tak Akan Ada Pemutusan Hubungan (dengan Australia, red.) (Republika, 28/03/2006)
- Muhammad Rasulullah itu bersikap keras terhadap kaum kafir dan berlaku lembut terhadap kaum muslim. (Lihat QS. Al-Fath [48]: 29)

Amerika serta utusan Australia, Inggris, dan negara asing lainnya dalam Kongres Papua pada tanggal 29 Mei hingga 4 Juni 2000 yang lalu. Kongres tersebut menggugat penyatuan Papua dalam NKRI yang dilakukan pemerintah Belanda, Indonesia, dan PBB pada masa Soekarno. Menurut Kongres tersebut, bangsa Papua telah berdaulat sebagai bangsa dan negara sejak 1 Desember 1961. Selanjutnya Kongres meminta dukungan internasional untuk memerdekakan Papua (*Kompas*, 5/6/2000).

**Ketiga:** Pada 15 Februari 2004 pemerintah Australia diduga kuat sejak tahun 1991 menyadap KBRI Australia dan rumah tinggal Duta Besar RI.

**Keempat:** Australia mendukung seluruh kebijakan AS dalam kasus Papua. Misalnya, Australia memberikan dukungan atas pernyataan Kongres AS yang membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) 2601, yang memuat masalah Papua di Amerika pada bulan Juli 2005, dan akhirnya disetujui oleh Kongres AS. RUU tersebut menyebutkan adanya kewajiban Menteri Luar Negeri AS untuk melaporkan kepada Kongres tentang keefektifan otonomi khusus dan keabsahan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969.

**Kelima:** Pada 26 Agustus 2004 pemerintah Australia mengumumkan rencana pembelian rudal jelajah jarak jauh yang merupakan senjata penghancur dari udara ke darat dan mampu menjangkau sasaran sejauh 400 km. Keberatan Indonesia tak dihiraukannya.

**Keenam:** Menyusul rencana pembelian rudal jelajah, Perdana Menteri Australia John Howard (20 September 2004) menegaskan tidak akan segan-segan memerintahkan 'serangan mendahului' (*preemptive strike*) ke luar wilayahnya jika dianggap perlu untuk melindungi Australia. Protes Indonesia pun tidak digubris.

**Ketujuh:** Maret 2006, Australia menjalin Pakta Keamanan dengan Indonesia. Ketika ditanya tentang *preemptive strike*, Menlu Australia Alexander Downer hanya menyatakan dengan diplomatis, "Untungnya hubungan Indonesia dengan Australia baik." Maknanya, ketika Republik

mendahului.

### Australia, 'Sheriff' AS di Asia Tenggara

Australia bukan lagi sekadar sekutu bagi AS. Namun, lebih dari itu, Australia sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari AS. Lebih tegasnya, Australia merupakan agen militer Amerika Serikat di kawasan Asia-Pasifik. Hal ini bisa dilacak saat kunjungan Menteri Pertahanan AS William Cohen ke Sydney (17/7/2005). Saat ditanya wartawan tentang sikap pemerintahnya mengenai konflik agama di Maluku, Cohen yang didampingi rekannya Menteri Pertahanan Australia John Moore menjawab, "(Washington) akan mengandalkan kepemimpinan Australia untuk merumuskan kebijakan kami di kawasan ini." Saat itu Cohen berada di Australia untuk menandatangani sebuah kerjasama industri perlengkapan militer antara kedua negara. Selama kunjungannya itu, ia berkali-kali memberikan isyarat, pemerintahnya tidak akan terlibat secara langsung lagi di kawasan Asia Tenggara. Beberapa tahun belakangan ini memang ada pergeseran prioritas dalam kebijakan militer global AS. Untuk kawasan Asia Tenggara dan Pasifik, *testing* kemampuan Australia dalam campur tangan di Timor Timur dianggap relatif berhasil oleh AS.

Dalam kesempatan itu juga, sambil menyebut keberhasilan Australia di Timtim, Cohen juga menyatakan akan mengandalkan Australia untuk menangani kudeta di Fiji dan negosiasi-negosiasi di Kepulauan Solomon. AS juga meminta Australia untuk memimpin upaya 'penyelesaian krisis' di Indonesia. Dalam pidatonya, Cohen menyatakan peran Australia bukanlah sekadar 'subordinat' dari AS. Dengan kata lain, Cohen ingin mengatakan bahwa Australia bukan hanya sekadar wakil (deputi) 'sheriff', tetapi 'sheriff' baru di kawasan ini.

Keputusan ini semakin dipertegas saat kunjungan Menlu AS Condoleezza Rice ke Australia lalu. Rice juga menegaskan hal yang sama. Walhasil, AS akan terus bermain di kawasan ini secara tidak langsung. Namun, yang tampil secara resmi (dengan segala

Mohon tidak diletakkan sembarangan karena mengandung ayat suci Al Quran

politik Australia di Asia Tenggara, khususnya terhadap Indonesia, harus dipandang sebagai 'agenda' AS, juga agenda imperialis global yang dikampanye oleh AS.

### Islam Melarang Perpecahan.

Perpecahan di antara negeri-negeri Islam adalah sebuah dosa besar dan sebuah keharaman yang nyata. Allah SWT dan Rasulullah telah melarang tegas hal itu. Karena itu, upaya Australia untuk memanas-manasi sebagian wilayah Indonesia—yang merupakan salah satu negeri Muslim—untuk melepaskan diri tentu harus kita sikapi secara benar. Allah SWT berfirman:

﴿واعتصموا بحبلِ اللَّهِ حَمِيماً وَلَا تَفَرَّقُوا﴾

*Berpegang teguhlah pada tali (agama) Allah dan janganlah kalian bercerai-beral. (QS al-Imrân [3]: 103).*

Dalam nash tersebut kita dilarang tegas untuk saling tercerai-beral. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan tali ukhuwah kita dan menjaganya hingga titik darah penghabisan. Sebab, upaya asing memecah-belah negeri-negeri Muslim, termasuk Indonesia, selain dimaksudkan untuk memperlemah kaum Muslim dan negeri-negeri Islam, juga ditujukan untuk memperlambat upaya kaum Muslim untuk meraih kejayaannya kembali melalui tegaknya kembali Khilafah Islamiyah.

### Wahai kaum Muslim:

Selayaknya kita jangan mau didikte oleh pihak asing atau tunduk pada negara-negara kafir, seperti Australia dan AS. Sebab, sikap tunduk pada negara-negara asing yang kufur adalah sikap yang sangat bertentangan dengan jati diri kaum Muslim sebagai umat yang terbaik. Allah SWT berfirman:

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾

*Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia; melakukan amar makruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah. (QS Ali Imrân [3]: 110).*

tekanan asing, niscaya semakin kokoh pula cengkeraman itu atas negeri ini. Tidak ada cara lain kecuali rakyat Indonesia bersatu dan menolak segala campur tangan asing serta jangan mudah diadu-domba.

### Wahai para penguasa:

Waspadallah setiap sikap dan tindakan Australia yang turut mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Negara-negara besar, termasuk Australia, pada hakikatnya telah memproklamkan diri sebagai 'sheriff' AS di Asia Pasifik, yang akan senantiasa mengobok-obok Indonesia agar tidak menjadi negara Muslim yang mandiri, kokoh, kuat, dan maju. Kasus terakhir (pemberian suaka pada aktivis pro-penglepasan Papua dari Indonesia) merupakan rangkalan panjang upaya Australia mencampuri dan mencabik-cabik bangsa ini. Untuk itu, sikap yang tegas terhadap Australia adalah memutuskan hubungan diplomatik dengannya dan hubungan yang lain. Janganlah kita bersikap 'lamban' dan 'lembek'. Janganlah pula kita tunduk pada kekuatan asing manapun. Ingatlah firman Allah SWT:

﴿وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم

مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾

*Janganlah kalian tunduk kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kalian disentuh api neraka. Sekal-kali kalian tiada mempunyai seorang penolong pun selain Allah, kemudian kalian tidak akan diberi pertolongan. (QS Hûd [11]: 113).*

### Wahai kaum Muslim:

Kami menyerukan kepada seluruh kaum Muslim—baik para ulama, cendekiawan, para pemimpin ormas/parpol, para politisi, budayawan, para pengacara, para hartawan, para dosen maupun mahasiswa—agar waspada terhadap makar negara-negara asing yang ingin menggerogoti wilayah kita dengan menciptakan perpecahan di negeri Muslim ini. Marilah kita bersatu menghadapi makar itu dan mari kita berjuang untuk menjaga kesatuan negeri ini agar tidak semakin terpecah-belah. Allah SWT mewajibkan kita untuk



# AL ISLAM

HIZBUT TAHRIR INDONESIA

Melanjutkan Kehidupan Islam

http://www.hizbut-tahrir.or.id

Edisi 299/Tahun XIII

e-mail: info@al-islam.or.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## MENGIKUTI DAN MENELADANI RASULULLAH SAW

**B**ulan Rabiul awal merupakan bulan ekspresi kecintaan kepada Nabi Muhammad saw. Hari-hari pada bulan ini banyak digunakan untuk mengenang kebesaran dan jasa-jasanya. Beliau adalah manusia pilihan; bukan pilihan rakyat lewat Pemilu, tetapi manusia pilihan Allah SWT, Zat Yang Mahamulia. Dialah manusia mulia yang telah menunaikan amanah, menyampaikan risalah, membina umat, dan membebaskan manusia dari penyembahan kepada manusia menuju pada penyembahan kepada Pencipta manusia. Keluhuran Beliau diakui oleh dunia. Pengakuan tentang hal ini muncul dari bukan Muslim sekalipun. "Jika kita mengukur kebesaran dengan pengaruh, ia adalah seorang raksasa sejarah. Ia berjuang meningkatkan tahap ruhaniah dan moral suatu bangsa yang tenggelam dalam kebiadaban karena panas kegersangan gurun. Dia berhasil lebih sempurna dari pembaharu manapun. Belum pernah ada orang yang begitu berhasil mewujudkan mimpi-mimpinya seperti dia," tulis Will Durant dalam *The Story of Civilization*.

### Mengikuti Rasulullah saw.

Hal terpenting saat mengingat Nabi Muhammad saw. adalah menjadikannya sebagai suri teladan, mencintainya, dan mengikutinya (*ittibâ*). Keharusan mencontoh Rasulullah saw. bukan semata-mata

didasarkan pada ketentuan dari nash-nash al-Quran, melainkan juga fakta sejarah. Bukankah tidak ada manusia yang lebih mulia daripada Rasulullah saw.? Bukankah hanya Beliau yang akan mengantarkan manusia hidup selamat dunia-akhirat melalui Islam yang dibawanya?

Berkaitan dengan mengikuti Rasul ini ada tiga prinsip yang penting dicamkan.

*Pertama:* makna *ittibâ*' (mengikuti Rasul) adalah mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah saw. Allah SWT berfirman:

﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾

*Apa saja yang dibawa Rasul kepada kalian, terimalah; apa saja yang dilarangnya atas kalian, tinggalkanlah; dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (QS al-Hasyr [59]:7).*

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ

### Komentar AL ISLAM



**Kesadaran Terhadap RUU APP  
Meningkat (Republika, 4/4/06)**



*Semoga kesadaran terhadap syariat  
Islam juga meningkat.*

Jangan Dibaca Saat Khotib Berkhotbah!

أَمْ أَرَأَى أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْجَنَّةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَبْغِ اللَّهَ  
 وَرَسُولَهُ قَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴿٣٦﴾

Tidaklah patut bagi laki-laki Mukmin maupun bagi perempuan Mukmin, jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya dia telah sesat secara nyata. (QS al-Ahzāb [33]: 36).

Bahkan, kesediaan mengikuti ketetapan dan keputusan hukum Rasulullah saw. merupakan cerminan dari keimanan. Tidak ada keimanan tanpa ketaatan pada syariat Islam (lihat: QS an-Nisā [4]: 65).

**Kedua**, syariat Islam diturunkan oleh Zat Yang Mahatahu tentang seluruh manusia dengan segala aspek kemanusiaannya. Perbedaan suku, bangsa, bahasa, tempat dan waktu hidup bukanlah pembatas ataupun penghalang bagi penerapan syariat Islam. Kewajiban penerapan syariat tetap dapat dilaksanakan sepanjang masa. Karenanya, mengikuti (*ittibā*) Rasulullah merupakan perkara yang tetap relevan sekalipun pada zaman modern sekarang ini. Kemajuan sains dan teknologi bukanlah masalah dalam penerapan syariat. Sebab, sains dan teknologi hanya mengubah sarana hidup, tetapi tidak mengubah metode hidup dan kehidupan.

**Ketiga**, mengikuti Rasulullah saw. adalah sesuai dengan fitrah manusia. Betapa tidak, Islam yang dibawanya sesuai dengan fitrah manusia. Setiap ajaran Islam berupa akidah, ibadah, muamalah dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya pasti sesuai dengan fitrah manusia. Sebab, Islam berasal dari Allah, lalu diperuntukkan bagi manusia yang juga diciptakan oleh Allah SWT. Bukan hanya itu, mengikuti Rasulullah adalah ladang kebajikan, perolehan kasih sayang, dan limpahan ampunan. Allah SWT berfirman:

﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣١﴾

Katakanlah, "Jika kalian (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah

mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS Ali Imrān [3]: 31).

Beberapa Karakter Rasulullah saw.

Di antara karakter Rasulullah saw. adalah: **1. Senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT.**

Rasulullah saw. adalah orang yang paling takwa. Beliau *ma'shūm* (terpelihara dari dosa). Jaminan kebahagiaan bagi Beliau justru menjadikannya semakin dekat dengan Allah SWT. Beliau terpelihara dari dosa, tetapi permohonan ampunan dan tobatnya kepada Allah SWT luar biasa.

Abu Hurairah ra. berkata: Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda (yang artinya), "Demi Allah, sesungguhnya saya memohon ampunan dan bertobat kepada-Nya lebih dari tujuh puluh kali setiap harinya." (HR al-Bukhari).

*Subhānallāh*, Rasulullah beristigfar dan bertobat lebih dari 70 kali dalam 24 jam. Artinya, Beliau melakukannya 3 kali dalam satu jam. Beliau beristigfar 20 menit sekali! Hal ini Beliau lakukan baik sebagai pribadi maupun kepala negara. Kita perlu bertanya pada diri kita masing-masing, berapa kali kita memohon ampunan dan bertobat kepada Allah sehari semalam? Sementara itu, Beliau terpelihara dari dosa (*ma'shūm*), sementara kita bergelimpang dosa dan kesalahan. Setiap menghadapi permasalahan, segera beliau mengadu kepada Allah, dan memohon petunjuk dari-Nya hingga diturunkan wahyu. Bagaimana dengan kita? Apakah ketika kita mempunyai masalah, segera kita mengadu kepada Allah seraya kita menggali jawaban dan pemecahan masalah dari al-Quran dan as-Sunnah sebagai wahyu Allah? Ataukah sebaliknya, mencari solusi dari hukum yang lahir dari hawa nafsu dan logika manusia yang memang terbatas; atau bahkan mencari jawaban dari hukum kufur yang bertentangan dengan Islam?

**2. Teguh dalam kebenaran**

Rasulullah sangat teguh dalam berpegang pada kebenaran. Tak ingin Beliau menyimpang dari wahyu Allah SWT. Di antara sikap ini tampak saat Beliau didatangi oleh utusan kaum Quraisy. *Sirah Ibnu Hishyam* menggambarkan bahwa mereka menawarkan harta, kekuasaan,

dan wanita dengan konsekuensi Rasulullah membiarkannya mencari solusi sendiri. berhenti berpegang pada Islam dan dakwahnya. Dengan tegas Beliau menyatakan melalui pamannya, Abu Thalib (yang artinya), "Demi Allah, andai saja mereka dapat meletakkan matahari di genggam tangan kananku dan rembulan di genggam tangan kiriku, dengan konsekuensi aku harus meninggalkan urusan (Islam) ini, niscaya aku tak akan pernah meninggalkannya hingga Allah memenangkannya atau aku binasa dalam memperjuangkannya."

Kita perlu merenung. Sekarang, misalnya, sudah menjadi rahasia umum ketika para pemimpin negara asing berkunjung, banyak tawaran dari mereka kepada para penguasa Muslim untuk tetap berkuasa. Mereka siap mendukung dengan dana dan kekuatan. Syariatnya, penguasa tidak menerapkan syariat Islam. Jika tidak, penguasa dan negaranya tersebut dicap negatif dengan sebutan fundamentalis atau radikal, atau negara pendukung terorisme.

Para penguasa dan pemimpin kaum Muslim yang mengikuti Rasulullah saw. tidak akan memperhatikan tawaran itu. Prinsip "KKIK" (yakni berikhtilaf kepada kami Kekuatan, Kekuasaan, dan Investasi, niscaya kami berikan Konsesi) terhadap asing merupakan penentangan terhadap sikap Rasulullah saw. Sebaliknya, sikap siapapun Muslim, termasuk penguasanya, adalah bahwa Islam itulah persoalan hidup dan matinya.

**3. Pengayom rakyat.**

Sebagai kepala negara, Rasulullah berjalan bersama janda, orang miskin, dan budak untuk mencukupi hajat dan keperluan mereka (HR an-Nasai dan al-Hakim). Beliau mengumpulkan sebagian Sahabatnya yang miskin di sudut masjidnya menjadi *ahlu shuffah*. Beliau lebih mementingkan rakyatnya. Makanan yang dimilikinya sering dibagikan kepada mereka. Bahkan sejak tiba di Madinah hingga akhir hayatnya Beliau selalu dalam keadaan lapar selama tiga hari berturut-turut (HR al-Bukhari dan Muslim).

Stapapun yang hendak mengikuti Rasulullah mestinya menjadi pengayom rakyat. Dulu, Rasulullah berupaya menyediakan tempat tinggal bagi rakyatnya yang miskin, bukan justru menggusur rumah-rumah penduduk dan

memberikan harta milik negara dan untuk rakyatnya, bukan malah mengkor untuk memperkaya diri. Beliau memi modal tanah, bibit, dan peralatan pe bagi rakyatnya yang tidak punya, bukar membiarkan peluang kerja dalam diserbu oleh pihak asing dengan alasan bebas. Sungguh, mengikuti Rasulullah penerapan syariat akan memilik keber kepada kepentingan rakyat, kepentingan asing.

**4. Keras terhadap kekufuran dan terhadap sesama Muslim.**

Al-Quran secara tegas mengabadikan dalam firman-Nya:

﴿سُرُّلُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَرَاءِ رَحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾  
 Muhammad itu adalah utusan Allah dar orang yang bersama dengannya adala terhadap orang-orang kafir, tetapi bi sayang sesama mereka. (QS al-Fath 29).

Bahkan Beliau menegaskan bahw Islam ini bersaudara, laksana satu ibarat satu bangunan. Kaum Muslim : dituntut untuk mengikuti sikap Ras tersebut. Jangan sampai terjadi sebi kepada umat Islam selalu menaruh bahkan cenderung memusuhi, ser dengan negara kafir penjajah justru berpegang tangan. Tanpa sikap sepi kaum Muslim akan tetap dapat didadu oleh kaum kafir imperialis.

**5. Berkata benar dan tegas dalam b dengan kaum kafir.**

"Islam adalah tinggi dan tidak ac dapat melebihi ketinggiannya," begit pernah menyatakan. Nabi Muhamme meyakini hal ini. Tugas Beliau pun mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya Islam. Ketika kaum mengajak Beliau untuk saling meny Tuhan masing-masing, turunlah wahy al-Kāfirūn. Sungguh, nama suratny menjelaskan ketegasan sikap terhadap tersebut, yakni tidak ada sinkretisn pencampuran kebenaran kebatilan. Bahkan sirah dan berbaga

Mohon tidak diletakkan sembarang karena mengandung ayat suci Al-Quran

umatnya. Benar tidak berdialog dengan orang-orang kafir demi mencari persamaan dengan melupakan perbedaan sekalipun merupakan akar persosial. Tidak pernah Nabi saw. melakukan hal demikian.

Pada saat ini terdapat dua peradaban besar, yakni peradaban besar Islam dan Barat. Merujuk pada contoh Rasulullah saw. maka yang harus dilakukan bukanlah dialog mencari persamaan. Hal itu hanya akan merupakan

**Wahai kaum Muslim:**

Rasulullah adalah suri teladan kita. Marilah kita secara utuh dan total mengikuti Rasulullah dalam menegakkan Islam. Hanya dengan cara inilah, kelahiran Nabi saw. benar-benar akan menjadi momentum sebagai kelahiran kembali umat Islam yang menjadi umat terbaik untuk seluruh umat manusia. []

**AGENDA KEGIATAN**



**TERBARU | April '06**  
**MENYALURKAN KEBENARAN**  
 HIZBUT TAHRIR INDONESIA  
 حزب التحرير إندونيسيا  
**MELAHIRKAN KETAQWAAN**  
 Segera Dapatkan,  
 Jangan Sampai  
 Kehabisan.

**DAURAH DIROSAH ISLAMIAH**  
 Ahad, 9 April 2006  
 Di Ruang Seminar Lt.7  
 Kampus Narotama

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Sby  
 Matani  
 Adidani (Ust. S. Fatih,  
 Syarah & Syakhshiyah (Ust. Hisyam Hidayat,  
 Dakwah (Ust. Ekki AZ) dan Wawasan  
 Kontemporer (Ust. Muhammad Al Fatih)

**Ikhwah/Akhwat**  
 Pelajar/Mahasiswa: Rp. 5.000, Umum: Rp. 10.000  
 Pendaftaran: Hanif (031-70808467)  
 Sigit (081-332-549-498)

**DISKUSI PUBLIK**  
**Menyambut Satu Kepemimpinan Umat Islam (Khilafah)**  
 Ahad, 9 April 2006  
 08.00 - 11.30 WIB  
 di Masjid Ulul Albab IAIN Sunan Ampel Surabaya  
 Pembicara:  
 Prof. Dr. Aminuddin Kasdi  
 (Guru Besar Sejarah Unesa Sby)  
 Prof. Dr. Ali Aziz  
 (Guru Besar IAIN Sunan Ampel Sby)  
 Hisyam Hidayat (DPD HTI Jatim)  
 CP. Sigit (081 332 549 498)  
 Rochim (031-71028436)

Buletin Dakwah AL-ISLAM terbit setiap Jum'at. Penerbit: **HIZBUT TAHRIR INDONESIA**  
 Kantor HUMAS HTI daerah Surabaya: Gedung LSIA, Jl. Mulyorejo Utara 203 A ☎ (031) 3893848 / 70437742;  
 Gresik:(031)70142715, Lamongan:(0322)311067, Mojokerto:(0321)323942, Jombang:(0321)7208271,  
 Sumenop:(0328)672390, Pamekasan:(0324)327145, Sampang:(0323)321898, Bangkalan:(031)70147323,  
 Mataram:(0370)621038. Berlangganan min. 50 eks. Infaq: Rp 200,-/eks.

